

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LAPORAN KINERJA

PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Tahun 2023



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Jalan Trans Kalimantan KM. 86 Pulang Pisau 748111,
Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Telp. (0513) 2027516

**# bangga
melayani
bangsa**



KETUA DAN WAKIL KETUA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU



MOHAMAD ZAKIUDDIN, S.H.

KETUA



KURNIA FITRIANINGSIH, S.H

WAKIL KETUA

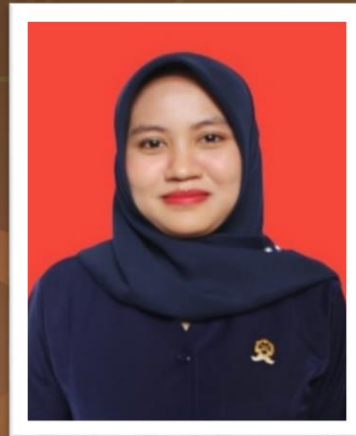


HAKIM PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Ismaya Salindri, S.H., M.H.



Silvia Kumalasari, S.H.



Dwi Fahriyah Suci
Anggraini, S.H.



Ishmatul Lu`Lu, S.H.



Herjanriasto Bekt
Nugroho, S.H., M.H.



Niken Anggi Prajanti,
S.H., M.Kn





PANITERA DAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU



RUSPELIATI, S.H.
Panitera



I MADE LANDEP, S.H.
Sekretaris



PEJABAT STRUKTURAL PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU



Dede Andreas, S.H., M.H.
Panitera Muda Perdata



Laili Rahmah, A.Md., S.H.
**Kasubag Kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana**



Lelo Herawan, S.H.
Pidana Muda kum



Samsul Rizal, S.H.
Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan



Reinhard Simanjuntak, S.H.
**Kasubag Umum dan
Keuangan**

KATA PENGANTAR

Mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta untuk melaksanakan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2020-2024 yang telah memasuki tahun ketiga, maka Laporan kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas terlaksananya capaian kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau selama tahun 2023.

Tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah merupakan arah strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun ke depan. Semangat baru yang tercermin dalam visi misi Presiden diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional salah satunya berkaitan dengan penegakan sistem hukum nasional yaitu memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan keamanan dan transformasi pelayanan publik maka berkenaan dengan hal tersebut Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah juga menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Berdasarkan arahan RPJMN dan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI tahun 2020 – 2024 dan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dalam melaksanakan agenda tersebut diperlukan adanya reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas, peningkatan akses terhadap keadilan, dan perbaikan penataan regulasi serta tata kelola sistem peradilan secara modern yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan aplikasi e-Court dan e-Berpadu yang berkesinambungan untuk menunjang administrasi dan pelaksanaan persidangan sebagai upaya mengoptimalkan peran teknologi digital dalam rangka percepatan penyelesaian perkara yang merupakan tugas pokok dari fungsi Pengadilan Negeri Pulang Pisau yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut perlu dipantau secara berkesinambungan, akuntabel dan transparan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Perwujudan dari kinerja dituangkan dalam sebuah laporan akuntabilitas kinerja pemerintah yang tidak hanya berfungsi sebagai laporan pengukuran kinerja namun juga sebagai wujud telah dilaksanakannya evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 dan juga sebagai acuan dalam memberikan rekomendasi perbaikan dalam merumuskan perencanaan kedepannya.

Demikian yang dapat kami sampaikan tentang laporan kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023, dengan harapan semoga apa yang disampaikan ini dapat menjadi informasi bagi para pemangku kepentingan yang ingin mengetahui capaian kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau selama tahun 2023.

Pulang Pisau, 12 Februari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau



Mohamad Zakiuddin
MOHAMAD ZAKI UDDIN



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Pulang Pisau, 12 Februari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau


MOHAMAD ZAKIUDDIN

FORMULIR REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

No	Pernyataan	Checklist
1	Format	<ul style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP. ✓ 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja. ✓ 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai. ✓ 4. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai. ✓ 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan. ✓ 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan. ✓
2	Mekanisme Penyusunan	<ul style="list-style-type: none"> 1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu. ✓ 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai. ✓ 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj. ✓ 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja. ✓ 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya. ✓ 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait. ✓ 7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya. ✓
3	Substansi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja. ✓ 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis. ✓ 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai. ✓ 4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja. ✓ 5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama. ✓

	<p>6. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama.</p> <p>7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.</p> <p>8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran.</p> <p>9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai.</p> <p>10. IKU dan IK telah SMART.</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>
--	---	--

Pulang Pisau, 12 Februari 2024
ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau



MOHAMAD ZAKI UDDIN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan visi Pengadilan Negeri Pulang Pisau yaitu Terwujudnya Pengadilan Negeri Pulang Pisau Yang Agung, maka dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2020-2024 ditetapkanlah Program Penegakan dan Pelayanan Hukum untuk menjalankan tugas dan fungsi utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau sekaligus memenuhi agenda pembangunan hukum yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Sasaran dari program tersebut yaitu:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sedangkan Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan sasaran, Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Kedua program yang telah ditetapkan tersebut dilaksanakan dalam koridor sebuah sistem yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memastikan efektifitas tercapainya sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran dianggap efektif dan efisien apabila pemanfaatannya berorientasi pada outcome yang kinerjanya dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka laporan kinerja organisasi disusun untuk menggambarkan sejauh mana organisasi meningkatkan kinerja berdasarkan realisasi dan capaian masing-masing sasaran program yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Tahun 2023 mengukur dan mengevaluasi sejauh mana realisasi dan capaian masing-masing sasaran strategis berdasarkan 13 (Tiga Belas) indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	102,04 %
		b. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	102,04 %
		c. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100,89 %
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	104,52 %
		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	-
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	104,59 %
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			102,82 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	103,09 %
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	103,09 %
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	-
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			103,09 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100,00 %
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III			100,00%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	105,26%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV			105,26%
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran	102,08%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis V			102,08 %
Rata – Rata Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023			102,65%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN TELAH DI REVIU	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI.....	3
C. SISTEMATIKA LAPORAN.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024	11
B. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024.....	13
C. RENCANA KINERJA TAHUN 2023	19
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	23
B. REALISASI ANGGARAN	52
BAB IV PENUTUP	60
LAMPIRAN.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023.....	vii
Tabel 2.1. Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau.....	14
Tabel 2.2 : Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Pulang Pisau.....	20
Tabel 2.3. Revisi ke-2 Rencana Kinerja Tahun 2023	21
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023	22
Tabel 2.5. Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2023	24
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023.....	25
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2023.....	27
Tabel 3.3 : Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu	28
Tabel 3.4. Perkara Pidana Yang Masuk Selama Tahun 2023.....	29
Tabel 3.5 : Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Perkara	29
Tabel 3.6. Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023 Berdasarkan Beban Perkara	30
Tabel 3.7 : Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023 Berdasarkan Rasio Produktivitas	31
Tabel 3.8 : Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara Pidana pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023	31
Tabel 3.9 : Persentase Penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu.....	32
Tabel 3.10. Perkara Perdata Yang Masuk Selama Tahun 2023	33
Tabel 3.11 : Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Perkara	33
Tabel 3.12. Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023 Berdasarkan Beban Perkara	34
Tabel 3.13 : Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023 Berdasarkan Rasio Produktivitas	35
Tabel 3.14 : Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara Perdata pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023	35
Tabel 3.15 : Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Pengadilan Negeri Pulang Pisau	36
Tabel 3.16. Perincian Perkara Pidana Anak Tahun 2023.....	37
Tabel 3.17. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	38
Tabel 3.18 : Perkara Upaya Hukum Banding	38
Tabel 3.19 Keadaan Perkara pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023	39
Tabel 3.20. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.....	40
Tabel 3.21 Perkara Kasasi Selama Tahun 2023	40

Tabel 3.22 : Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Kasasi Tahun 2023	41
Tabel 3.23 : Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	42
Tabel 3.24 : Jumlah Perkara Pidana Anak melalui Diversi Tahun 2023	42
Tabel 3.25 : Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan.....	43
Tabel 3.26 : Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan Umum Tahun 2023	44
Tabel 3.27. Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Triwulan I 2023	45
Tabel 3.28. Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Triwulan II 2023	45
Tabel 3.29. Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Triwulan III 2023	46
Tabel 3.30. Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Triwulan IV 2023	46
Tabel 3.31 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2023.....	47
Tabel 3.32 : Persentase Salinan Putusan Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	48
Tabel 3.33 : Waktu Penyampaian Salinan Putusan Pidana Tahun 2023	48
Tabel 3.34 : Persentase Salinan Putusan Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	49
Tabel 3.35 : Waktu Penyampaian Salinan Putusan Perdata Tahun 2023	49
Tabel 3.36 : Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui mediasi	50
Tabel 3.37 : Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Tahun 2023	50
Tabel 3.38 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2023.....	51
Tabel 3.39 : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan Tahun 2018 – 2023	52
Tabel 3.40 : Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2018 – 2023	52
Tabel 3.41 : Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	53
Tabel 3.42 : Data Layanan Sidang di Luar Gedung Tahun 2018-2023	54
Tabel 3.43 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	54
Tabel 3.44 : Data Layanan Posbakum Tahun 2018- 2023	55
Tabel 3.45 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2023	55
Tabel 3.46 : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti	56

Tabel 3.47 : Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti	56
Tabel 3.48 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2023	57
Tabel 3.49 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2023	58
Tabel 3.50 : Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023	60
Tabel 3.51 : Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 Per Jenis Belanja DIPA BUA (401920)	60
Tabel 3.52 : Laporan Realisasi Penyerapan Belanja Modal Tahun 2023	61
Tabel 3.53 : Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 Per Jenis Belanja DIPA BADILUM (402026).....	63
Tabel 3.54 : Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2019- 2021	64
Tabel 3.55 PNBP DIPA BUA dan BADILUM Tahun 2019-2023	65
Tabel 3.56 : PNBP DIPA BUA Tahun 2019 - 2023 Pengadilan Negeri Pulang Pisau	66
Tabel 3.57 : PNBP DIPA BADILUM Tahun 2019 - 2023 Pengadilan Negeri Pulang Pisau.....	67
Tabel 3.58. Laporan Keuangan Perkara Perdata Tahun 2023	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Pulang Pisau	3
Gambar 1.2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pulang Pisau	6
Gambar 2.1 Alur Penetapan Sasaran Strategis	11
Gambar 2.2 Visi Pengadilan Negeri Pulang Pisau	11
Gambar 2.3 Misi Pengadilan Negeri Pulang Pisau.....	12
Gambar 3.1. Perkara Masuk Pidana Selama tahun 2023	29
Gambar 3.2. Beban Penanganan Perkara Pidana Tahun 2018-2023	30
Gambar 3.3 : Rasio Produktivitas Penangan Perkara Pidana Tahun 2018 – 2023 Perkara Pidana	31
Gambar 3.4. Perkara Masuk Perdata Selama tahun 2023.....	33
Gambar 3.5. Beban Penanganan Perkara Perdata Tahun 2018-2023	35
Gambar 3.6 : Rasio Produktivitas Penangan Perkara Perdata Tahun 2018 – 2023 Perkara Pidana	36
Gambar 3.7: Permohonan Banding Selama tahun 2023.....	37
Gambar 3.8. Permohonan Kasasi Selama tahun 2023	38
Gambar 3.9 : Nilai SMART DIPA BUA	59
Gambar 3.10 : Nilai SMART DIPA BADILUM.....	60
Gambar 3.11. Grafik Realisasi PNBPN Tahun 2019 – 2023.....	66
Gambar 3.12. Grafik Realisasi PNBPN DIPA BUA Tahun 2019 – 2023.....	67
Gambar 3.13. Grafik Realisasi PNBPN DIPA BADILUM Tahun 2019 – 2023.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 berlandaskan pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua dan diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, salah satunya adalah memperkuat stabilitas Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik. Di sisi lain, RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan 17 (tujuh belas) tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) pilar, salah satunya adalah pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Sehingga, tujuan dari Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sekaligus pemegang kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya, memiliki andil yang besar dalam melaksanakan agenda pembangunan untuk memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Kedudukan dan perannya yang strategis memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan di bidang hukum. Untuk itu, seluruh program kerja Mahkamah Agung didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, maupun Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Pengadilan Negeri Pulang Pisau Dalam melaksanakan agenda masalah hukum dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan *Good Governance* adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud dari terlaksananya akuntabilitas tersebut adalah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

LKjIP ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2023 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengadilan Negeri Pulang Pisau senantiasa berupaya mengoptimalkan pencapaian kinerja dan secara periodik menyusun laporan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur, serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan

berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja di waktu yang akan datang.

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

1. Kedudukan Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Pengadilan Negeri Pulang Pisau (PN Pulang Pisau) adalah Pengadilan tingkat pertama kelas II dibawah Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam naungan Direktorat Jenderal Peradilan Umum dilingkungan Mahkamah Agung RI adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Pulang Pisau dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 14 Tahun 2016 dan mulai resmi beroperasi pada tanggal 01 Nopember 2018. Yurisdiksi Pengadilan Negeri Pulang Pisau meliputi wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang terdiri dari 8 kecamatan, 91 desa definitif, 1 desa persiapan, yaitu Desa Sukamaju, UPT Anjir Pulang Pisau dan 2 kelurahan, yakni Kelurahan Pulang Pisau dan Kelurahan Kalawa.



Gambar 1.1. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Pulang Pisau

2. Wewenang, Fungsi dan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pulang Pisau

a. Wewenang

- 1) Pengadilan Negeri Pulang Pisau merupakan Lembaga peradilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum adalah sebagai lembaga peradilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan pada tingkat pertama
- 2) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

b. Fungsi

Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebagai lembaga peradilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan bertugas melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Fungsi Mengadili (*Judicial Power*)

Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.

Fungsi pembinaan

Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan

Fungsi nasehat

Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

Fungsi administratif

Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/ teknologi informasi/pelaporan, kepegawaian /organisasi/ tatalaksanaan,dan keuangan /Umum/perlengkapan).

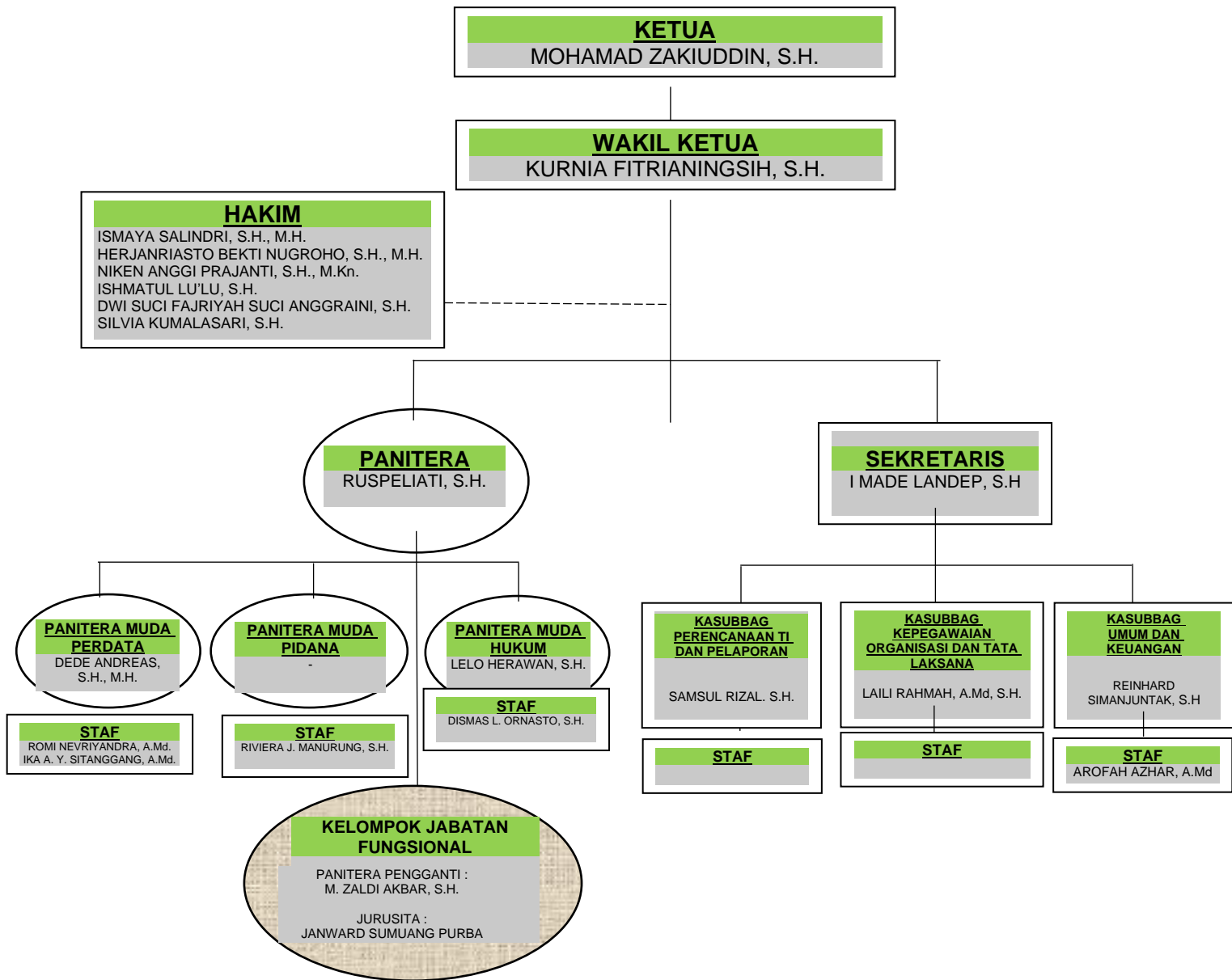
Fungsi Lainnya

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

c. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Struktur organisasi dan uraian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pulang Pisau mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.



Gambar 1.2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pulang Pisau

3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, kegiatan dan pelayanan pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau bertumpu pada isu-isu strategis, analisis faktor-faktor strategis internal maupun eksternal dari lingkungan organisasi yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pembangunan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Resources* (Sumberdaya) dan *Organization* (Organisasi) yang ada dan tumbuh serta berkembang dalam instansi.

Potensi permasalahan pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau dipetakan melalui analisis SWOT, sebagai metode perencanaan strategis untuk menganalisis dan mengevaluasi suatu masalah atau kondisi berdasarkan faktor *strengths*, *weakness*, *opportunities* dan *threats* dalam sebuah organisasi dan bisnis.

a) Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan internal berpengaruh terhadap kinerja peradilan yang dapat mengoptimalkan kekuatan dan menganalisis kelemahan dalam menunjang perumusan kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan.

1) *Strengths* (Kekuatan)

- Potensi sumberdaya manusia secara kualitas cukup memadai.
- Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai.
- Potensi lingkungan internal yang memadai.
- Stuktur Organisasi dengan nomenklatur baru.
- Adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi (Tusi).

2) *Weakness* (Kelemahan)

- Kurangnya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan peradilan secara internal peradilan menyangkut masalah pengelolaan Teknologi Informasi (TI), serta masih perlu pembenahan

sarana dan prasarana TI di sektor internal Pengadilan.

- Kurangnya alokasi anggaran di dalam pengembangan TI sebagai sarana pelayanan public.
- Sumber daya manusia secara kuantitas belum memenuhi beban kerja yang ada.
- Belum meratanya volume pekerjaan tiap personil yang menggambarkan volume pekerjaan sesungguhnya.
- Masih perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Peradilan melalui diklat maupun bimtek yang dilakukan secara berkesinambungan.

b) Analisis Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal dalam hal ini dimaksudkan adalah faktor lingkungan luar yang dapat berpengaruh pada kinerja Instansi Pengadilan Negeri Pulang Pisau, antara lain :

1) *Opportunities* (Peluang)

- Kepercayaan publik meningkat yang dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Anti Korupsi.
- Dukungan dari institusi-institusi pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat setempat, maupun stakeholders terkait lainnya.
- Letak geografis, lingkungan dan keadaan sosial budaya masyarakat setempat.

2) *Threats* (Ancaman)

- Masih ada upaya dari pencari keadilan untuk melakukan intervensi terhadap Hakim pemeriksa perkara.
- Perkembangan TI yang sangat pesat namun tidak didukung dengan kapasitas maupun kualitas SDM yang memadai.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

LKjIP ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau selama tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas dalam rangka

terwujudnya good governance. LKJIP ini disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran tugas, fungsi, wewenang, Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan Penjelasan tentang Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024, Rencana Kinerja Tahun 2023, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

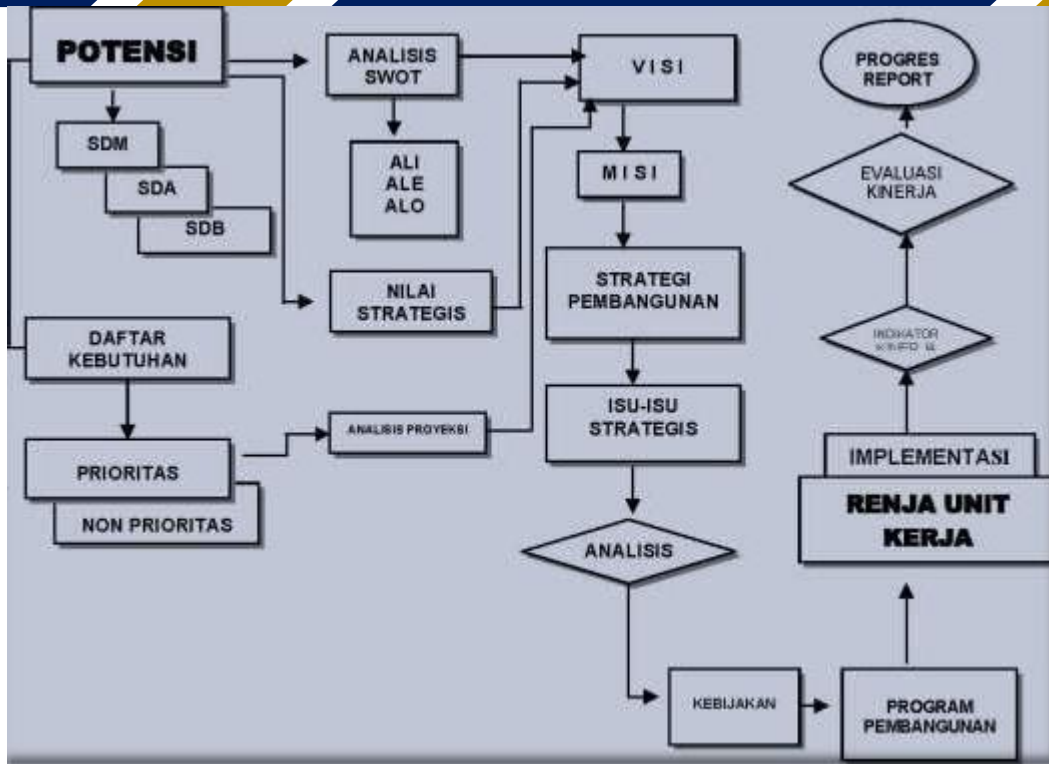
BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2020 – 2024 mengacu kepada Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 – 2024, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 dan juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035. Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran dan strategi Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Secara garis besar, Pengadilan Negeri Pulang Pisau mendukung penjabaran RPJMN 2020-2024 dan arahan kebijakan dan strategi nasional yang didasarkan pada kaidah-kaidah pembangunan nasional khususnya terkait dengan agenda pembangunan ketujuh yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui : (1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; (2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil; (3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; (4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; (5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Hasil pelaksanaan Reviu Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan kemudian dievaluasi dan diakumulasi menjadi progres report tahunan Pengadilan Negeri Pulang Pisau.



Gambar 2.1 Alur Penetapan Sasaran Strategis

Keterangan :

- SDA : Sumberdaya Alam
- SDM : Sumberdaya Manusia
- SDB : Sumberdaya Buatan
- ALI : Analisis Lingkungan Internal
- ALE : Analisis Lingkungan Eksternal
- ALO : Analisis Lingkungan Organisasi

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi dan mengacu kepada Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020-2024, Pengadilan Negeri Pulang Pisau merumuskan visinya, sebagai berikut



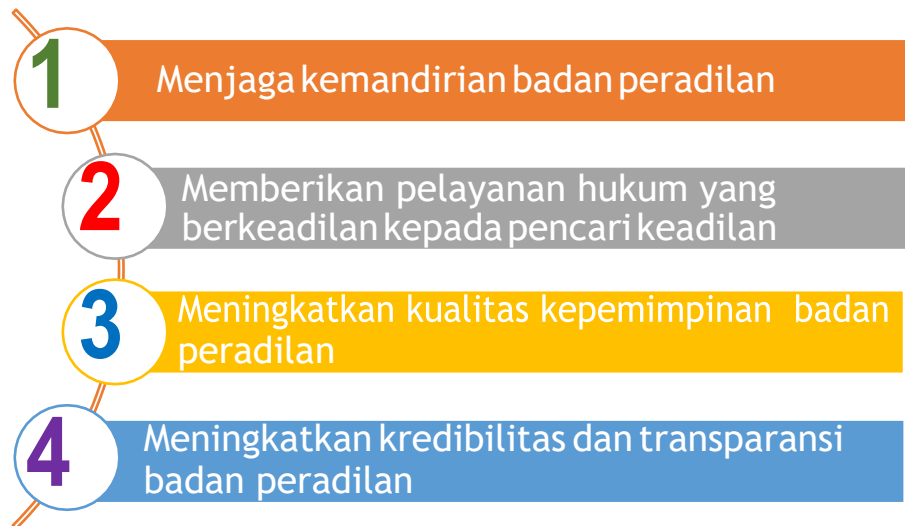
***Terwujudnya Pengadilan Negeri
Pulang Pisau Yang Agung***

Gambar 2.2 Visi Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Perumusan visi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah

yang tepat dan fokus bagi Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam mencapai keberhasilan organisasi. Perumusan visi juga merupakan wujud komitmen Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk selalu memperbaiki kualitas pelayanan kepada stakeholders Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:



Gambar 2.3 Misi Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Untuk mengukur sejauh mana visi dan misi tersebut telah dicapai, maka rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan;
- b) Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut dan sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Pengadilan Negeri Pulang Pisau **menetapkan sasaran strategis** sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dimana IKU (Indikator Kinerja Utama) Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah direviu berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 31 Januari 2022. Kemudian Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau tersebut di tegaskan kembali berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor W16-U11/3.c/KPN/OT.01/SK/2/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Penetapan reviu ke-I Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II Tahun 2020 – 2024. Reviu Indikator Kinerja Utama tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.1. Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\square \text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\square \text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	$\frac{\square \text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\square \text{Jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial • Jumlah perkara yang di sel e salakan dengan restoraktif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoraktif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ. 		
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah perkara khusus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan melalui Diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara diversi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">Indeks kepuasan pencari keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMEN PAN RB Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang di minutasikan dan dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah putusan adalah perkara minutasikan yang sudah diputus/dikirimkan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasikan dan Pemberkasikan Perkara. • Jumlah salinan putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasikan pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Diluar Gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tuidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada infomasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none">• Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi• Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan		
--	--	--	---	--	--

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Pulang Pisau memiliki 2 program yang akan dilaksanakan oleh yaitu :

I. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu:

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Upaya ini dijabarkan di dalam 1 kegiatan, yaitu:

- a) Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

II. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung dengan sasaran program:

- a) Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Sasaran program ini merupakan turunan dari 4 sasaran strategis, yaitu :

- a) Persentase realisasi anggaran

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Program ini mencakup 2 Kegiatan, yaitu:

- a) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
- b) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Rencana Kinerja Tahun 2023 memuat target kinerja tahun 2023 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini merupakan komitmen yang hendak dicapai oleh

Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam periode tahun 2023. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Mengacu pada Reviu Rencana Strategis 2020-2024 dan Reviu Indikator Kinerja Utama 2020-2024 pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau maka disusun Rencana Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 2.2 : Rencana Kinerja Tahun 2023
Pengadilan Negeri Pulang Pisau**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun ke III (2023)	
1	2	3	4	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98 %
		b.	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0.1 %
		c.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85 %
		d.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90 %
		e.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0.1 %
		f.	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95 %
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97 %
		b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	9 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0.1 %
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0.1 %
		c.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)		95 %

Setelah dilakukan Monitoring dan Evaluasi, Serta menindaklanjuti hasil LHE dari Pengadilan Tinggi Palangka Raya maka dilakukan Reviu terhadap Rencana Strategis, Reviu IKU, Revisi Perjanjian Kinerja dan Revisi Rencana Kinerja Tahunan tahun 2023. Adapun Revisi ke-1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3 : Revisi ke-2 Rencana Kinerja Tahun 2023
Pengadilan Negeri Pulang Pisau**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun ke III (2023)	
1	2	3	4	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98 %
		b.	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	98 %
		c.	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0.1 %
		d.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	84 %
		e.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90 %
		f.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0.1 %
		g.	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,7
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97 %
		b.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97 %
		c.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	0.1 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0.1 %
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0.1 %
		c.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100 %

4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	95 %
----	--	--	------

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, serta menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Berdasarkan Reviu Rencana Strategis 2020-2024 dan Reviu Indikator Kinerja Utama 2020-2024, serta mengacu pada Rencana Kinerja Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, maka ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023 telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau dimana terdapat 5 (Lima) sasaran strategis dan 13 (Tiga Belas) indikator kinerja, seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98 %
		b.	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	98 %
		c.	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0.1 %
		d.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	84 %
		e.	Persentase Perkara	90 %

			Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	
		f.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0.1 %
		g.	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,7
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97 %
		b.	Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97 %
		c.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	0.1 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0.1 %
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0.1 %
		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	95 %
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau		Persentase realisasi anggaran	97 %

Untuk mendukung tercapainya kinerja tersebut, Pengadilan Negeri Pulang Pisau mendapat anggaran dengan total pagu Rp. 13.318.492.000,- (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan rincian alokasi anggaran per program Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.5. Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2023

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)
1	PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM	93.000.000,-
2	DUKUNGAN MANAJEMEN	13.225.492.000,-
	JUMLAH	13.318.492.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Target dan Realisasi Kinerja

Untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mengukur akuntabilitas kinerja yang merupakan gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu program/kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis organisasi. Adapun capaian kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98,00 %	100,00 %	102,04 %
		b. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	98,00 %	100,00 %	102,04 %
		c. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0.10 %	-	-
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	84,00 %	84,75 %	100,89 %
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90,00 %	94,07 %	104,52 %

		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0.10 %	-	-
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,7	3,85	104,59 %
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I					102,82 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97,00 %	100,00 %	103,09 %
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97,00 %	100,00 %	103,09 %
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	0.1 %	0 %	-
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II					103,09 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0.1 %	-	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0.1 %	-	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III					100,00 %
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap	Persentase putusan perkara perdata yang	95%	100%	105,26%

	Putusan Pengadilan	ditindaklanjuti (Dieksekusi)			
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV					105,26%
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran	97,00 %	99,02 %	102,08%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis V					102,08%
Rata – Rata Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023					102,65%

2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir dan target jangka menengah

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

SASARAN I. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur kinerja keberhasilan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 5 (lima) indikator sebagaimana yang diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98,00 %	100,00 %	102,04 %
		b. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	98,00 %	100,00 %	102,04 %

	c. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0.10 %	-	-
	d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	84,00 %	84,75 %	100,89 %
	e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90,00 %	94,07 %	104,52 %
	f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0.10 %	-	-
	g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,7	3,85	104,59 %
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I				102,82 %

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2023:

Indikator Kinerja 1. Persentase penyelesaian perkara Pidana tepat waktu

Indikator ini untuk mengukur waktu penyelesaian perkara khususnya perkara putus tepat waktu sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014 (SEMA Nomor 2 Tahun 2014) 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) Bulan. Perhitungan rerata waktu memutus adalah selisih antara tanggal Pendaftaran perkara hingga tanggal perkara diputus.

Tabel 3.3 : Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2023	2022	2021	2020	2019
Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98 %	100 %	102,04	103,09	104,17	88,19	100

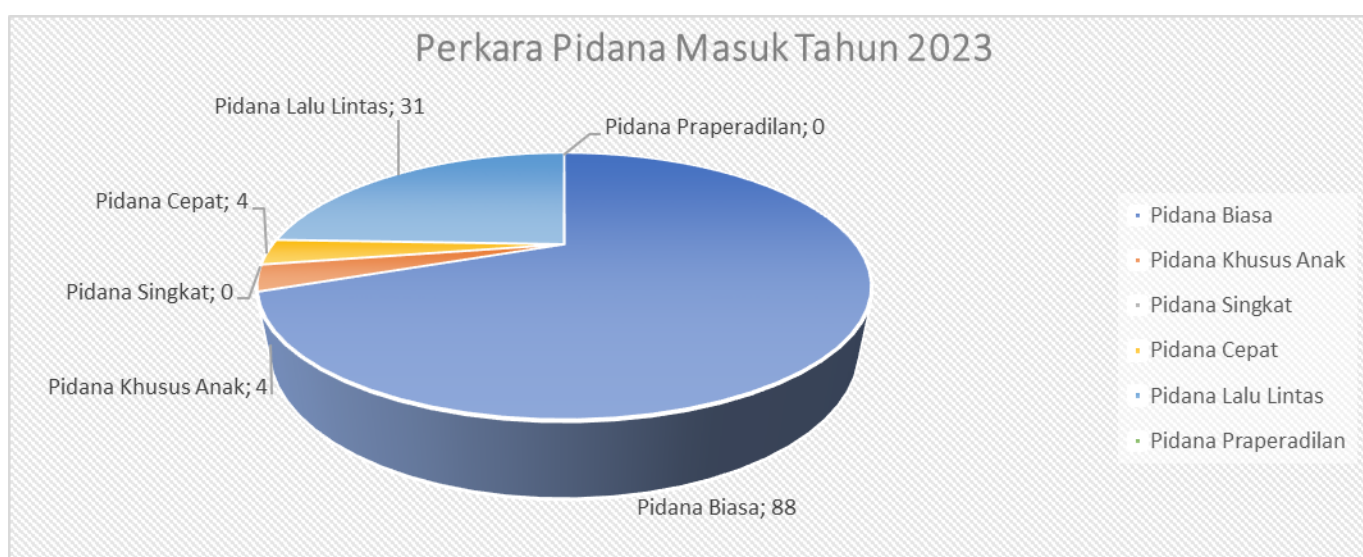
Perkara Pidana yang masuk pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau selama tahun 2023 berjumlah 127 Perkara Pidana termasuk Perkara Lalu Lintas. Adapun Rincian Perkara

Pidana yang masuk dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4. Perkara Yang Masuk Selama Tahun 2023

No.	Nama	Perkara Masuk
1	Pidana Biasa	88
2	Pidana Khusus Anak	4
3	Pidana Singkat	0
4	Pidana Cepat	4
5	Pidana Lalu Lintas	31
6	Pidana Praperadilan	0
Jumlah Perkara Masuk Selama tahun 2023		127

Sehingga dapat digambarkan sebaran perkara Pidana masuk selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1. Perkara Masuk Pidana Selama tahun 2023

Pada Tahun 2023 beban perkara Pidana Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebanyak 100 perkara mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 90 perkara. Pada Tahun 2023 Pengadilan Negeri Pulang Pisau berhasil memutus 89 perkara pidana.

Tabel 3.5 : Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Perkara

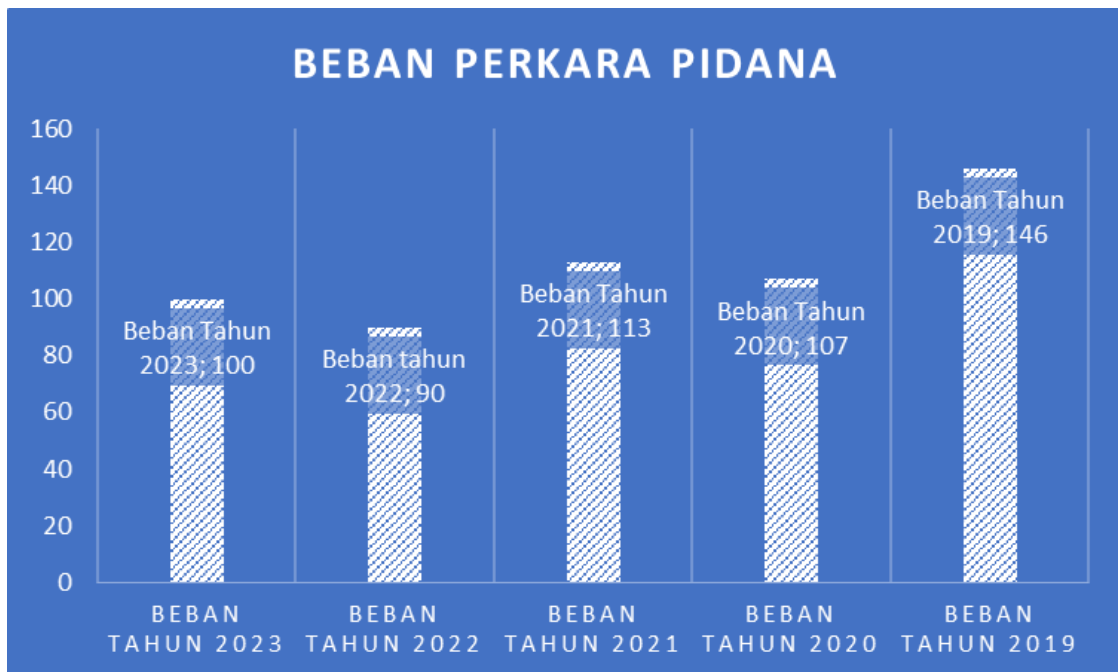
Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa 2023	Rasio Produktivitas
Pidana	4	96	100	89	11	89,00 %
Jumlah	4	96	100	89	11	89,00 %

Sehingga Rasio Penanganan Perkara atau Rasio Produktivitas memutus Perkara Pidana adalah 89,00% pada tahun 2023 atau turun 6,55% dari 95,55 % pada tahun 2022.

Tabel 3.6. Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023 Berdasarkan Beban Perkara

Jenis Perkara	Beban 2023	Beban 2022	Beban 2021	Beban 2020	Beban 2019
Pidana	100	90	113	107	146
Jumlah	100	90	113	107	146

Beban Perkara yang ditangani oleh Pengadilan negeri Pulang Pisau trendnya mengalami kenaikan dimana beban Perkara tahun 2023 berjumlah 100 perkara, sedangkan tahun sebelumnya 90 Perkara pidana tahun 2022 cenderung lebih rendah namun agak tinggi di tahun tahun sebelumnya yaitu 113 Perkara tahun 2021, 107 Perkara tahun 2020 dan 146 perkara tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa sisa perkara tahun lalu yang ditangani menurun dan juga terjadi penurunan Perkara Masuk baik perkara pidana maupun perkara perdata.



Gambar 3.2 Beban Penanganan Perkara Tahun 2018 – 2023 Baik Perkara Perdata, Pidana Maupun Total Perkara.

Tabel 3.7 : Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023 Berdasarkan Rasio Produktivitas

Jenis Perkara	Rasio Produktivitas 2023 (%)	Rasio Produktivitas 2022 (%)	Rasio Produktivitas 2021 (%)	Rasio Produktivitas 2020 (%)	Rasio Produktivitas 2019 (%)
Pidana	89,00	95,55	91,15	91,59	97,26
Jumlah	89,00	95,55	91,15	91,59	97,26

Sedangkan jika dilihat dari Rasio Produktivitas Penanganan Perkara menunjukkan bahwa Rasio penanganan Perkara trend nya tahun 2023 menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu mengalami penurunan 6,55 %, hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 Rasio Produktivitas adalah 89,00% sedangkan tahun sebelumnya 95,55, sedangkan tahun sebelumnya trendnya lebih kecil dibanding tahun 2022 dan 2023.



Gambar 3.3 : Rasio Produktivitas Penangan Perkara Tahun 2018 – 2023 Baik Perkara Perdata, Pidana Maupun Total Perkara.

Tabel 3.8 : Tabel Rata Rata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023

Lamanya Pemeriksaan (dalam bulan)	

No	Jenis Perkara	1 s.d 3	3 s.d 5	5 s.d 12	12 s.d 24	>24	Jumlah
1	Pidana	89	0	0	0	0	89
Jumlah		89	0	0	0	0	89
%		100 %	0 %	0	0	0	100 %

Keberhasilan capaian di dalam memutus perkara disebabkan oleh penanganan perkara mengikuti dan berpedoman kepada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014 (SEMA Nomor 2 Tahun 2014) 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 5 Bulan sejak didaftarkannya Perkara.

Sehingga dari 89 Perkara Pidana yang Putus tahun 2023, semua Perkara diselesaikan 100% tepat waktu atau kurang dari 5 Bulan. Sedangkan Target yang ingin dicapai adalah 98 %, sehingga Realisasi **Indikator Kinerja 1. Persentase penyelesaian perkara Pidana tepat waktu** adalah **102,04%**

Indikator Kinerja 2. Persentase penyelesaian perkara Perdata tepat waktu

Indikator ini untuk mengukur waktu penyelesaian perkara khususnya perkara putus tepat waktu sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014 (SEMA Nomor 2 Tahun 2014) 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) Bulan. Perhitungan rerata waktu memutus adalah selisih antara tanggal Pendaftaran perkara hingga tanggal perkara diputus.

Tabel 3.9 : Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2023	2022	2021	2020	2019
Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	98 %	100 %	102,04	103,09	104,17	88,19	100

Perkara Perdata yang masuk pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau selama tahun 2023 berjumlah 30 Perkara, terdiri dari 20 Perkara Gugatan, 9 Perkara Permohonan dan 1

Perkara Gugatan Sederhana. Adapun Rincian Perkara yang masuk dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.10. Perkara Yang Masuk Selama Tahun 2023

No.	Nama	Perkara Masuk
1	Perdata Gugatan	20
2	Perdata Permohonan	9
3	Gugatan Sederhana	1
4	Konsinyasi	-
Jumlah Perkara Gugatan yang Masuk Selama tahun 2023		30

Sehingga dapat digambarkan sebaran perkara perdata masuk selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Gambar 3.4. Perkara Masuk Selama tahun 2023

Pada Tahun 2023 beban perkara Perdata Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebanyak 30 perkara berkurang 3,3 % jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 31 perkara. Pada Tahun 2023 Pengadilan Negeri Pulang Pisau berhasil memutus 29 perkara, sedangkan sisa perkara Tahun 2023 sebanyak 1 perkara berkurang.

Tabel 3.11 : Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023 Berdasarkan Rasio Produktivitas

Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa 2023	Rasio Produktivitas
Perdata	0	30	30	29	1	96,67 %

Jumlah	0	30	30	29	1	96,67 %
--------	---	----	----	----	---	---------

Sehingga Rasio Penanganan Perkara atau Rasio Produktivitas memutus Perkara adalah 96,67% pada tahun 2023 atau turun 0,1 % dari 96,77% pada tahun 2022.

Tabel 3.12. Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023 Berdasarkan Beban Perkara

Jenis Perkara	Beban 2023	Beban 2022	Beban 2021	Beban 2020	Beban 2019
Perdata	30	31	51	42	29
Jumlah	30	31	51	42	29

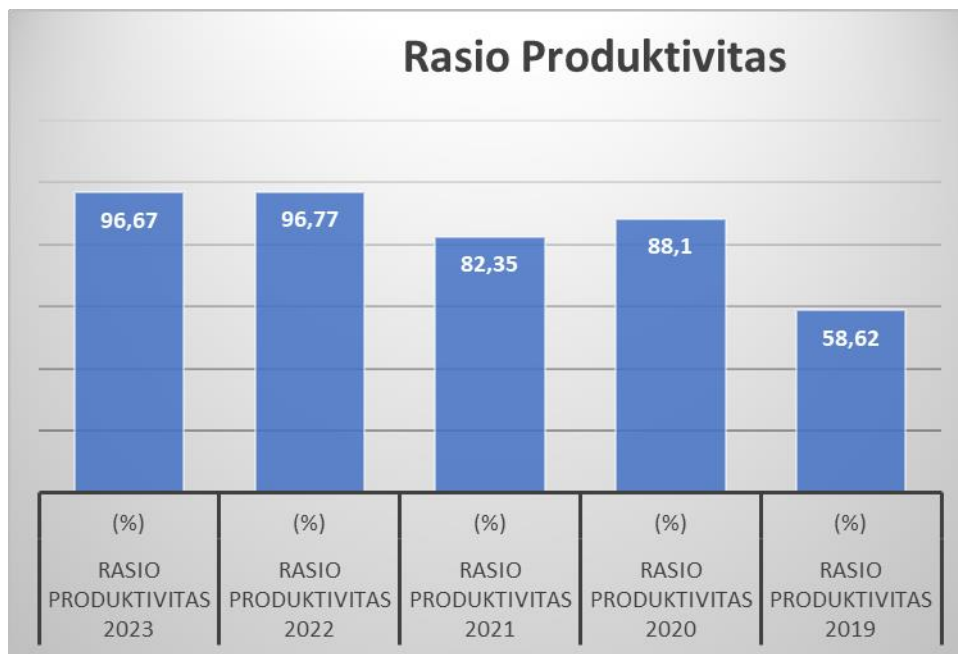
Beban Perkara yang ditangani oleh Pengadilan negeri Pulang Pisau trendnya menurun dimana beban Perkara tahun 2023 berjumlah 30 perkara, sedangkan tahun sebelumnya 31 Perkara tahun 2022 cenderung lebih rendah namun agak tinggi di tahun tahun sebelumnya yaitu 51 Perkara tahun 2021, 42 Perkara tahun 2020 dan 29 perkara tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa sisa perkara tahun lalu yang ditangani menurun dan juga terjadi penurunan Perkara Masuk baik perkara pidana maupun perkara perdata.



Tabel 3.13 : Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023 Berdasarkan Rasio Produktivitas

Jenis Perkara	Rasio Produktivitas 2023 (%)	Rasio Produktivitas 2022 (%)	Rasio Produktivitas 2021 (%)	Rasio Produktivitas 2020 (%)	Rasio Produktivitas 2019 (%)
Perdata	96,67	96,77	82,35	88,10	58,62
Jumlah	96,67	96,77	82,35	88,10	58,62

Sedangkan jika dilihat dari rasio Produktivitas Penanganan Perkara menunjukkan bahwa Rasio penanganan Perkara trend nya tahun 2023 menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu mengalami penurunan 0,1%, hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 Rasio Produktivitas adalah 96,67% sedangkan tahun sebelumnya 96,77, sedangkan tahun sebelumnya trendnya lebih kecil dibanding tahun 2022 dan 2023.

**Gambar 3.6 : Rasio Produktivitas Penangan Perkara Tahun 2018 – 2023 Baik Perkara Perdata, Pidana Maupun Total Perkara.****Tabel 3.14 : Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023**

No	Jenis Perkara	Lamanya Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 s.d 3	3 s.d 5	5 s.d 12	12 s.d 24	>24	
1	Perdata	25	4	0	0	0	29

Jumlah	25	4	0	0	0	29
%	86,2 %	13,8 %	0	0	0	100 %

Keberhasilan capaian di dalam memutus perkara disebabkan oleh penanganan perkara mengikuti dan berpedoman kepada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014 (SEMA Nomor 2 Tahun 2014) 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 5 Bulan sejak didaftarkan Perkara.

Sehingga dari 29 Perkara yang Putus tahun 2023, semua Perkara diselesaikan 100% tepat waktu atau kurang dari 5 Bulan. Sedangkan Target yang ingin dicapai adalah 98 %, sehingga Realisasi **Indikator Kinerja 1. Persentase penyelesaian perkara Perdata tepat waktu** adalah **102,04%**

Indikator Kinerja 3. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat dengan metode pemulihan keadilan yang melibatkan secara aktif antara pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses pemidanaan.

Selama ini pelaksanaan *restorative justice* masih terbatas pada diversifikasi yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan keadilan *restoratif* dengan jumlah putusan pidana anak.

Tabel 3.15 : Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2023	2022	2021	2020	2019
Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0,10 %	0,00 %	-	-	-	-	-

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Jika tidak berhasil selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

Tabel 3.16. Perincian Perkara Pidana Anak Tahun 2023

No	Perkara	Jumlah
1.	Sisa 2022	0
2.	Masuk 2023	4
3.	Putus 2023	4
4.	Sisa 2023	0

Beban perkara pidana khusus anak Tahun 2023 sebanyak 4 perkara, jumlah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif sebanyak 0 perkara (tidak semua perkara pidana anak dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, tindak pidana yang dakwaannya 7 tahun ke atas dan perbuatan berulang-ulang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif). Realisasi persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan keadilan restoratif sebesar 0 % dengan capaian sebesar 0%.

Langkah ke depan pengukuran dari indikator kinerja ini tidak hanya menggunakan jumlah perkara pidana anak saja, melainkan juga perkara pidana ringan, pidana narkoba dan PBH (perempuan berhadapan dengan hukum) dengan menyesuaikan SK Dirjen Badilum terkait dengan perkara RJ.

Indikator Kinerja 4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan jumlah putusan perkara. Indikator ini untuk mengukur akseptabilitas putusan pengadilan yaitu penerimaan pihak berperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Tabel 3.17. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2023	2022	2021	2020	2019
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	84,00 %	84,75 %	100,89	122,13	126,24	128,04	103,33

Perkara dimohonkan Banding selama tahun 2023 berjumlah 18 perkara, yang terdiri dari 16 Perkara Pidana dan 2 Perkara Perdata. Adapun perkara yang dimohonkan Banding selama tahun 2023 dapat diuraikan pada tabel 2. Sebagai berikut:

Tabel 3.18 : Perkara Upaya Hukum Banding

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara
1	52/Pid.B/2022/PN Pps	Pencurian
2	53/Pid.Sus/2022/PN Pps	Narkotika
3	60/Pid.Sus/2022/PN Pps	Narkotika
4	2/Pid.B/2023/PN Pps	Penggelapan
5	3/Pid.Sus/2023/PN Pps	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam
6	4/Pdt.G/2023/PN Pps	Perbuatan Melawan Hukum
7	15/Pid.Sus/2023/PN Pps	Narkotika
8	8/Pdt.G/2023/PN Pps	Perbuatan Melawan Hukum
9	30/Pid.B/LH/2023/PN Pps	Penebangan Kayu
10	31/Pid.Sus/2023/PN Pps	Narkotika
11	33/Pid.Sus/2023/PN Pps	Perlindungan Anak
12	35/Pid.Sus/2023/PN Pps	Informasi dan Transaksi Elektronik
13	40/Pid.B/2023/PN Pps	Pencurian
14	54/Pid.Sus/2023/PN Pps	Narkotika
15	55/Pid.Sus/2023/PN Pps	Narkotika

16	57/Pid.Sus/2023/PN Pps	Narkotika
17	59/Pid.Sus/2023/PN Pps	Narkotika
18	68/Pid.B/2023/PN Pps	Pencurian

Sehingga dapat digambarkan Permohonan banding selama tahun 2023 sebagaimana pada gambar berikut.



Gambar 3.7. Permohonan Banding Selama tahun 2023

Jumlah perkara yang diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2023 sebanyak 118 perkara, yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 18 perkara dan yang tidak mengajukan banding sebanyak 100 perkara (84,75 %). Target yang ditetapkan sebesar 84 % sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100,89%.

Tabel 3.19
Keadaan Perkara pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023

Keadaan Perkara	Pidana	Perdata	Jumlah
Jumlah Perkara yang diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama	89	29	118
Jumlah Perkara yang diajukan Upaya Hukum Banding	16	2	18
Jumlah Perkara yang tidak diajukan Upaya Hukum Banding	73	27	100

Realisasi (%)	82,02	93,10	84,75
---------------	-------	-------	-------

Indikator Kinerja 5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dengan jumlah putusan perkara. Indikator ini untuk mengukur akseptabilitas putusan pengadilan yaitu penerimaan pihak berperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Tabel 3.20. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2023	2022	2021	2020	2019
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90,00 %	94,07 %	104,52	114,59	119,82	119,44	122,64

Perkara dimohonkan Kasasi selama tahun 2023 berjumlah 7 perkara, yang terdiri dari 7 Perkara Pidana dan 0 Perkara Perdata. Adapun perkara yang dimohonkan Kasasi selama tahun 2023 dapat diuraikan pada tabel 3. Sebagai berikut:

Tabel 3.21 Perkara Kasasi Selama Tahun 2023

Nomor Perkara PN	Jenis Perkara	Tanggal Permohonan Kasasi
53/Pid.Sus/2022/PN Pps	Narkotika	08 Februari 2023
60/Pid.Sus/2022/PN Pps	Narkotika	14 Februari 2023
30/Pid.B/LH/2023/PN Pps	Penebangan Kayu	16 Agustus 2023
31/Pid.Sus/2023/PN Pps	Narkotika	20 September 2023
40/Pid.B/2023/PN Pps	Pencurian	18 Oktober 2023
55/Pid.Sus/2023/PN Pps	Narkotika	15 Nopember 2023
54/Pid.Sus/2023/PN Pps	Narkotika	27 Desember 2023

Sehingga dapat digambarkan Permohonan Kasasi selama tahun 2023 sebagaimana pada gambar berikut.



Gambar 3.8. Permohonan Kasasi Selama tahun 2023

Jumlah perkara yang diputus pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023 sebanyak 118 perkara, yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 7 perkara dan yang tidak mengajukan Kasasi sebanyak 111 perkara (94,07 %). Target yang ditetapkan sebesar 90 % sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 104,52 %.

Tabel 3.22 : Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Kasasi Tahun 2023

Keadaan Perkara	Pidana	Perdata	Jumlah
Jumlah Perkara yang diputus pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau	89	29	118
Jumlah Perkara yang diajukan Upaya Hukum Kasasi	7	0	7
Jumlah Perkara yang tidak diajukan Upaya Hukum Kasasi	82	29	111
Realisasi (%)	92,13 %	100,00 %	94,07 %

Indikator Kinerja 6. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi adalah perbandingan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi dengan jumlah perkara pidana anak.

Tabel 3.23 : Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2023	2022	2021	2020	2019
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0,10 %	0,00 %	-	-	-	-	-

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

Tabel 3.24 : Jumlah Perkara Pidana Anak melalui Diversi Tahun 2023

Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Diversi Berhasil	Diversi Tidak Berhasil	Diversi dalam Proses
Peradilan Umum	4	0	0	0	0

Beban perkara pidana anak Tahun 2023 sebanyak 4 perkara, jumlah perkara yang diselesaikan dengan diversi sebanyak 0 perkara (tidak semua perkara pidana anak dapat didiversi, tindak pidana yang dakwaannya 7 tahun ke atas dan perbuatan berulang-ulang tidak dapat didiversi). Realisasi persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi sebesar 0 % dengan capaian sebesar 0 %.

Kegagalan dalam indikator persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi disebabkan oleh:

- a. Sedikitnya Perkara Pidana anak di Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2023 yang hanya 4 perkara
- b. Tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak dalam musyawarah yang disebabkan oleh egonya salah satu pihak.
- c. Adanya penegak hukum yang ingin menghendaki permasalahan ini dilanjutkan ke pengadilan.
- d. Kurangnya sosialisasi terhadap aparaturnya penegak hukum.
- e. Tidak semua perkara anak dapat dilakukan DIVERSI (Pengulangan dan Tindak Pidana dengan ancaman lebih dari 7 Tahun)

Hal yang harus dilakukan kedepan adalah :

- a. Melakukan sosialisasi kepada APGAKUM (Aparatur Penegak Hukum) tentang penanganan diversi pada kasus pidana anak.
- b. Perlu kebijakan peninjauan kembali penetapan target kinerja.

Indikator Kinerja 7 Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan. Pengukuran Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan masih menggunakan Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, penggunaan pengukuran dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik masih dalam tahap sosialisasi.

Tabel 3.25 : Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2023	2022	2021	2020	2019
Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,7	3,87	104,59	102,35	122,51	118,84	111,41

Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat meliputi:

1. Persyaratan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu pelayanan
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Maklumat Pelayanan
Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tatacara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Hasil surveinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.26 : Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan Umum Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	3,7	3,87	104,59

Rasio Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar 3,7 melalui hasil survei yang dilakukan. Rasio Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah nilai rata-rata hasil survey dari IKM pada seluruh pengadilan negeri di masing-masing wilayah hukum pengadilan tinggi.

Tabel 3.27. Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Triwulan I 2023

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Kualitas
1	Persyaratan	3,833	Sangat Baik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,700	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,533	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	3,667	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,833	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,700	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,867	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,767	Sangat Baik
9	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	3,900	Sangat Baik
	Rata-Rata Hasil Survey	3,756	Sangat Baik

Tabel 3.28. Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Triwulan II 2023

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Kualitas
1	Persyaratan	3,757	Sangat Baik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,676	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,676	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	3,676	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,730	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,757	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,730	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,730	Sangat Baik
9	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	4,000	Sangat Baik
	Rata-Rata Hasil Survey	3,748	Sangat Baik

Tabel 3.29. Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Triwulan III 2023

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Kualitas
1	Persyaratan	3,781	Sangat Baik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,719	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,781	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	3,844	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,875	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,844	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,875	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,875	Sangat Baik
9	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	3,969	Sangat Baik
	Rata-Rata Hasil Survey	3,84	Sangat Baik

Tabel 3.30. Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Triwulan IV 2023

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Kualitas
1	Persyaratan	3,867	Sangat Baik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,867	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,867	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	3,900	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,900	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,867	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,867	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,667	Sangat Baik
9	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	4,000	Sangat Baik
	Rata-Rata Hasil Survey	3,867	Sangat Baik

Rata-rata Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil survei Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Tahun 2023 adalah 3,80 dengan capaian 102,70 %.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis I telah tercapai 110,54%. Beberapa Indikator memiliki realisasi yang melampaui target sehingga perlu dipertahankan kinerjanya dan

target perlu ditingkatkan.

SASARAN II. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara yang terdiri dari 2 (Dua) indikator kinerja yaitu:

Tabel 3.31 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97,00 %	100,00 %	103,09 %
	b. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97,00 %	100,00 %	103,09 %
	c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	0.1 %	0 %	-
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II				103,09 %

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran strategis II Tahun 2023:

Indikator Kinerja 1. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan Pidana yang dikirim ke para Pihak tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus.

Salinan putusan Pidana yang diterima Para Pihak disebut tepat waktu jika salinan putusan dikirim ke para pihak sesuai jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan bahwa Salinan Putusan untuk para pihak harus sudah tersedia 14 hari sejak pembacaan Putusan baik untuk Perkara Perdata maupun Perkara Pidana. Kemudian ditegaskan pula dengan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021, bahwa Minutasi Putusan Perdata diselesaikan maksimal 14 Hari dari proses melengkapi berkas perkara sampai dengan penjiwaan pada Kepaniteraan Muda Perdata. Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/ XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara yaitu 250 hari.

Tabel 3.32 : Persentase Salinan Putusan Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)				
			2023	2022	2021	2020	2019
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97,00	100,00	103,09	104,17	104,17	102,77	86,82

Jumlah perkara yang telah diminutasi pada Tahun 2023 sebanyak 118 perkara. Sehingga target pencapaian 103,09%. Persentase Capaian yang diminutasi mengalami penurunan 1,08 % jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang persentasenya 104,17%.

Tabel 3.33 : Waktu Penyampaian Salinan Putusan Tahun 2023

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutasi (Dalam hari)		Jumlah
		<14 Hari	> 14 Hari	
1	Pidana	89	0	89
Jumlah		89	0	89
%		100 %	0 %	100 %

Perkara yang diminutasi pada Tahun 2023 sebanyak 89 sedangkan yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara sebanyak 89 perkara (100 %).

Indikator Kinerja 2. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan yang dikirim ke para Pihak tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus.

Salinan putusan Perdata yang diterima Para Pihak disebut tepat waktu jika salinan putusan Perdata dikirim ke para pihak sesuai jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan bahwa Salinan Putusan untuk para pihak harus sudah tersedia 14 hari sejak pembacaan Putusan baik untuk Perkara Perdata maupun Perkara Pidana. Kemudian ditegaskan pula dengan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021, bahwa Minutasi Putusan Perdata diselesaikan maksimal 14 Hari dari proses melengkapi berkas perkara sampai dengan penjilidan pada Kepaniteraan Muda Perdata. Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/ XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara yaitu 250 hari.

Tabel 3.34 : Persentase Salinan Putusan Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)				
			2023	2022	2021	2020	2019
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97,00	100,00	103,09	104,17	104,17	102,77	86,82

Jumlah perkara Perdata yang telah diminutasi pada Tahun 2023 sebanyak 89 perkara. Sehingga target pencapaian 103,09%. Persentase Capaian yang diminutasi mengalami penurunan 1,08 % jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang persentasenya 104,17%.

Tabel 3.35 : Waktu Penyampaian Salinan Putusan Perdata Tahun 2023

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutasi (Dalam hari)		Jumlah
		<14 Hari	> 14 Hari	
1	Perdata	29	0	29
Jumlah		29	0	29
%		100 %	0 %	100 %

Perkara yang diminutasi pada Tahun 2023 sebanyak 29 sedangkan yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara sebanyak 29 perkara (100 %).

Indikator Kinerja 3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan antara

jumlah perkara yang dilakukan mediasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi, pada tanggal 17 Juni 2017 KMA mengeluarkan SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2017 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. SK KMA ini mengandung berbagai instrumen dan petunjuk teknis yang detail mengenai pelaksanaan mediasi. Diharapkan dengan telah terbitnya aturan-aturan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 3.36 : Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui mediasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2023	2022	2021	2020	2019
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	0,1%	0,0%	0	370,33	119,00	270,50	294,12

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada Tahun 2023 sebanyak 6 perkara. Dari jumlah tersebut yang berhasil dimediasi sebanyak 2 perkara, sedangkan jumlah perkara yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 4 perkara sehingga realisasinya sebesar 33,33 % dan capaiannya 370,13%%, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.37 : Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Tahun 2023

No	Peradilan	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi			
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	Dalam Proses
1	Umum	6	2	4	0	0
Jumlah		6	2	4	0	0
Persentase (%)			33,33%	66,67%	0	0

Keberhasilan dalam pencapaian mediasi disebabkan karena para pihak memiliki itikad

yang baik dan penuh kesadaran untuk tidak melanjutkan penyelesaian perkara melalui pengadilan. Sedangkan ketidakberhasilan dalam upaya mediasi dikarenakan pihak yang berperkara tidak memiliki itikad yang baik dalam menyelesaikan persoalannya sehingga lebih memilih diselesaikan melalui pengadilan, disamping itu ada beberapa mediator yang belum memiliki sertifikat keahlian sehingga tidak mencapai sasaran.

Upaya yang harus dilakukan kedepan adalah dengan meningkatkan peran mediator dengan keahlian yang memadai.

SASARAN III. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, terdiri dari 3 (Tiga) indikator sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.38 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0.1 %	-	-
	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0.1 %	-	-
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III				100,00 %

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

Indikator Kinerja 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang masuk.

Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Tabel 3.39 : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan Tahun 2019 – 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2023	2022	2021	2020	2019
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0,1%	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan. Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan.

Tabel 3.40 : Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2019 - 2023

Nama Pengadilan	Tahun	Jumlah Layanan Perkara
Pengadilan Negeri Pulang Pisau	2019	-
	2020	-
	2021	-
	2022	-
	2023	-

Selama tahun 2023 tidak ada Perkara prodeo yang diterima Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Di dalam Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, didalam pasal 13 ayat 4 disebutkan bahwa dimungkinkan sisa anggaran untuk setiap perkara dapat digunakan untuk perkara berikutnya yang menyebabkan target yang sudah ditentukan dapat bertambah

dengan ketentuan tidak melewati jumlah anggaran yang tersedia pada anggaran satuan pengadilan;

Mekanisme prodeo dilakukan dalam dua tahapan, tahap pertama melalui mekanisme prodeo yang ditanggung oleh anggaran Negara (DIPA) dan tahap kedua melalui mekanisme prodeo murni (tanpa biaya), hal ini dilakukan dalam rangka meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan.

Mekanisme permohonan pembebasan biaya perkara sepanjang memenuhi persyaratan formil tidak akan mendapat penolakan oleh pengadilan bahkan dalam hal anggaran DIPA habis, maka pembebasan biaya perkara dilakukan secara cuma-cuma (Prodeo Murni).

Indikator Kinerja 2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung. Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

Tabel 3.41 : Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2023	2022	2021	2020	2019
Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0,1 %	-	-	-	-	-	-

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan khususnya untuk jenis perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain.

Tabel 3.42 : Data Layanan Sidang di Luar Gedung Tahun 2019-2023

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Lokasi Sidang	Jumlah Perkara Diselesaikan
Peradilan Umum	2019	-	-
	2020	-	-
	2021	-	-
	2022	-	-
	2023	-	-

Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan pada Tahun 2023 Pengadilan Negeri Pulang Pisau adalah 0, hal ini disebabkan tidak adanya Pagu Anggaran di dalam DIPA Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2023.

Indikator Kinerja 3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).

Pelayanan Posbakum diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, pada Pasal 35 Ayat 2 disebutkan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan, setiap Pengadilan dapat menggunakan anggaran Posbakum Pengadilan selama tidak kurang dari target waktu layanan dan tidak melewati jumlah keseluruhan dari anggaran yang tersedia pada Anggaran Satuan Pengadilan dan ketentuan-ketentuannya atau dengan kata lain sisa anggaran posbakum pengadilan dapat digunakan untuk layanan berikutnya pada tahun berjalan.

Tabel 3.43 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2023	2022	2021	2020	2019

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100	100	100	100	100
--	------	------	-----	-----	-----	-----	-----

Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Pemberian layanan melalui Posbakum Pengadilan ini mengalami dinamika peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun.

Tabel 3.44 : Data Layanan Posbakum Tahun 2019- 2023

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Layanan (Orang)
Pengadilan Negeri Pulang Pisau	2019	-
	2020	6
	2021	5
	2022	2
	2023	79

Semua lingkungan peradilan yang menyelenggarakan pos bantuan hukum telah berhasil memberikan bantuan layanan hukum kepada seluruh pencari keadilan golongan tertentu sehingga capaian dari indikator ini 100%.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis III telah tercapai 100,00 %. Indikator pada sasaran strategis ini sama dengan indikator tahun sebelumnya yaitu 100%.

SASARAN IV. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Tabel 3.45 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	95%	100%	105,26%

Indikator Kinerja : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dengan jumlah putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Tabel 3.46 : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2023	2021	2020	2019	2018
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	95,00%	100,00%	105,26	111,11	111,11	111,41	111,41

Jumlah perkara perdata yang putus selama tahun 2023 berjumlah 29 Perkara, sementara Perkara yang mengajukan Upaya Hukum berjumlah 2 Perkara dan 27 Perkara Perdata berkekuatan hukum tetap, dari jumlah tersebut yang tidak mengajukan permohonan eksekusi sebanyak 27 perkara (100,00%) sehingga capaian pada Tahun 2023 sebesar 105,26 %.

Tabel 3.47 : Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Perkara yang BHT	Perkara yang Ditindaklanjuti	Perkara diajukan Permohonan Eksekusi
Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti	27	0	0
Jumlah	27	0	0

Pelaksanaan putusan perkara perdata dilakukan oleh para pihak secara sukarela. Apabila para pihak tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi.

Sasaran Strategis IV hanya memiliki 1 (satu) indikator saja yaitu Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan capaian yang melampaui

target yaitu sebesar 105,26 %.

SASARAN V. TERWUJUDNYA DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau salah satunya adalah dengan ketersediaan Anggaran untuk mendukung Pelaksanaan Tugas sehari-hari Pengadilan. Untuk memenuhi itu, Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah menyusun 2 Program Anggaran untuk mendukung hal itu, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program ini kemudian di uraikan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Anggaran Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Program Dukungan Manajemen kemudian menjadi DIPA Badan Urusan Administrasi dengan Kode Satuan Kerja 401920, sedangkan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum kemudian menjadi DIPA Badan Peradilan Umum dengan Kode Satuan Kerja 402026.

Sasaran Strategis Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Sehari-hari Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Keberhasilan mengukur sasaran strategis ini, diukur berdasarkan indikator Persentase realisasi anggaran.

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan Realisasi Anggaran baik Realisasi Anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi maupun DIPA Badan Peradilan Umum.

Tabel 3.48 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran	97,00 %	99,02 %	102,08%

Adapun Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2023 dapat diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.49 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2023

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	<i>Badan Urusan Administrasi</i>	13,225,492,000	12,989,143,409	98,21%
	Program Dukungan Manajemen	13,225,492,000	12,989,143,409	98,21%
2	<i>Ditjen Badan Peradilan Umum</i>	93,000,000	92,833,000	99,82%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	93,000,000	92,833,000	99,82%
TOTAL		13.318.492.000	13.081.976.409	

Realisasi Anggaran tahun 2023 untuk DIPA BUA adalah 12,989,143,409 dari Pagu 13,225,492,000 atau 98,21%, sedangkan DIPA BADILUM dengan realisasi 92,833,000 dari Pagu 93,000,000 atau 99,82%, sehingga rerata Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Pulang Pisau adalah 99,02%. Sedangkan target yang ingin dicapai adalah 97%, sehingga capaian Indikator Realisasi Anggaran 102,077 %.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Capaian Kinerja Nasional tahun 2023 adalah Terus Bertumbuh dan Melaju. Salah satu Upaya Mahkamah Agung RI khususnya Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam upaya untuk Mengikuti Capaian Kinerja Nasional adalah dengan bertransformasi dalam Pengembangan Dunia Digital dalam hal Pelayanan Kepada Masyarakat Pencari Keadilan dan Stakeholder seperti terobosan E-Court, E-Berpadu, E-PTSP, ERATERANG dan Transformasi Digital Lainnya.

4. Analisa Penyebab Keberhasilan atau kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan Pencapaian Kinerja tidak terlepas dari beberapa faktor berikut ini:

- Terdapatnya Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap Indikator-indikator Kinerja
- Terdapatnya Aplikasi E-Kinerja yang bisa dilakukan untuk memonitor secara berkala Capaian Indikator secara realtime
- Penyusunan Court Calender sangat membantu untuk keberhasilan Indikator perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- Adanya Aplikasi Internal seperti MIS memudahkan untuk memonitor Indikator

Penyampaian Salinan Putusan agar Pengiriman Tepat Waktu

- Rapat secara berkala dalam Penyusunan Revisi POK dan Revisi Anggaran menyebabkan Indikator Realisasi Anggaran sesuai target.
- Adanya Upaya Tindak Lanjut terhadap Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja dengan Melakukan Revisi terhadap Perjanjian Kinerja.

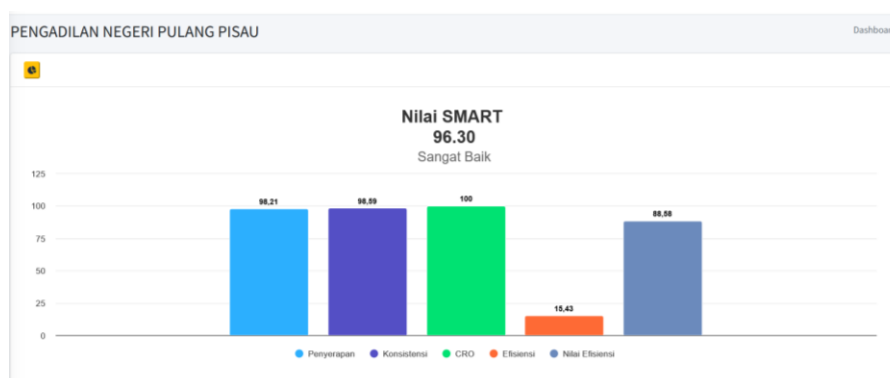
Kegagalan dalam Pencapaian Kinerja disebabkan sebagai berikut:

- Mediasi melibatkan para Pihak yang berperkara, sehingga hasil Pencapaian tergantung dari berhasil atau tidaknya Perkara yang di mediasi. Selama tahun 2023 Mediasi yang dilaksanakan mengalami kegagalan, sehingga menyebabkan indikator ini tidak dapat dicapai, sehingga terdapat revisi pada Indikator ini.

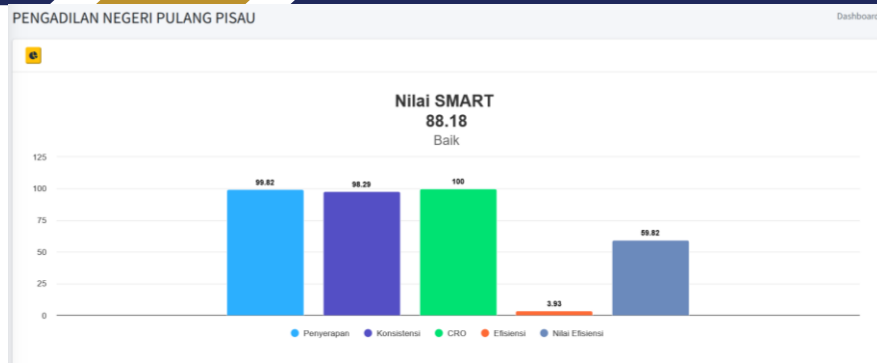
5. Capaian Kinerja Lainnya

Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam Pelaksanaan Anggaran, mendapatkan Nilai Capaian Kinerja yang tercermin di dalam Indikator Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan dengan Nilai 93,5 untuk DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) 401920, dan 91,73 untuk DIPA Badan Peradilan Umum.

Sedangkan Indikator SMART Pengadilan Negeri Pulang Pisau mendapatkan Nilai 96,3 Untuk DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) 401920 dan 88,18 untuk DIPA Badan Peradilan Umum.



Gambar 3.9. Nilai SMART DIPA BUA



Gambar 3.10. Nilai SMART DIPA BADILUM

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2023 Pengadilan Negeri Pulang Pisau mendapatkan pagu anggaran sejumlah Rp. 13.318.492.000,- (Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Delapan belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), adapun realisasinya sejumlah Rp. 13.081.976.409,- (Tiga Belas Milyar Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat ratus Sembilan Rupiah) dengan prosentase rerata (99,02%), dengan demikian sisa anggaran Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejumlah Rp. 236.515.591,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) rincian laporan realisasi penyerapan anggaran Tahun 2023, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.50 : Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	<i>Badan Urusan Administrasi</i>	13,225,492,000	12,989,143,409	98,21%
	Program Dukungan Manajemen	13,225,492,000	12,989,143,409	98,21%
2	<i>Ditjen Badan Peradilan Umum</i>	93,000,000	92,833,000	99,82%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	93,000,000	92,833,000	99,82%
	Jumlah	13.318.492.000	13.081.976.409	

1. REALISASI PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Program Dukungan Manajemen tahun 2023 mendapatkan Alokasi Pagu Rp. 13,225,492,000 yang kemudian terealisasi Rp. 12,989,143,409 atau 98,21%. Adapun Realisasi Program ini berdasarkan Jenis Belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.51 : Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023

Per Jenis Belanja DIPA BUA (401920)

NO	UNIT ESELON I	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
1	BELANJA PEGAWAI	2,896,640,000	2,670,548,728	92,19	226,091,272
2	BELANJA BARANG	1,306,280,000	1,305,942,587	99,97	337,413
3	BELANJA MODAL	9,022,572,000	9,012,652,094	99,89	9,919,906
	JUMLAH	13,225,492,000	12,989,143,409	98,21	236,348,591

Program Dukungan Manajemen terdiri dari 2 Kegiatan yaitu kegiatan yaitu Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dengan Pagu 4,202,920,000 dan Realisasi 3,976,676,519 atau 94.62 % yang terdiri dari:

1. Layanan Umum yaitu Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah dengan pagu 3,948,000 dan terealisasi sebesar 3,948,000 atau 100% dengan kegiatan pembelian Kursi Ruang Mediasi.
2. Layanan Perkantoran yang terdiri :
 - a. Gaji dan Tunjangan dengan pagu 2,896,640,000 dan Realisasi 2,670,733,932 atau 92.20 %
 - b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Dengan Pagu 1,302,332,000 dan terealisasi 1,267,071,587 (99.97 %)

Kegiatan lainnya adalah Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dengan pagu 9,022,572,000 dan realisasi 9,022,452,094 atau terealisasi 100 %

Adapun Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Sedangkan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana terdiri dari Belanja Modal yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.52 : Laporan Realisasi Penyerapan Belanja Modal Tahun 2023

NO	URAIAN	JENIS PENGADAAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi - Pengadaan 9 Unit Printer - Pengadaan 3 Unit Laptop - Pengadaan 1 Unit Scanner	Pengadaan Langsung	80,660,000	80,660,000	100,00 %

2	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		E Purchasing dan Pengadaan Lansung	568,912,000	568,812,000	99,98%
	- Mic Condenser Microphone	1,00 Unit				
	- Soundcard	1,00 Unit				
	- Rollator Walker Beroda	1,00 Unit				
	- Ultra-compact Wireless Microphone System	1,00 Set				
	- Mesin Absensi	1,00 Unit				
	- Directional Condenser Mic Microphone	1,00 Unit				
	- Kursi Roda	1,00 Unit				
	- Meja Tamu Terbuka	1,00 Unit				
	- Sofa Ruang Rapat Ketua	2,00 Set				
	- Pengadaan Drone	1,00 Set				
	- Sofa Tamu Terbuka	1,00 Unit				
	- Meja Tamu Pimpinan	2,00 Unit				
	- Buffet	1,00 Unit				
	- Meja Ruang Rapat Ketua	2,00 Unit				
	- Scanner	2,00 Unit				
	- Lemari Audio Sidang	3,00 Unit				
	- Genset	1,00 Unit				
	- UPS Server	1,00 Unit				
	- Drone	1,00 Unit				
	- AC Standing	2,00 Unit				
	- TV Lobby Belakang	1,00 Unit				
	- Kursi Ruang Sidang Anak	3,00 Buah				
	- Podium	1,00 Unit				
	- Meja PP Ruang Sidang Anak	1,00 Unit				

	- Meja Diversi	1,00 Unit				
	- Meja Mesin Absensi	1,00 Unit				
3	Pembangunan /renovasi gedung dan bangunan - Pengadaan dan Pemasangan Vertikal Blind - Lanjutan Sarling Kantor - Finishing sarana lingkungan		Tender dan Seleksi	8,373,000,000	8,372,980,094	100 %

2. REALISASI PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum tahun 2023 mendapatkan Alokasi Pagu Rp. 93,000,000 yang kemudian terealisasi Rp. 92,833,000 atau 99,82%. Adapun Realisasi Program ini berdasarkan Jenis Belanja adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.53 : Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023
Per Jenis Belanja DIPA BADILUM (402026)**

NO	UNIT ESELON I	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	BELANJA PEGAWAI					
2	BELANJA BARANG	93,000,000	92,833,000	99.82%	167.000	0,18 %
3	BELANJA MODAL					
	JUMLAH					

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum terdiri dari 1 kegiatan yaitu : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan Pagu Anggaran 65,500,000. Kegiatan ini terdiri dari beberapa rincian, yaitu:

- c. Koordinasi Dukungan Penyelesaian Perkara Berupa Kimwasmat Pagu Anggaran 1,500,000 dan terealisasi 1,500,000 (100%)
- d. Percepatan Penyelesaian Perkara Pidana dengan Pagu Anggaran 40,000,000 dan terealisasi 39,392,900 atau 98,48 %
- e. Layanan Pos Bantuan Hukum dengan pagu Anggaran 24,000,000 dan terealisasi 24,000,000 atau 100%

Realisasi anggaran pada sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan:

- a. Penyelesaian Perkara Prodeo

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pembebasan biaya perkara (prodeo)

pada peradilan umum sebesar Rp. 0,- (NIHIL) untuk pembebasan biaya perkara dengan realisasi sebesar Rp. 0,- (NIHIL) ,- atau 0,00%.

b. Sidang di Luar Gedung Peradilan

Alokasi anggaran sidang di luar gedung pengadilan pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebesar Rp. 0,- (NIHIL) dengan jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 0 perkara, sedangkan realisasi anggaran untuk layanan sidang diluar gedung pengadilan sebesar Rp. 0,- (NIHIL),- atau 0,00 %.

c. Posbakum

Alokasi anggaran Posbakum pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) yang telah memberikan layanan hukum kepada masyarakat/pencari keadilan sebanyak 240 jam layanan, sedangkan realisasi anggarannya sebesar Rp. 24.000.000- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) atau 100,00%.

Sedangkan perbandingan capaian realisasi anggaran Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2019 – 2023 dapat tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.54 : Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2019- 2021

No	Tahun	DIPA	Pagu	Realisasi	%
1	2019	BUA	2,806,670,000	2,787,811,078	99.33
		BADILUM	63,700,000	63,414,950	99.55
2	2020	BUA	9,895,023,000	9,837,709,851	99.42
		BADILUM	68,550,000	61,266,000	89.37
3	2021	BUA	27,910,592,000	27,448,781,621	98.35
		BADILUM	78,945,000	77,099,300	97.66
4	2022	BUA	7,617,002,000	7,599,600,910	99.77
		BADILUM	65,500,000	64,892,900	99.07
4	2023	BUA	13,225,492,000	12,989,143,409	98,21
		BADILUM	93,000,000	92,833,000	99.82

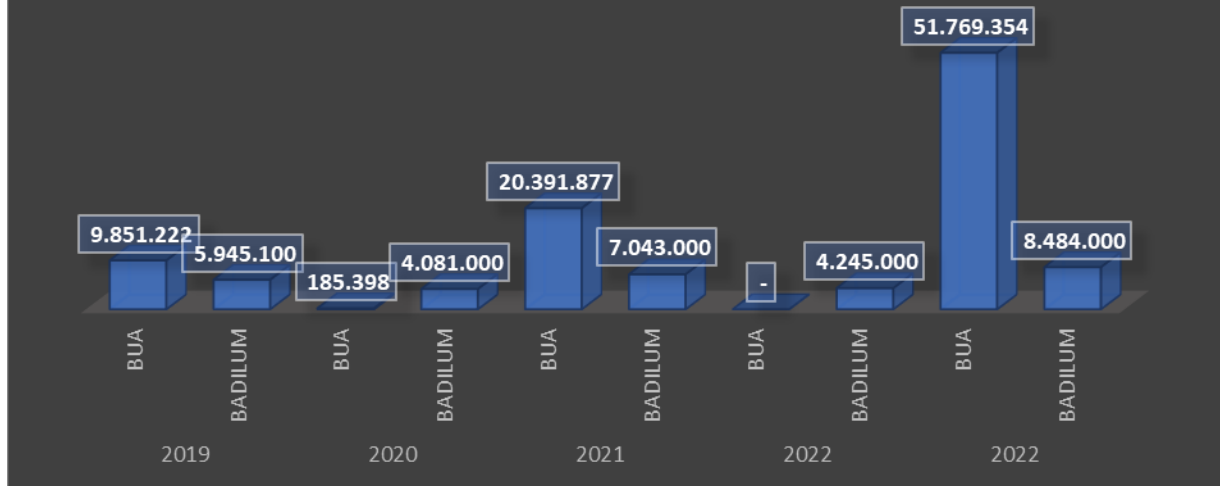
3. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Tahun Anggaran 2023 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah diterima dan disetorkan Pengadilan Negeri Pulang Pisau ke kas negara sebesar Rp. 60.253.354 yang terdiri atas pendapatan PNBP Fungsional (DIPA 03) sebesar Rp. 8,484,000. PNBP Fungsional (DIPA 03) berasal dari Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya (akun 425239) Sebesar Rp. 6,584,000, Pendapatan Ongkos Perkara (Akun 425233) Rp. 1,240,000, Pendapatan Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan (akun 425231) sebesar Rp. 650,000, dan Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan (akun 425231) sebesar Rp. 10,000. Sedangkan Pendapatan PNBP Umum (DIPA 01) berjumlah Rp. 51,769,354 merupakan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu akun 425913 yang merupakan Pengembalian hasil Audit BPK

Tabel 3.55 PNBP DIPA BUA dan BADILUM Tahun 2019-2023

No	Tahun	DIPA	Realisasi Pendapatan
1	2019	BUA	9,851,222
		BADILUM	5,945,100
2	2020	BUA	185,398
		BADILUM	4,081,000
3	2021	BUA	20,391,877
		BADILUM	7,043,000
4	2022	BUA	0
		BADILUM	4,245,000
5	2023	BUA	51,769,354
		BADILUM	8,484,000

REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2019 SD 2023

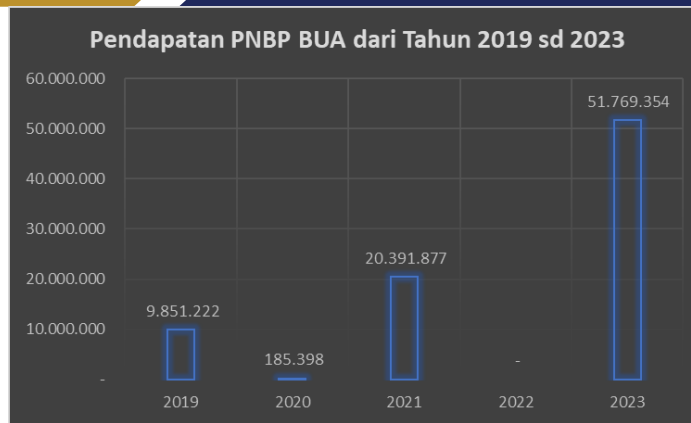


Gambar 3.11 : Grafik Realisasi PNBP Tahun 2019 - 2023

Realisasi PNBP Fungsional sebesar Rp. 2.130.000,00 berupa Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan, dan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya selama tahun 2021.

Tabel 3.56 : PNBP DIPA BUA Tahun 2019 - 2023
Pengadilan Negeri Pulang Pisau

No	Tahun	DIPA	425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	425991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Total
1	2019	BUA		1,110,000		8,472,200	269,022	9,851,222
2	2020	BUA		185,398				185,398
3	2021	BUA	20,391,877					20,391,877
4	2022	BUA						0
5	2023	BUA			51,769,354			51,769,354



Gambar 3.12. Grafik Realisasi PNBPA DIPA BUA Tahun 2019 – 2023

Tabel 3.57 : PNBPA DIPA BADILUM Tahun 2019 - 2023
Pengadilan Negeri Pulang Pisau

No	Tahun	DIPA	425239 Pendapatan Kejaksaaan dan Peradilan Lainnya	425233 Pendapatan Ongkos Perkara	425231 Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	425231 Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	Total
1	2019	BADILUM	4,960,100	970,000	15,000	5,945,100	5,945,100
2	2020	BADILUM	2,841,000	1,230,000	10,000	4,081,000	4,081,000
3	2021	BADILUM	5,533,000	1,510,000	0	7,043,000	7,043,000
4	2022	BADILUM	3,235,000	860,000	150,000	4,245,000	4,245,000
5	2023	BADILUM	6,584,000	1,240,000	650,000	10,000	8,484,000



Gambar 3.13. Grafik Realisasi PNBPA DIPA BADILUM Tahun 2019 – 2023 Berdasarkan Mata Anggaran

4. KEUANGAN PIHAK KETIGA (BIAYA PERKARA PERDATA)

Sebagai tindak lanjut dari Laporan Hasil Evaluasi implementasi SAKIP Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023 berikut kami sajikan Informasi Keuangan Perkara yang Dibiayai Oleh Para Pihak (Perkara Perdata).

Tabel 3.58. Laporan Keuangan Perkara Perdata Tahun 2023

No.	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1.	Saldo awal tahun 2023	3.219.000	
2.	Penerimaan tahun 2023	49.863.000	42.244.500
3.	Penggunaan biaya proses 2023	2.880.000	2.880.000
4.	Saldo akhir 2023	10.837.500	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan mengacu pada Reviu Rencana Strategis tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun pertama pelaksanaan RPJMN tahun 2020-2024. Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023 secara keseluruhan mengalami kenaikan dari 79,85% pada tahun 2021 menjadi 132,71% pada Tahun 2023, sedangkan capaian realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 99,76% atau Rp. 7,664,493,810,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Jutaempat ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah) dari pagu Tahun 2023 sejumlah Rp. 7,682,502,000,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Ribu Rupiah), dengan demikian sisa anggaran Mahkamah Agung sejumlah Rp. 17,401,090,- (Tujuh Belas Juta Empat ratus Satu Ribu Sembilan Puluh Rupiah) dengan persentase (0,24%).

Pengadilan Negeri Pulang Pisau terus berupaya meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan pembangunan aplikasi pemantauan e-Kinerja yang

tersebar di beberapa aplikasi Internal seperti One-Click dan SIPAPI dalam rangka pemantauan dan monitoring evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Pelaksanaan pemantauan dan monitoring evaluasi tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan manajemen kinerja dilaksanakan sehingga terwujudnya aparatur yang berkepribadian, bersih, kompeten dan berkinerja tinggi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan melayani masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Pengadilan Negeri Pulang Pisau, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga Pengadilan negeri Pulang Pisau semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang professional.



4 LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023





BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

REVISI KE-1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Pengadilan Negeri Pulang Pisau



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Jalan Trans Kalimantan KM. 86 Pulang Pisau 748111,
Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Telp. (0513) 2027516

**# bangga
melayani
bangsa**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU



REVISI KE-I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAN NUR PRATIWI, S.H., M.H.Li.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau
Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : SUJATMIKO, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pulang Pisau, 22 Desember 2023

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya

SUJATMIKO, S.H., M.H.

NIP. 19600812 198612 1 001

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau

DIAN NUR PRATIWI, S.H., M.H.Li.

NIP. 19810108 200312 2 001

REVISI KE-I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Pengadilan Negeri Pulang Pisau

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN III (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98 %
		b. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	98 %
		c. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0.1 %
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	84 %
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90 %
		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0.1 %
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3.7
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97 %
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97 %
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	0.1 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0.1 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0.1 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	95 %
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran	97 %

No	Program	Anggaran	
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp.	13.225.492.000,-
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	93.000.000,-
3.	Pengelolaan Keuangan Perkara Perdata yang Dibiayai oleh Para Pihak	Rp.	26.000.000,-

Pulang Pisau, 22 Desember 2023

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya



SUJATMIKO, S.H., M.H.

NIP. 19600812 198612 1 001

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau



DIAN NUR PRATIWI, S.H., M.H.Li.

NIP. 19810108 200312 2 001



Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Jl. Trans Kalimantan KM. 86, Gohong, Kabupaten Pulang Pisau



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

REVISI KE-1

RENCANA AKSI KINERJA

TAHUN 2023

PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Jalan Trans Kalimantan KM. 86 Pulang Pisau 748111,
Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Telp. (0513) 2027516

**# bangga
melayani
bangsa**

REVISI KE-1 RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023

Pengadilan Negeri Pulang Pisau



Pengadilan Negeri Pulang Pisau
Jl. Trans Kalimantan km. 86 Gohong
Pulang Pisau, Kalimantan Tengah
Telp. 0513 - 2027516 , Fax 0513-2027516
E-mail: pnpulangpisau@gmail.com

REVISI KE-I RENCANA AKSI KINERJA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2023

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023 ini dibuat berdasarkan Indikator Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam rangka mewujudkan visi yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Pulang Pisau Yang Agung.”

dengan misi :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau mencantumkan program, kegiatan, target, dan anggaran sebagaimana terlampir :

REVISI KE-I RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023

PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Sasaran Strategis “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel” dan “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98 %	98 %	98 %	98 %
		b. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	98 %	98 %	98 %	98 %
		c. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	84 %	84 %	84 %	84 %
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90 %	90 %	90 %	90 %
		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,7	3,7	3,7	3,7
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97 %	97 %	97 %	97 %
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97 %	97 %	97 %	97 %
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi				0,1%

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KE LUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV				
1	Pendaftaran Berkas Perkara	✓	✓	✓	✓	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama Dan Banding Yang Tepat Waktu	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Pidana Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Tengah	36.600.000
2	Penetapan Hari Sidang	✓	✓	✓	✓				2.500.000
3	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.	✓	✓	✓	✓				3.970.000
4	Pemeriksaan di sidang pengadilan	✓	✓	✓	✓				11.000.000
5	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	✓	✓	✓	✓				6.250.000
6	Minutasi/Upaya hukum	✓	✓	✓	✓				2.250.000
7	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	✓	✓	✓	✓				2.820.000
8	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	✓	✓	✓	✓				2.110.000

REVISI KE-I RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023

PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Sasaran Strategis “Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan”

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0.1 %	0.1 %	0.1 %	0.1 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0.1 %	0.1 %	0.1 %	0.1 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	100 %

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV				
1	Pos Bantuan Hukum	✓	✓	✓	✓	Layanan Pos Bantuan Hukum	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pos Bantuan Hukum	24.000.000
2	Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan	✓	✓	✓	✓	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan		Sidang di Luar Gedung Pengadilan / <i>zetting plaats</i>	0
3	Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara	✓	✓	✓	✓	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Prodeo		Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Kalimantan Tengah	0

REVISI KE-I RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
Sasaran Strategis “Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan”

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	95 %	95 %	95 %	95 %

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DA NA
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV				
1	Pelaksanaan Pembebasan Biaya Eksekusi	✓	✓	✓	✓	Perkara Peradilan Umum Yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Program Peningkatan Manajemen Peradilan mum	Eksekusi Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan Dimohonkan eksekusi	0

Ditetapkan di : Pulang Pisau.
 Pada Tanggal : 22 Desember 2023



KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,

DIAN NUR PRATIWI



Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Jl. Trans Kalimantan KM. 86, Gohong, Kabupaten Pulang Pisau



LAMPIRAN II

PENGUKURAN KINERJA BULANAN DAN TRIWULANAN TAHUN 2023



**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
BULAN: TRIWULAN I TA 2023**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Realisasi	Keterangan
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</p> <p><i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan I tahun 2023= 4 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan I tahun 2023= 17 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Triwulan I tahun 2023= 21 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus tepat Waktu Triwulan I tahun 2023= 21 Perkara</i> % Perkara Putus tepat Waktu Triwulan I tahun 2023= 100.00 %</p>	98 %	100 %	102.04 %	Diatas Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif</p> <p><i>Jumlah Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Triwulan I tahun 2023= 0 Perkara</i> Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Triwulan I tahun 2023= 0 %</p>	0.1 %	0	0 %	Sesuai Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p> <p><i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan I tahun 2023= 4 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan I tahun 2023= 17 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Triwulan I tahun 2023= 21 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara yang Banding = 2 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara yang Tidak melakukan Banding = 19 Perkara</i> % Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Triwulan I tahun 2023= 90,48%</p>	85 %	90,48%	106,45%	Diatas Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p> <p><i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan I tahun 2023= 4 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan I tahun 2023= 17 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Triwulan I tahun 2023= 21 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara yang Kasasi = 2 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara yang Tidak melakukan Kasasi = 19 Perkara</i> % Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Triwulan I tahun 2023= 90,48 %</p>	90 %	90,48 %	100,53%	Diatas Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang	<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p> <p><i>Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi yang didaftarkan Triwulan I tahun 2023= 0 Perkara</i></p>	0.1 %	0	0 %	Sesuai Target

	pasti, transparan dan akuntabel	<i>Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi yang diselesaikan 01 tahun 2023= 0 Perkara</i> Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Triwulan I tahun 2023= 0 Perkara				
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan <i>Nilai Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan 01 tahun 2023= 93,89%</i> Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Triwulan I tahun 2023= 93,89 %	95 %	93,89 %	98,83%	Dibawah Target
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan I tahun 2023= 4 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan I tahun 2023= 17 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Triwulan I tahun 2023= 21 Perkara</i> <i>Jumlah Salinan yang dikirimkan Tepat Waktu = 28 Perkara</i> % Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu Triwulan I tahun 2023= 100%	97 %	100 %	103,09%	Diatas Target
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi <i>Jumlah Perkara Mediasi Triwulan I tahun 2023= 0 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Mediasi Berhasil = 1 Perkara</i> % Persentase Perkara Mediasi Triwulan I tahun 2023= 0	9 %	0 %	0 %	Dibawah target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan <i>Jumlah Pendaftaran perkara prodeo Triwulan I tahun 2023= 0 Perkara</i> <i>Jumlah Pendaftaran perkara prodeo yang diselesaikan Triwulan I tahun 2023= 0 Perkara</i> Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Triwulan I tahun 2023= 0 %	0.1 %	0 %	0 %	Sesuai Target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan <i>Jumlah Register Perkara Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Triwulan I tahun 2023= 0 Perkara/b></i> <i>Jumlah Penyelesaian Perkara diluar gedung pengadilan Triwulan I tahun 2023= 0 Perkara</i> Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan Triwulan I tahun 2023= 0 %	0.1 %	0 %	0 %	Sesuai Target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) <i>Jumlah Register Layanan POSBAKUM Triwulan I tahun 2023=1 Layanan</i> <i>Jumlah Pengguna Layanan POSBAKUM terlayani Triwulan I tahun 2023= 4Layanan</i>	100 %	100 %	100 %	Sesuai Target

	Miskin dan Terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Triwulan I tahun 2023= 100 %				
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) Jumlah Perkara Perdata BHT Triwulan I tahun 2023= 3 Perkara Jumlah Permohonan Eksekusi Triwulan I tahun 2023= 0 Perkara Jumlah Permohonan Eksekusi 01 tahun 2023 yang ditindaklanjuti = 0 Perkara Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) Triwulan I tahun 2023= 100 %	95 %	100 %	105,26%	Diatas Target
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran Realisasi DIPA BUA (401920) Triwulan I tahun 2023= 13,69 % Realisasi DIPA BUA (402026) Triwulan I tahun 2023= 44,28 % Rata-rata Realisasi Triwulan I tahun 2023= 35,83 % % Persentase Realisasi Anggaran 01 tahun 2023= 35,83%	97 % Target Triwulan I : 24,25 %	35,83 %	147,75 %	Diatas Target

Mengetahui Ketua Tim Evaluator,

RUSPELIATI, S.H.

Sumber Data telah diverifikasi oleh

Data Kesekretariatan, Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan  Samsul Rizal, S.H.	Data Kepaniteraan, Panitera Muda Hukum  Lelo Herawan
--	---

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
 PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
 BULAN: TRIWULAN II TAHUN 2023

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Realisasi	Keterangan
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Semester I tahun 2023= 11 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Semester I tahun 2023= 36 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Semester I tahun 2023= 47 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus tepat Waktu Semester I tahun 2023= 47 Perkara</i> % Perkara Putus tepat Waktu Semester I tahun 2023= 100.00 %	98 %	100 %	102.04 %	Diatas Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif <i>Jumlah Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Semester I tahun 2023= 0 Perkara</i> Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Semester I tahun 2023= 0 %	0.1 %	0	0 %	Sesuai Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Semester I tahun 2023= 11 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Semester I tahun 2023= 36 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Semester I tahun 2023= 47 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara yang Banding = 4 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara yang Tidak melakukan Banding = 43 Perkara</i> % Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Semester I tahun 2023= 91,49%	85 %	91,49%	107,63%	Diatas Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Semester I tahun 2023= 11 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Semester I tahun 2023= 36 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Semester I tahun 2023= 47 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara yang Kasasi = 2 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara yang Tidak melakukan Kasasi = 45 Perkara</i> % Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Semester I tahun 2023= 95,74 %	90 %	95,74 %	106,38 %	Diatas Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi <i>Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi yang didaftarkan Semester I tahun 2023= 0 Perkara</i>	0.1 %	0	0 %	Sesuai Target

	pasti, transparan dan akuntabel	<i>Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi yang diselesaikan 01 tahun 2023= 0 Perkara</i> Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Semester I tahun 2023= 0 Perkara				
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan <i>Nilai Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan 01 tahun 2023= 93,69%</i> Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Semester I tahun 2023= 93,69 %	95 %	93,69 %	98,62%	Dibawah Target
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Semester I tahun 2023= 11 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Semester I tahun 2023= 36 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Semester I tahun 2023= 47 Perkara</i> <i>Jumlah Salinan yang dikirimkan Tepat Waktu = 47 Perkara</i> % Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu Semester I tahun 2023= 100%	97 %	100 %	103,09%	Diatas Target
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi <i>Jumlah Perkara Mediasi Semester I tahun 2023= 4 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Mediasi Berhasil = 0 Perkara</i> % Persentase Perkara Mediasi Semester I tahun 2023= 0	9 %	0 %	0 %	Dibawah target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan <i>Jumlah Pendaftaran perkara prodeo Semester I tahun 2023= 0 Perkara</i> <i>Jumlah Pendaftaran perkara prodeo yang diselesaikan Semester I tahun 2023= 0 Perkara</i> Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Semester I tahun 2023= 0 %	0.1 %	0 %	0 %	Sesuai Target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan <i>Jumlah Register Perkara Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Semester I tahun 2023= 0 Perkara/b></i> <i>Jumlah Penyelesaian Perkara diluar gedung pengadilan Semester I tahun 2023= 0 Perkara</i> Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan Semester I tahun 2023= 0 %	0.1 %	0 %	0 %	Sesuai Target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) <i>Jumlah Register Layanan POSBAKUM Semester I tahun 2023= 2 Layanan</i> <i>Jumlah Pengguna Layanan POSBAKUM terlayani Semester I tahun 2023= 2 Layanan</i>	100 %	100 %	100 %	Sesuai Target

		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Semester I tahun 2023= 100 %				
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) Jumlah Perkara Perdata BHT Semester I tahun 2023= 11 Perkara Jumlah Permohonan Eksekusi Semester I tahun 2023= 0 Perkara Jumlah Permohonan Eksekusi 01 tahun 2023 yang ditindaklanjuti = 0 Perkara Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) Semester I tahun 2023= 100 %	95 %	100 %	105,26%	Diatas Target
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran Realisasi DIPA BUA (401920) Semester I tahun 2023= 57,03 % Realisasi DIPA BADILUM (402026) Semester I tahun 20232022 = 61,26 % Rata-rata Realisasi Semester I tahun 2023= 59,145 % % Persentase Realisasi Anggaran 01 tahun 2023= 59,145 %	97 % Target Semester I : 50 %	59,145 %	118,29 %	Diatas Target

Mengetahui Ketua Tim Evaluator,

RUSPELIATI, S.H.

Sumber Data telah diverifikasi oleh

Data Kesekretariatan, Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan Samsul Rizal, S.H.	Data Kepaniteraan, Panitera Muda Hukum Lelo Herawan
---	---

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
BULAN: TRIWULAN III TA 2023**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Realisasi	Keterangan
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</p> <p><i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan III tahun 2023= 22 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan III tahun 2023= 64 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Triwulan III tahun 2023= 86 Perkara</i> Jumlah Perkara Putus tepat Waktu Triwulan III tahun 2023= 86 Perkara % Perkara Putus tepat Waktu Triwulan III tahun 2023= 100.00 %</p>	98 %	100 %	102.04 %	Diatas Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif</p> <p><i>Jumlah Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Triwulan III tahun 2023= 0 Perkara</i> Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Triwulan III tahun 2023= 0 %</p>	0.1 %	0	0 %	Sesuai Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p> <p>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan III tahun 2023= 22 Perkara Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan III tahun 2023= 64 Perkara Jumlah Perkara Putus Triwulan III tahun 2023= 86 Perkara Jumlah Perkara yang Banding = 11 Perkara Jumlah Perkara yang Tidak melakukan Banding = 75 Perkara % Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Triwulan III tahun 2023= 87,21 %</p>	85 %	87,21 %	102,6 %	Diatas Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p> <p>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan III tahun 2023= 22 Perkara Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan III tahun 2023= 64 Perkara Jumlah Perkara Putus Triwulan III tahun 2023= 86 Perkara Jumlah Perkara yang Kasasi = 4 Perkara Jumlah Perkara yang Tidak melakukan Kasasi = 82 Perkara % Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Triwulan III tahun 2023= 95,35 %</p>	90 %	95,35 %	105,94 %	Diatas Target

1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p> <p>Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi yang didaftarkan Triwulan III tahun 2023= 0 Perkara Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi yang diselesaikan 01 tahun 2023= 0 Perkara Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Triwulan III tahun 2023= 0 Perkara</p>	0.1 %	0	0 %	Sesuai Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p> <p>Nilai Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan III tahun 2023= 96,01% Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Triwulan III tahun 2023= 96,01 %</p>	95 %	96,01 %	101,06%	Diatas Target
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu</p> <p>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan III tahun 2023= 22 Perkara Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan III tahun 2023= 64 Perkara Jumlah Perkara Putus Triwulan III tahun 2023= 86 Perkara Jumlah Salinan yang dikirimkan Tepat Waktu = 86 Perkara % Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu Triwulan III tahun 2023= 100%</p>	97 %	100 %	103,09%	Diatas Target
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi</p> <p>Jumlah Perkara Mediasi Triwulan III tahun 2023= 4 Perkara Jumlah Perkara Mediasi Berhasil = 0 Perkara % Persentase Perkara Mediasi Triwulan III tahun 2023= 0</p>	9 %	0 %	0 %	Dibawah target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p> <p>Jumlah Pendaftaran perkara prodeo Triwulan III tahun 2023= 0 Perkara Jumlah Pendaftaran perkara prodeo yang diselesaikan Triwulan III tahun 2023= 0 Perkara Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Triwulan III tahun 2023= 0 %</p>	0.1 %	0 %	0 %	Sesuai Target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</p> <p>Jumlah Register Perkara Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Triwulan III tahun 2023= 0 Perkara/b> Jumlah Penyelesaian Perkara diluar gedung pengadilan Triwulan III tahun 2023= 0 Perkara Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan Triwulan III</p>	0.1 %	0 %	0 %	Sesuai Target

		tahun 2023= 0 %				
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)</p> <p>Jumlah Register Layanan POSBAKUM Triwulan III tahun 2023= 2 Layanan Jumlah Pengguna Layanan POSBAKUM terlayani Triwulan III tahun 2023= 2 Layanan Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Triwulan III tahun 2023= 100 %</p>	100 %	100 %	100 %	Sesuai Target
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	<p>Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)</p> <p>Jumlah Perkara Perdata BHT Triwulan III tahun 2023= 18 Perkara Jumlah Permohonan Eksekusi Triwulan III tahun 2023= 0 Perkara Jumlah Permohonan Eksekusi 01 tahun 2023 yang ditindaklanjuti = 0 Perkara Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) Triwulan III tahun 2023= 100 %</p>	95 %	100 %	105,26%	Diatas Target
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	<p>Persentase realisasi anggaran</p> <p>Realisasi DIPA BUA (401920) Triwulan III tahun 2023= 59,08 % Realisasi DIPA BADILUM (402026) Triwulan III tahun 20232022 = 80,35 % Rata-rata Realisasi Triwulan III tahun 2023= 59,145 % % Persentase Realisasi Anggaran 01 tahun 2023= 59,145 %</p>	97 % Target Triwulan III : 75 %	69,715 %	71,87 %	Dibawah Target

Mengetahui Ketua Tim Evaluator,

RUSPELIATI, S.H.

Sumber Data telah diverifikasi oleh

<p>Data Kesekretariatan, Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan</p> <p>Samsul Rizal, S.H.</p>	<p>Data Kepaniteraan, Panitera Muda Hukum</p> <p>Lelo Herawan</p>
--	--

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
BULAN: TRIWULAN IV TA 2023**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Realisasi	Keterangan
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan IV Tahun 2023= 7 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan IV Tahun 2023= 25 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Triwulan IV Tahun 2023= 32 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus tepat Waktu Triwulan IV Tahun 2023= 32 Perkara</i> % Perkara Putus tepat Waktu Triwulan IV Tahun 2023= 100.00 %	98 %	100 %	102.04 %	Diatas Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif <i>Jumlah Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Triwulan IV Tahun 2023= 0 Perkara</i> Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Triwulan IV Tahun 2023= 0 %	0.1 %	0	0 %	Sesuai Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan IV Tahun 2023=7 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan IV Tahun 2023= 25 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Triwulan IV Tahun 2023= 32 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara yang Banding = 7 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara yang Tidak melakukan Banding = 25 Perkara</i> % Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Triwulan IV Tahun 2023= 78,13 %	84 %	78,13%	93 %	Dibawah Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan IV Tahun 2023= 7 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan IV Tahun 2023= 25 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Triwulan IV Tahun 2023= 32 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara yang Kasasi = 3 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara yang Tidak melakukan Kasasi = 29 Perkara</i> % Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Triwulan IV Tahun 2023= 90,63 %	90 %	90,63 %	100,69 %	Diatas Target
1	Terwujudnya proses	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0.1 %	0	0 %	Sesuai Target

	peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<i>Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi yang didaftarkan Triwulan IV Tahun 2023= 0 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi yang diselesaikan 01 tahun 2023= 0 Perkara</i> Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Triwulan IV Tahun 2023= 0 Perkara				
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan <i>Nilai Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2023= 96,67 %</i> Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Triwulan IV Tahun 2023= 96,67 %	95 %	96,67 %	101,76 %	Diatas Target
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan IV Tahun 2023= 7 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan IV Tahun 2023= 25 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Triwulan IV Tahun 2023= 32 Perkara</i> <i>Jumlah Salinan yang dikirimkan Tepat Waktu = 32 Perkara</i> % Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu Triwulan IV Tahun 2023= 100%	97 %	100 %	103,09%	Diatas Target
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi <i>Jumlah Perkara Mediasi Triwulan IV Tahun 2023= 2 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Mediasi Berhasil = 0 Perkara</i> % Persentase Perkara Mediasi Triwulan IV Tahun 2023= 0	0.1 %	0 %	0 %	Dibawah target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan <i>Jumlah Pendaftaran perkara prodeo Triwulan IV Tahun 2023= 0 Perkara</i> <i>Jumlah Pendaftaran perkara prodeo yang diselesaikan Triwulan IV Tahun 2023= 0 Perkara</i> Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Triwulan IV Tahun 2023= 0 %	0.1 %	0 %	0 %	Sesuai Target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan <i>Jumlah Register Perkara Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Triwulan IV Tahun 2023= 0 Perkara</i> <i>Jumlah Penyelesaian Perkara diluar gedung pengadilan Triwulan IV Tahun 2023= 0 Perkara</i> Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan Triwulan IV Tahun 2023= 0 %	0.1 %	0 %	0 %	Sesuai Target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Jumlah Register Layanan POSBAKUM Triwulan IV Tahun 2023= 2 Layanan	100 %	100 %	100 %	Sesuai Target

	Miskin dan Terpinggirkan	Jumlah Pengguna Layanan POSBAKUM terlayani Triwulan IV Tahun 2023= 2 Layanan Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Triwulan IV Tahun 2023= 100 %				
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) Jumlah Perkara Perdata BHT Triwulan IV Tahun 2023= 7 Perkara Jumlah Permohonan Eksekusi Triwulan IV Tahun 2023= 0 Perkara Jumlah Permohonan Eksekusi 01 tahun 2023 yang ditindaklanjuti = 0 Perkara Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) Triwulan IV Tahun 2023= 100 %	95 %	100 %	105,26%	Diatas Target
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran Realisasi DIPA BUA (401920) Triwulan IV Tahun 2023= 98,13 % Realisasi DIPA BADILUM (402026) Triwulan IV Tahun 2023= 99,82 % Rata-rata Realisasi Triwulan IV Tahun 2023= 98,98 % % Persentase Realisasi Anggaran 01 tahun 2023= 98,98 %	97 % Target Tahunan	98,98 %	102,03 %	Diatas Target

Mengetahui Ketua Tim Evaluator,

RUSPELIATI, S.H.

Sumber Data telah diverifikasi oleh

Data Kesekretariatan, Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan Samsul Rizal, S.H.	Data Kepaniteraan, Panitera Muda Hukum Lelo Herawan
---	---

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
TAHUN 2023

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Realisasi	Keterangan
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</p> <p><i>Jumlah Perkara Perdata Putus Tahunan tahun 2023= 29 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Tahunan tahun 2023= 89 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Tahunan tahun 2023= 118 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus tepat Waktu Tahunan tahun 2023= 118 Perkara</i> % Perkara Putus tepat Waktu Tahunan tahun 2023= 100.00 %</p>	98 %	100 %	102.04 %	Diatas Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif</p> <p><i>Jumlah Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Tahunan tahun 2023= 0 Perkara</i> Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Tahunan tahun 2023= 0 %</p>	0.1 %	0	0 %	Sesuai Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p> <p><i>Jumlah Perkara Perdata Putus Tahunan tahun 2023=29 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Tahunan tahun 2023= 89 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Tahunan tahun 2023= 118 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara yang Banding = 18 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara yang Tidak melakukan Banding = 100 Perkara</i> % Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahunan tahun 2023= 84,75 %</p>	84 %	84,75%	100,89 %	Diatas Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p> <p><i>Jumlah Perkara Perdata Putus Tahunan tahun 2023= 29 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Tahunan tahun 2023= 89 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Tahunan tahun 2023= 118 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara yang Kasasi = 7Perkara</i> <i>Jumlah Perkara yang Tidak melakukan Kasasi = 111 Perkara</i> % Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahunan tahun 2023= 94,07 %</p>	90 %	94,07 %	104,52 %	Diatas Target
1	Terwujudnya proses	<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	0.1 %	0	0 %	Sesuai Target

	peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<i>Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi yang didaftarkan Tahunan tahun 2023= 0 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi yang diselesaikan 01 tahun 2023= 0 Perkara</i> Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahunan tahun 2023= 0 Perkara				
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan <i>Nilai Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahunan tahun 2023= 96,67 %</i> Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Tahunan tahun 2023= 96,67 %	3,7	3,87	101,76 %	Diatas Target
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Tahunan tahun 2023= 29 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Tahunan tahun 2023= 89 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Tahunan tahun 2023= 118 Perkara</i> <i>Jumlah Salinan yang dikirimkan Tepat Waktu = 118 Perkara</i> % Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu Tahunan tahun 2023= 100%	97 %	100 %	103,09%	Diatas Target
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi <i>Jumlah Perkara Mediasi Tahunan tahun 2023= 5 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Mediasi Berhasil = 0 Perkara</i> % Persentase Perkara Mediasi Tahunan tahun 2023= 0	0,1 %	0 %	0 %	Sesuai target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan <i>Jumlah Pendaftaran perkara prodeo Tahunan tahun 2023= 0 Perkara</i> <i>Jumlah Pendaftaran perkara prodeo yang diselesaikan Tahunan tahun 2023= 0 Perkara</i> Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Tahunan tahun 2023= 0 %	0.1 %	0 %	0 %	Sesuai Target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan <i>Jumlah Register Perkara Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Tahunan tahun 2023= 0 Perkara/b></i> <i>Jumlah Penyelesaian Perkara diluar gedung pengadilan Tahunan tahun 2023= 0 Perkara</i> Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan Tahunan tahun 2023= 0 %	0.1 %	0 %	0 %	Sesuai Target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Jumlah Register Layanan POSBAKUM Tahunan tahun 2023= 2 Layanan	100 %	100 %	100 %	Sesuai Target

	Miskin dan Terpinggirkan	Jumlah Pengguna Layanan POSBAKUM terlayani Tahunan tahun 2023= 2 Layanan Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Tahunan tahun 2023= 100 %				
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) Jumlah Perkara Perdata BHT Tahunan tahun 2023= 29 Perkara Jumlah Permohonan Eksekusi Tahunan tahun 2023= 0 Perkara Jumlah Permohonan Eksekusi 01 tahun 2023 yang ditindaklanjuti = 0 Perkara Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahunan tahun 2023= 100 %	95 %	100 %	105,26%	Diatas Target
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran Realisasi DIPA BUA (401920) Tahunan tahun 2023= 98,13 % Realisasi DIPA BADILUM (402026) Tahunan tahun 20232022 = 99,82 % Rata-rata Realisasi Tahunan tahun 2023= 98,98 % % Persentase Realisasi Anggaran 01 tahun 2023= 98,98 %	97 % Target Tahunan	98,98 %	102,03 %	Diatas Target

Mengetahui Ketua Tim Evaluator,

RUSPELIATI, S.H.

Sumber Data telah diverifikasi oleh

Data Kesekretariatan, Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan Samsul Rizal, S.H.	Data Kepaniteraan, Panitera Muda Hukum Lelo Herawan
---	---



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

MONITORING & EVALUASI LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TA 2023



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Jalan Trans Kalimantan KM. 86 Pulang Pisau 748111,
Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Telp. (0513) 2027516

**# bangga
melayani
bangsa**

DAFTAR ISI

A.	DASAR HUKUM DAN PERATURAN	2
B.	WAKTU PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI	2
C.	HASIL MONITORING DAN EVALUASI	2
D.	KENDALA	6
E.	TINDAK LANJUT	6
F.	PENUTUP	6
	DOKUMENTASI.....	7



A. DASAR HUKUM DAN PERATURAN

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

B. WAKTU PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I TA 2023 dilaksanakan pada hari Senin 10 April 2023

C. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Adapun Hasil Monev Diuraikan sebagai berikut:

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Realisasi	Keterangan
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan I tahun 2023= 4</i> Perkara <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan I tahun 2023= 17</i> Perkara <i>Jumlah Perkara Putus Triwulan I tahun 2023= 21</i> Perkara <i>Jumlah Perkara Putus tepat Waktu Triwulan I tahun 2023= 21</i> Perkara % Perkara Putus tepat Waktu Triwulan I tahun 2023= 100.00 %	98 %	100 %	102.04 %	Diatas Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif <i>Jumlah Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Triwulan I tahun 2023= 0</i> Perkara Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Triwulan I tahun 2023= 0 %	0.1 %	0	0 %	Sesua Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti,	c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85 %	90,48%	106,45%	Diatas Target



	transparan dan akuntabel	<p><i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan I tahun 2023= 4 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan I tahun 2023= 17 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Perkara Putus Triwulan I tahun 2023= 21 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Perkara yang Banding = 2 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Perkara yang Tidak melakukan Banding = 19 Perkara</i></p> <p>% Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Triwulan I tahun 2023= 90,48%</p>				
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p> <p><i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan I tahun 2023= 4 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan I tahun 2023= 17 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Perkara Putus Triwulan I tahun 2023= 21 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Perkara yang Kasasi = 2 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Perkara yang Tidak melakukan Kasasi = 19 Perkara</i></p> <p>% Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Triwulan I tahun 2023= 90,48 %</p>	90 %	90,48 %	100,53%	Diatas Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p> <p><i>Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi yang didaftarkan Triwulan I tahun 2023= 0 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi yang diselesaikan 01 tahun 2023= 0 Perkara</i></p> <p>Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Triwulan I tahun 2023= 0 Perkara</p>	0.1 %	0	0 %	Sesuai Target
1	Terwujudnya proses	<p>f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap</p>	95 %	93,89 %	98,83%	Dibawah Target



	peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>layanan peradilan</p> <p>Nilai Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan 01 tahun 2023= 93,89%</p> <p>Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Triwulan I tahun 2023= 93,89 %</p>				
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu</p> <p>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan I tahun 2023= 4 Perkara</p> <p>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan I tahun 2023= 17 Perkara</p> <p>Jumlah Perkara Putus Triwulan I tahun 2023= 21 Perkara</p> <p>Jumlah Salinan yang dikirimkan Tepat Waktu = 28 Perkara</p> <p>% Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu Triwulan I tahun 2023= 100%</p>	97 %	100 %	103,09%	Diatas Target
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi</p> <p>Jumlah Perkara Mediasi Triwulan I tahun 2023= 0 Perkara</p> <p>Jumlah Perkara Mediasi Berhasil = 1 Perkara</p> <p>% Persentase Perkara Mediasi Triwulan I tahun 2023= 0</p>	9 %	0 %	0 %	Dibawah target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p> <p>Jumlah Pendaftaran perkara prodeo Triwulan I tahun 2023= 0 Perkara</p> <p>Jumlah Pendaftaran perkara prodeo yang diselesaikan Triwulan I tahun 2023= 0 Perkara</p> <p>Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Triwulan I tahun 2023= 0 %</p>	0.1 %	0 %	0 %	Sesuai Target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</p> <p>Jumlah Register Perkara</p>	0.1 %	0 %	0 %	Sesuai Target



	Miskin dan Terpinggirkan	<i>Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Triwulan I tahun 2023= 0 Perkara/b></i> Jumlah Penyelesaian Perkara diluar gedung pengadilan Triwulan I tahun 2023= 0 Perkara Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan Triwulan I tahun 2023= 0 %				
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Jumlah Register Layanan POSBAKUM Triwulan I tahun 2023=1 Layanan Jumlah Pengguna Layanan POSBAKUM terlayani Triwulan I tahun 2023= 4Layanan Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Triwulan I tahun 2023= 100 %	100 %	100 %	100 %	Sesuai Target
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) Jumlah Perkara Perdata BHT Triwulan I tahun 2023= 3 Perkara Jumlah Permohonan Eksekusi Triwulan I tahun 2023= 0 Perkara Jumlah Permohonan Eksekusi 01 tahun 2023 yang ditindaklanjuti = 0 Perkara Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) Triwulan I tahun 2023= 100 %	95 %	100 %	105,26%	Diatas Target
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran Realisasi DIPA BUA (401920) Triwulan I tahun 2023= 13,69 % Realisasi DIPA BUA (402026) Triwulan I tahun 20232022 = 44,28 % Rata-rata Realisasi Triwulan I tahun 2023= 35,83 % % Persentase Realisasi	97 % Target Triwulan I : 24,25 %	35,83 %	147,75 %	Diatas Target



		Anggaran 01 tahun 2023= 35,83%				
--	--	-----------------------------------	--	--	--	--

D. KENDALA

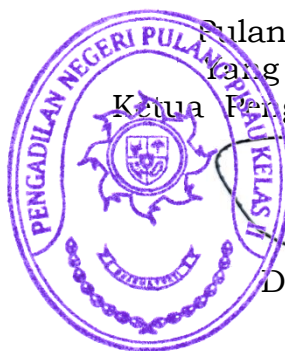
1. Nilai SKM Dibawah Target 95 % yaitu 93,89%
2. Mediasi dibawah target dikarenakan tidak ada Mediasi di Triwulan I TA 2023

E. TINDAK LANJUT

1. Menetapkan kembali Target yang ada dan mengevaluasi Layanan Pengadilan
2. Mengupayakan agar mediasi pada Triwulan Selanjutnya supaya ada perkara mediasi yang berhasil

F. PENUTUP

Demikian laporan monitoring dan evaluasi ini dibuat untuk dijadikan sebagai motivasi dan ketepatan dalam melaksanakan kegiatan.



Pulang Pisau, 10 April 2023
Yang Melaksanakan Monev
Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau


DIAN NUR PRATIWI



DOKUMENTASI



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
Jl. Trans Kalimantan km.86 Gohong
Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah
<https://pn-pulangpisau.go.id/>

**NOTULEN RAPAT
MONITORING DAN EVALUASI**

Hari / Tanggal	:	Senin, 10 April 2023
P u k u l	:	08.00 WIB sd Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat PN Pulang Pisau
Agenda	:	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I TA 2023
Pimpinan Rapat	:	Dian Nur Pratiwi
Notulis	:	Arofah Azhar
Peserta Rapat	:	Ketua, Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, ASN dan PPNPN

RINGKASAN ACARA

1.	Pembukaan Rapat langsung dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau selaku Pihak yang melaksanakan Monitoring dan Evaluasi						
2.	Hasil Monitoring dan Evaluasi						
	No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Realisasi	Keterangan
	1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan I tahun 2023= 4 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan I tahun 2023= 17 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Triwulan I tahun 2023= 21 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus tepat Waktu Triwulan I tahun 2023= 21 Perkara</i> % Perkara Putus tepat Waktu Triwulan I tahun 2023= 100.00 %	98 %	100 %	102.04 %	Diatas
	1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif <i>Jumlah Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Triwulan I tahun 2023= 0 Perkara</i> Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Triwulan I tahun 2023= 0 %	0.1 %	0	0 %	Sesuai
	1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan I tahun 2023= 4 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan I tahun 2023= 17 Perkara</i>	85 %	90,48%	106,45%	Diatas



		<p>I tahun 2023= 17 Perkara Jumlah Perkara Putus Triwulan I tahun 2023= 21 Perkara Jumlah Perkara yang Banding = 2 Perkara Jumlah Perkara yang Tidak melakukan Banding = 19 Perkara % Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Triwulan I tahun 2023= 90,48%</p>				
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p> <p>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan I tahun 2023= 4 Perkara Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan I tahun 2023= 17 Perkara Jumlah Perkara Putus Triwulan I tahun 2023= 21 Perkara Jumlah Perkara yang Kasasi = 2 Perkara Jumlah Perkara yang Tidak melakukan Kasasi = 19 Perkara % Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Triwulan I tahun 2023= 90,48 %</p>	90 %	90,48 %	100,53%	Diatas Ta
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p> <p>Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi yang didaftarkan Triwulan I tahun 2023= 0 Perkara Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi yang diselesaikan 01 tahun 2023= 0 Perkara Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Triwulan I tahun 2023= 0 Perkara</p>	0.1 %	0	0 %	Sesuai Ta
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p> <p>Nilai Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan 01 tahun 2023= 93,89% Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Triwulan I tahun 2023= 93,89 %</p>	95 %	93,89 %	98,83%	Dibawah
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu</p> <p>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan I tahun 2023= 4 Perkara</p>	97 %	100 %	103,09%	Diatas Ta



		<p>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan I tahun 2023= 17 Perkara</p> <p>Jumlah Perkara Putus Triwulan I tahun 2023= 21 Perkara</p> <p>Jumlah Salinan yang dikirimkan Tepat Waktu = 28 Perkara</p> <p>% Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu Triwulan I tahun 2023= 100%</p>				
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi</p> <p>Jumlah Perkara Mediasi Triwulan I tahun 2023= 0 Perkara</p> <p>Jumlah Perkara Mediasi Berhasil = 1 Perkara</p> <p>% Persentase Perkara Mediasi Triwulan I tahun 2023= 0</p>	9 %	0 %	0 %	Dibawah
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p> <p>Jumlah Pendaftaran perkara prodeo Triwulan I tahun 2023= 0 Perkara</p> <p>Jumlah Pendaftaran perkara prodeo yang diselesaikan Triwulan I tahun 2023= 0 Perkara</p> <p>Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Triwulan I tahun 2023= 0 %</p>	0.1 %	0 %	0 %	Sesuai T
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</p> <p>Jumlah Register Perkara Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Triwulan I tahun 2023= 0 Perkara/b></p> <p>Jumlah Penyelesaian Perkara diluar gedung pengadilan Triwulan I tahun 2023= 0 Perkara</p> <p>Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan Triwulan I tahun 2023= 0 %</p>	0.1 %	0 %	0 %	Sesuai T
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)</p> <p>Jumlah Register Layanan POSBAKUM Triwulan I tahun 2023=1 Layanan</p> <p>Jumlah Pengguna Layanan POSBAKUM terlayani Triwulan I tahun 2023= 4Layanan</p> <p>Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan</p>	100 %	100 %	100 %	Sesuai T



			bantuan hukum (Posbakum) Triwulan I tahun 2023= 100 %				
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) Jumlah Perkara Perdata BHT Triwulan I tahun 2023= 3 Perkara Jumlah Permohonan Eksekusi Triwulan I tahun 2023= 0 Perkara Jumlah Permohonan Eksekusi 01 tahun 2023 yang ditindaklanjuti = 0 Perkara Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) Triwulan I tahun 2023= 100 %	95 %	100 %	105,26%	Diatas Ta	
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran Realisasi DIPA BUA (401920) Triwulan I tahun 2023= 13,69 % Realisasi DIPA BUA (402026) Triwulan I tahun 20232022 = 44,28 % Rata-rata Realisasi Triwulan I tahun 2023= 35,83 % % Persentase Realisasi Anggaran 01 tahun 2023= 35,83%	97 % Target Triwulan I : 24,25 %	35,83 %	147,75 %	Diatas Ta	

3. Dokumentasi





4

Penutup

Demikian Monitoring dan Evaluasi ini di tutup pada jam 11.00 WIB.


PENGESAHAN
PIMPINAN RAPAT



KETUA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II,


DIAN NUR PRATIWI

NOTULIS


AROFAH AZHAR





BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

MONITORING & EVALUASI LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TA 2023



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Jalan Trans Kalimantan KM. 86 Pulang Pisau 748111,
Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Telp. (0513) 2027516

**# bangga
melayani
bangsa**

DAFTAR ISI

A.	DASAR HUKUM DAN PERATURAN	2
B.	WAKTU PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI	2
C.	HASIL MONITORING DAN EVALUASI	2
D.	KENDALA	6
E.	TINDAK LANJUT	6
F.	PENUTUP	6
	DOKUMENTASI.....	7



A. DASAR HUKUM DAN PERATURAN

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

B. WAKTU PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Kinerja Semester II TA 2023 dilaksanakan pada hari Senin 03 Juli 2023

C. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Adapun Hasil Monev Diuraikan sebagai berikut:

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Realisasi	Keterangan
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Semester I tahun 2023= 11 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Semester I tahun 2023= 36 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Semester I tahun 2023= 47 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus tepat Waktu Semester I tahun 2023= 47 Perkara</i> % Perkara Putus tepat Waktu Semester I tahun 2023= 100.00 %	98 %	100 %	102.04 %	Diatas Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif <i>Jumlah Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Semester I tahun 2023= 0 Perkara</i> Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Semester I tahun 2023= 0 %	0.1 %	0	0 %	Sesuai Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti,	c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85 %	91,49%	107,63%	Diatas Target



	transparan dan akuntabel	<p><i>Jumlah Perkara Perdata Putus Semester I tahun 2023= 11 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Perkara Pidana Putus Semester I tahun 2023= 36 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Perkara Putus Semester I tahun 2023= 47 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Perkara yang Banding = 4 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Perkara yang Tidak melakukan Banding = 43 Perkara</i></p> <p>% Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Semester I tahun 2023= 91,49%</p>				
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p> <p><i>Jumlah Perkara Perdata Putus Semester I tahun 2023= 11 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Perkara Pidana Putus Semester I tahun 2023= 36 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Perkara Putus Semester I tahun 2023= 47 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Perkara yang Kasasi = 2 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Perkara yang Tidak melakukan Kasasi = 45 Perkara</i></p> <p>% Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Semester I tahun 2023= 95,74 %</p>	90 %	95,74 %	106,38 %	Diatas Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p> <p><i>Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi yang didaftarkan Semester I tahun 2023= 0 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi yang diselesaikan 01 tahun 2023= 0 Perkara</i></p> <p>Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Semester I tahun 2023= 0 Perkara</p>	0.1 %	0	0 %	Sesuai Target



1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan <i>Nilai Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan 01 tahun 2023= 93,69%</i> Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Semester I tahun 2023= 93,69 %	95 %	93,69 %	98,62%	Dibawah Target
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Semester I tahun 2023= 11 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Semester I tahun 2023= 36 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Semester I tahun 2023= 47 Perkara</i> <i>Jumlah Salinan yang dikirimkan Tepat Waktu = 47 Perkara</i> % Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu Semester I tahun 2023= 100%	97 %	100 %	103,09%	Diatas Target
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi <i>Jumlah Perkara Mediasi Semester I tahun 2023= 4 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Mediasi Berhasil = 0 Perkara</i> % Persentase Perkara Mediasi Semester I tahun 2023= 0	9 %	0 %	0 %	Dibawah target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan <i>Jumlah Pendaftaran perkara prodeo Semester I tahun 2023= 0 Perkara</i> <i>Jumlah Pendaftaran perkara prodeo yang diselesaikan Semester I tahun 2023= 0 Perkara</i> Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Semester I tahun 2023= 0 %	0.1 %	0 %	0 %	Sesuai Target
3	Meningkatnya Akses Peradilan	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung	0.1 %	0 %	0 %	Sesuai Target



	bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>pengadilan</p> <p><i>Jumlah Register Perkara Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Semester I tahun 2023= 0 Perkara/b></i></p> <p>Jumlah Penyelesaian Perkara diluar gedung pengadilan Semester I tahun 2023= 0 Perkara</p> <p>Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan Semester I tahun 2023= 0 %</p>				
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)</p> <p>Jumlah Register Layanan POSBAKUM Semester I tahun 2023= 2 Layanan Jumlah Pengguna Layanan POSBAKUM terlayani Semester I tahun 2023= 2 Layanan</p> <p>Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Semester I tahun 2023= 100 %</p>	100 %	100 %	100 %	Sesuai Target
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	<p>Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)</p> <p>Jumlah Perkara Perdata BHT Semester I tahun 2023= 11 Perkara Jumlah Permohonan Eksekusi Semester I tahun 2023= 0 Perkara Jumlah Permohonan Eksekusi 01 tahun 2023 yang ditindaklanjuti = 0 Perkara</p> <p>Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) Semester I tahun 2023= 100 %</p>	95 %	100 %	105,26%	Diatas Target
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	<p>Persentase realisasi anggaran</p> <p>Realisasi DIPA BUA (401920) Semester I tahun 2023= 57,03 % Realisasi DIPA BADILUM (402026) Semester I tahun</p>	97 % Target Semester I : 50 %	59,145 %	118,29 %	Diatas Target



		20232022 = 61,26 % Rata-rata Realisasi Semester I tahun 2023= 59,145 % % Persentase Realisasi Anggaran 01 tahun 2023= 59,145 %				
--	--	--	--	--	--	--

D. KENDALA

1. Nilai SKM Dibawah Target 95 % yaitu 93,69%
2. Mediasi dibawah target dikarenakan 4 Perkara yang dilakukan Mediasi dilakukan tidak berhasil di Semester I TA 2023

E. TINDAK LANJUT

1. Melakukan Target ulang untuk target SKM
2. Mengupayakan agar mediasi pada Triwulan Selanjutnya supaya ada perkara mediasi yang berhasil atau melakukan target ulang untuk mediasi

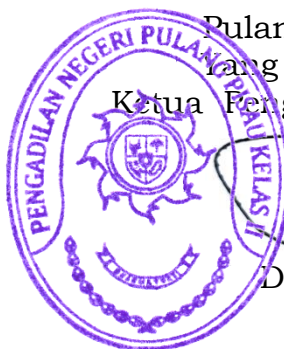
F. PENUTUP

Demikian laporan monitoring dan evaluasi ini dibuat untuk dijadikan sebagai motivasi dan ketepatan dalam melaksanakan kegiatan.

Pulang Pisau, 03 Juli 2023

Yang Melaksanakan Monev

Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau



[Handwritten Signature]
DIAN NUR PRATIWI



DOKUMENTASI



**NOTULEN RAPAT
MONITORING DAN EVALUASI**

Hari / Tanggal	:	Senin, 03 Juli 2023
P u k u l	:	08.00 WIB sd Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat PN Pulang Pisau
Agenda	:	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Kinerja Semester I TA 2023
Pimpinan Rapat	:	Dian Nur Pratiwi
Notulis	:	Arofah Azhar
Peserta Rapat	:	Ketua, Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, ASN dan PPNPN

RINGKASAN ACARA

1.	Pembukaan Rapat langsung dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau selaku Pihak yang melaksanakan Monitoring dan Evaluasi						
2.	Hasil Monitoring dan Evaluasi						
	No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Realisasi	Keterangan
	1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Semester I tahun 2023= 11 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Semester I tahun 2023= 36 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Semester I tahun 2023= 47 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus tepat Waktu Semester I tahun 2023= 47 Perkara</i> % Perkara Putus tepat Waktu Semester I tahun 2023= 100.00 %	98 %	100 %	102.04 %	Diatas Target
	1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif <i>Jumlah Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Semester I tahun 2023= 0 Perkara</i> Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Semester I tahun 2023= 0 %	0.1 %	0	0 %	Sesuai Target



1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p> <p><i>Jumlah Perkara Perdata Putus Semester I tahun 2023= 11 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Perkara Pidana Putus Semester I tahun 2023= 36 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Perkara Putus Semester I tahun 2023= 47 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Perkara yang Banding = 4 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Perkara yang Tidak melakukan Banding = 43 Perkara</i></p> <p>% Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Semester I tahun 2023= 91,49%</p>	85 %	91,49%	107,63%	Diatas Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p> <p><i>Jumlah Perkara Perdata Putus Semester I tahun 2023= 11 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Perkara Pidana Putus Semester I tahun 2023= 36 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Perkara Putus Semester I tahun 2023= 47 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Perkara yang Kasasi = 2 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Perkara yang Tidak melakukan Kasasi = 45 Perkara</i></p> <p>% Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Semester I tahun 2023= 95,74 %</p>	90 %	95,74 %	106,38 %	Diatas Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p> <p><i>Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi yang didaftarkan Semester I tahun 2023= 0 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi yang diselesaikan 01 tahun 2023= 0 Perkara</i></p> <p>Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan</p>	0.1 %	0	0 %	Sesuai Target



		Diversi Semester I tahun 2023= 0 Perkara				
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan <i>Nilai Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan 01 tahun 2023= 93,69%</i> Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Semester I tahun 2023= 93,69 %	95 %	93,69 %	98,62%	Dibawah Target
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Semester I tahun 2023= 11 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Semester I tahun 2023= 36 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Semester I tahun 2023= 47 Perkara</i> <i>Jumlah Salinan yang dikirimkan Tepat Waktu = 47 Perkara</i> % Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu Semester I tahun 2023= 100%	97 %	100 %	103,09%	Diatas Target
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi <i>Jumlah Perkara Mediasi Semester I tahun 2023= 4 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Mediasi Berhasil = 0 Perkara</i> % Persentase Perkara Mediasi Semester I tahun 2023= 0	9 %	0 %	0 %	Dibawah target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan <i>Jumlah Pendaftaran perkara prodeo Semester I tahun 2023= 0 Perkara</i> <i>Jumlah Pendaftaran perkara prodeo yang diselesaikan Semester I tahun 2023= 0 Perkara</i> Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Semester I tahun 2023= 0 %	0.1 %	0 %	0 %	Sesuai Target



3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</p> <p><i>Jumlah Register Perkara Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Semester I tahun 2023= 0 Perkara/b></i></p> <p>Jumlah Penyelesaian Perkara diluar gedung pengadilan Semester I tahun 2023= 0 Perkara</p> <p>Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan Semester I tahun 2023= 0 %</p>	0.1 %	0 %	0 %	Sesuai Target	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)</p> <p>Jumlah Register Layanan POSBAKUM Semester I tahun 2023= 2 Layanan</p> <p>Jumlah Pengguna Layanan POSBAKUM terlayani Semester I tahun 2023= 2 Layanan</p> <p>Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Semester I tahun 2023= 100 %</p>	100 %	100 %	100 %	Sesuai Target	
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	<p>Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)</p> <p>Jumlah Perkara Perdata BHT Semester I tahun 2023= 11 Perkara</p> <p>Jumlah Permohonan Eksekusi Semester I tahun 2023= 0 Perkara</p> <p>Jumlah Permohonan Eksekusi 01 tahun 2023 yang ditindaklanjuti = 0 Perkara</p> <p>Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) Semester I tahun 2023= 100 %</p>	95 %	100 %	105,26%	Diatas Target	
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas	<p>Persentase realisasi anggaran</p> <p>Realisasi DIPA BUA (401920) Semester I tahun 2023= 57,03</p>	97 % Target Semester I: 50 %	59,145 %	118,29 %	Diatas Target	



	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	% Realisasi DIPA BADILUM (402026) Semester I tahun 2023/2022 = 61,26 % Rata-rata Realisasi Semester I tahun 2023= 59,145 % % Persentase Realisasi Anggaran 01 tahun 2023= 59,145 %				
3.	Dokumentasi 					
4	Penutup Demikian Monitoring dan Evaluasi ini di tutup pada jam 11.00 WIB.					
PENGESAHAN PIMPINAN RAPAT						





KETUA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II,


DIAN NUR PRATIWI

NOTULIS


AROFAH AZHAR





BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

MONITORING & EVALUASI LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TA 2023



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Jalan Trans Kalimantan KM. 86 Pulang Pisau 748111,
Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Telp. (0513) 2027516

**# bangga
melayani
bangsa**

DAFTAR ISI

A.	DASAR HUKUM DAN PERATURAN.....	2
B.	WAKTU PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI	2
C.	HASIL MONITORING DAN EVALUASI	2
D.	KENDALA.....	6
E.	TINDAK LANJUT	6
F.	PENUTUP.....	7
	DOKUMENTASI.....	Error! Bookmark not defined.



A. DASAR HUKUM DAN PERATURAN

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

B. WAKTU PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III TA 2023 dilaksanakan pada hari Rabu 04 Oktober 2023

C. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Adapun Hasil Monev Diuraikan sebagai berikut:

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Realisasi	Keterangan
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan III tahun 2023= 22 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan III tahun 2023= 64 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Triwulan III tahun 2023= 86 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus tepat Waktu Triwulan III tahun 2023= 86 Perkara</i> % Perkara Putus tepat Waktu Triwulan III tahun 2023= 100.00 %	98 %	100 %	102.04 %	Diatas Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif <i>Jumlah Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Triwulan III tahun 2023= 0 Perkara</i> Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Triwulan III tahun 2023= 0 %	0.1 %	0	0 %	Sesuai Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti,	c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85 %	87,21 %	102,6 %	Diatas Target



	transparan dan akuntabel	<p><i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan III tahun 2023=</i> 22 Perkara</p> <p><i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan III tahun 2023=</i> 64 Perkara</p> <p><i>Jumlah Perkara Putus Triwulan III tahun 2023=</i> 86 Perkara</p> <p><i>Jumlah Perkara yang Banding =</i> 11 Perkara</p> <p><i>Jumlah Perkara yang Tidak melakukan Banding =</i> 75 Perkara</p> <p>% Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Triwulan III tahun 2023= 87,21 %</p>				
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p> <p><i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan III tahun 2023=</i> 22 Perkara</p> <p><i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan III tahun 2023=</i> 64 Perkara</p> <p><i>Jumlah Perkara Putus Triwulan III tahun 2023=</i> 86 Perkara</p> <p><i>Jumlah Perkara yang Kasasi =</i> 4 Perkara</p> <p><i>Jumlah Perkara yang Tidak melakukan Kasasi =</i> 82 Perkara</p> <p>% Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Triwulan III tahun 2023= 95,35 %</p>	90 %	95,35 %	105,94 %	Diatas Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p> <p><i>Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi yang didaftarkan Triwulan III tahun 2023=</i> 0 Perkara</p> <p><i>Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi yang diselesaikan 01 tahun 2023=</i> 0 Perkara</p> <p>Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Triwulan III tahun 2023= 0 Perkara</p>	0.1 %	0	0 %	Sesuai Target



1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan <i>Nilai Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan III tahun 2023= 96,01%</i> Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Triwulan III tahun 2023= 96,01 %	95 %	96,01 %	101,06%	Diatas Target
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan III tahun 2023= 22 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan III tahun 2023= 64 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Triwulan III tahun 2023= 86 Perkara</i> <i>Jumlah Salinan yang dikirimkan Tepat Waktu = 86 Perkara</i> % Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu Triwulan III tahun 2023= 100%	97 %	100 %	103,09%	Diatas Target
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi <i>Jumlah Perkara Mediasi Triwulan III tahun 2023= 4 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Mediasi Berhasil = 0 Perkara</i> % Persentase Perkara Mediasi Triwulan III tahun 2023= 0	9 %	0 %	0 %	Dibawah target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan <i>Jumlah Pendaftaran perkara prodeo Triwulan III tahun 2023= 0 Perkara</i> <i>Jumlah Pendaftaran perkara prodeo yang diselesaikan Triwulan III tahun 2023= 0 Perkara</i> Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Triwulan III tahun 2023= 0 %	0.1 %	0 %	0 %	Sesuai Target



3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</p> <p><i>Jumlah Register Perkara Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Triwulan III tahun 2023= 0 Perkara/b></i></p> <p><i>Jumlah Penyelesaian Perkara diluar gedung pengadilan Triwulan III tahun 2023= 0 Perkara</i></p> <p>Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan Triwulan III tahun 2023= 0 %</p>	0.1 %	0 %	0 %	Sesuai Target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)</p> <p>Jumlah Register Layanan POSBAKUM Triwulan III tahun 2023= 2 Layanan</p> <p>Jumlah Pengguna Layanan POSBAKUM terlayani Triwulan III tahun 2023= 2 Layanan</p> <p>Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Triwulan III tahun 2023= 100 %</p>	100 %	100 %	100 %	Sesuai Target
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	<p>Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)</p> <p>Jumlah Perkara Perdata BHT Triwulan III tahun 2023= 18 Perkara</p> <p>Jumlah Permohonan Eksekusi Triwulan III tahun 2023= 0 Perkara</p> <p>Jumlah Permohonan Eksekusi 01 tahun 2023 yang ditindaklanjuti = 0 Perkara</p> <p>Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) Triwulan III tahun 2023= 100 %</p>	95 %	100 %	105,26%	Diatas Target



5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran Realisasi DIPA BUA (401920) Triwulan III tahun 2023= 59,08 % Realisasi DIPA BADILUM (402026) Triwulan III tahun 20232022 = 80,35 % Rata-rata Realisasi Triwulan III tahun 2023= 59,145 % % Persentase Realisasi Anggaran 01 tahun 2023= 59,145 %	97 % Target Triwulan III : 75 %	69,715 %	71,87 %	Dibawah Target
---	---	--	---------------------------------------	----------	---------	-----------------------

D. KENDALA

1. Nilai Realisasi Anggaran Tidak mencapai target dikarenakan adanya anggaran Biaya Tambahan pada Agustus 2023 sehingga menyebabkan realisasi anggaran menjadi kecil khususnya pada realisasi belanja Modal yaitu 49,26% pada DIPA 401920, sedangkan belanja barang 85,4% dan Belanja Pegawai 84,47%.
2. Mediasi dibawah target dikarenakan 4 Perkara yang dilakukan Mediasi dilakukan tidak berhasil di Triwulan III TA 2023

E. TINDAK LANJUT

1. Membuat Perencanaan Penarikan yang terjadwal untuk belanja Modal dan juga mempercepat proses tender dan seleksi terkait ABT tersebut
2. Mengupayakan agar mediasi pada Triwulan Selanjutnya supaya ada perkara mediasi yang berhasil atau melakukan target ulang untuk mediasi.



F. PENUTUP

Demikian laporan monitoring dan evaluasi ini dibuat untuk dijadikan sebagai motivasi dan ketepatan dalam melaksanakan kegiatan.

Pulang Pisau, 04 Oktober 2023

Yang Melaksanakan Monev
Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau



DIAN NUR PRATIWI



**NOTULEN RAPAT
MONITORING DAN EVALUASI**

Hari / Tanggal	:	Rabu, 04 Oktober 2023
P u k u l	:	08.00 WIB sd Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat PN Pulang Pisau
Agenda	:	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III TA 2023
Pimpinan Rapat	:	Dian Nur Pratiwi
Notulis	:	Laili Rahmah
Peserta Rapat	:	Ketua, Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, ASN dan PPNPN

RINGKASAN ACARA

1.	Pembukaan Rapat langsung dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau selaku Pihak yang melaksanakan Monitoring dan Evaluasi						
2.	No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Realisasi	Keterangan
	1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan III tahun 2023= 22 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan III tahun 2023= 64 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Triwulan III tahun 2023= 86 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus tepat Waktu Triwulan III tahun 2023= 86 Perkara</i> % Perkara Putus tepat Waktu Triwulan III tahun 2023= 100.00 %	98 %	100 %	102.04 %	Diatas Target
	1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif <i>Jumlah Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Triwulan III tahun 2023= 0 Perkara</i> Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Triwulan III tahun 2023= 0 %	0.1 %	0	0 %	Sesuai Target



1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p> <p><i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan III tahun 2023= 22 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan III tahun 2023= 64 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Perkara Putus Triwulan III tahun 2023= 86 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Perkara yang Banding = 11 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Perkara yang Tidak melakukan Banding = 75 Perkara</i></p> <p>% Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Triwulan III tahun 2023= 87,21 %</p>	85 %	87,21 %	102,6 %	Diatas Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p> <p><i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan III tahun 2023= 22 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan III tahun 2023= 64 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Perkara Putus Triwulan III tahun 2023= 86 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Perkara yang Kasasi = 4 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Perkara yang Tidak melakukan Kasasi = 82 Perkara</i></p> <p>% Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Triwulan III tahun 2023= 95,35 %</p>	90 %	95,35 %	105,94 %	Diatas Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p> <p><i>Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi yang didaftarkan Triwulan III tahun 2023= 0 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi yang diselesaikan 01 tahun 2023= 0 Perkara</i></p> <p>Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan</p>	0.1 %	0	0 %	Sesuai Target



		Diversi Triwulan III tahun 2023= 0 Perkara				
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan <i>Nilai Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan III tahun 2023= 96,01%</i> Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Triwulan III tahun 2023= 96,01 %	95 %	96,01 %	101,06%	Diatas Target
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan III tahun 2023= 22 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan III tahun 2023= 64 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Triwulan III tahun 2023= 86 Perkara</i> <i>Jumlah Salinan yang dikirimkan Tepat Waktu = 86 Perkara</i> % Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu Triwulan III tahun 2023= 100%	97 %	100 %	103,09%	Diatas Target
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi <i>Jumlah Perkara Mediasi Triwulan III tahun 2023= 4 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Mediasi Berhasil = 0 Perkara</i> % Persentase Perkara Mediasi Triwulan III tahun 2023= 0	9 %	0 %	0 %	Dibawah target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan <i>Jumlah Pendaftaran perkara prodeo Triwulan III tahun 2023= 0 Perkara</i> <i>Jumlah Pendaftaran perkara prodeo yang diselesaikan Triwulan III tahun 2023= 0 Perkara</i>	0.1 %	0 %	0 %	Sesuai Target



			Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Triwulan III tahun 2023= 0 %				
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan <i>Jumlah Register Perkara Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Triwulan III tahun 2023= 0 Perkara/b></i> Jumlah Penyelesaian Perkara diluar gedung pengadilan Triwulan III tahun 2023= 0 Perkara Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan Triwulan III tahun 2023= 0 %	0.1 %	0 %	0 %	Sesuai Target	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Jumlah Register Layanan POSBAKUM Triwulan III tahun 2023= 2 Layanan Jumlah Pengguna Layanan POSBAKUM terlayani Triwulan III tahun 2023= 2 Layanan Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Triwulan III tahun 2023= 100 %	100 %	100 %	100 %	Sesuai Target	
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) Jumlah Perkara Perdata BHT Triwulan III tahun 2023= 18 Perkara Jumlah Permohonan Eksekusi Triwulan III tahun 2023= 0 Perkara Jumlah Permohonan Eksekusi 01 tahun 2023 yang ditindaklanjuti = 0 Perkara Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) Triwulan III tahun 2023= 100 %	95 %	100 %	105,26%	Diatas Target	



	5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran Realisasi DIPA BUA (401920) Triwulan III tahun 2023= 59,08 % Realisasi DIPA BADILUM (402026) Triwulan III tahun 20232022 = 80,35 % Rata-rata Realisasi Triwulan III tahun 2023= 59,145 % % Persentase Realisasi Anggaran 01 tahun 2023= 59,145 %	97 % Target Triwulan III : 75 %	69,715 %	71,87 %	Dibawah Target
3	Penutup Demikian Monitoring dan Evaluasi ini di tutup pada jam 11.00 WIB.						

PENGESAHAN
PIMPINAN RAPAT

KETUA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II,



DIAN NUR PRATIWI

NOTULIS


LAILI RAHMAH




BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

MONITORING & EVALUASI LAPORAN KINERJA TAHUNAN TA 2023



DAFTAR ISI

A.	DASAR HUKUM DAN PERATURAN	2
B.	WAKTU PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI	2
C.	HASIL MONITORING DAN EVALUASI	2
D.	KENDALA	6
E.	TINDAK LANJUT	6
F.	PENUTUP	6
	DOKUMENTASI.....	7



A. DASAR HUKUM DAN PERATURAN

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

B. WAKTU PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan TA 2023 dilaksanakan pada hari Kamis 28 Desember 2023

C. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Adapun Hasil Monev Diuraikan sebagai berikut:

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Realisasi	Keterangan
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Tahunan tahun 2023= 29 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Tahunan tahun 2023= 89 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Tahunan tahun 2023= 118 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus tepat Waktu Tahunan tahun 2023= 118 Perkara</i> % Perkara Putus tepat Waktu Tahunan tahun 2023= 100.00 %	98 %	100 %	102.04 %	Diatas Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif <i>Jumlah Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Tahunan tahun 2023= 0 Perkara</i> Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Tahunan tahun 2023= 0 %	0.1 %	0	0 %	Sesuai Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti,	c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding <i>Jumlah Perkara Perdata Putus</i>	84 %	84,75%	100,89 %	Diatas Target



	transparan dan akuntabel	<p>Tahunan tahun 2023=29 Perkara Jumlah Perkara Pidana Putus Tahunan tahun 2023= 89 Perkara Jumlah Perkara Putus Tahunan tahun 2023= 118 Perkara Jumlah Perkara yang Banding = 18 Perkara Jumlah Perkara yang Tidak melakukan Banding = 100 Perkara % Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahunan tahun 2023= 84,75 %</p>				
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p> <p>Jumlah Perkara Perdata Putus Tahunan tahun 2023= 29 Perkara Jumlah Perkara Pidana Putus Tahunan tahun 2023= 89 Perkara Jumlah Perkara Putus Tahunan tahun 2023= 118 Perkara Jumlah Perkara yang Kasasi = 7 Perkara Jumlah Perkara yang Tidak melakukan Kasasi = 111 Perkara % Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahunan tahun 2023= 94,07 %</p>	90 %	94,07 %	104,52 %	Diatas Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p> <p>Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi yang didaftarkan Tahunan tahun 2023= 0 Perkara Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi yang diselesaikan 01 tahun 2023= 0 Perkara Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahunan tahun 2023= 0 Perkara</p>	0.1 %	0	0 %	Sesuai Target



1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan <i>Nilai Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahunan tahun 2023= 96,67 %</i> Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Tahunan tahun 2023= 96,67 %	3,7	3,87	101,76 %	Diatas Target
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Tahunan tahun 2023= 29 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Tahunan tahun 2023= 89 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Tahunan tahun 2023= 118 Perkara</i> <i>Jumlah Salinan yang dikirimkan Tepat Waktu = 118 Perkara</i> % Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu Tahunan tahun 2023= 100%	97 %	100 %	103,09%	Diatas Target
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi <i>Jumlah Perkara Mediasi Tahunan tahun 2023= 5 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Mediasi Berhasil = 0 Perkara</i> % Persentase Perkara Mediasi Tahunan tahun 2023= 0	0,1 %	0 %	0 %	Sesuai target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan <i>Jumlah Pendaftaran perkara prodeo Tahunan tahun 2023= 0 Perkara</i> <i>Jumlah Pendaftaran perkara prodeo yang diselesaikan Tahunan tahun 2023= 0 Perkara</i> Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Tahunan tahun 2023= 0 %	0.1 %	0 %	0 %	Sesuai Target



3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</p> <p><i>Jumlah Register Perkara Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Tahunan tahun 2023= 0 Perkara/b></i></p> <p><i>Jumlah Penyelesaian Perkara diluar gedung pengadilan Tahunan tahun 2023= 0 Perkara</i></p> <p>Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan Tahunan tahun 2023= 0 %</p>	0.1 %	0 %	0 %	Sesuai Target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)</p> <p>Jumlah Register Layanan POSBAKUM Tahunan tahun 2023= 2 Layanan</p> <p>Jumlah Pengguna Layanan POSBAKUM terlayani Tahunan tahun 2023= 2 Layanan</p> <p>Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Tahunan tahun 2023= 100 %</p>	100 %	100 %	100 %	Sesuai Target
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	<p>Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)</p> <p>Jumlah Perkara Perdata BHT Tahunan tahun 2023= 29 Perkara</p> <p>Jumlah Permohonan Eksekusi Tahunan tahun 2023= 0 Perkara</p> <p>Jumlah Permohonan Eksekusi 01 tahun 2023 yang ditindaklanjuti = 0 Perkara</p> <p>Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahunan tahun 2023= 100 %</p>	95 %	100 %	105,26%	Diatas Target
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan	<p>Persentase realisasi anggaran</p> <p>Realisasi DIPA BUA (401920) Tahunan tahun 2023= 98,13 %</p> <p>Realisasi DIPA BADILUM (402026) Tahunan tahun</p>	97 % Target Tahunan	98,98 %	102,03 %	Diatas Target



	Negeri Pulang Pisau	2023/2022 = 99,82 % Rata-rata Realisasi Tahunan tahun 2023= 98,98 % % Persentase Realisasi Anggaran 01 tahun 2023= 98,98 %				
--	------------------------	--	--	--	--	--

D. KENDALA

-

E. TINDAK LANJUT

1. Memberikan Pelatihan agar mendapatkan Putusan Hakim yang berkualitas sehingga menurunkan Persentase Upaya Hukum Banding
2. Mengupayakan pelatihan mediator dan melengkapi sarana prasarana ruang mediasi sehingga

F. PENUTUP

Demikian laporan monitoring dan evaluasi ini dibuat untuk dijadikan sebagai motivasi dan ketepatan dalam melaksanakan kegiatan.

Pulang Pisau, 28 Desember 2023

Yang Melaksanakan Monev

Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau



DIAN NUR PRATIWI



DOKUMENTASI



**NOTULEN RAPAT
MONITORING DAN EVALUASI**

Hari / Tanggal	:	Kamis, 28 Desember 2023
P u k u l	:	08.00 WIB sd Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat PN Pulang Pisau
Agenda	:	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan TA 2023
Pimpinan Rapat	:	Dian Nur Pratiwi
Notulis	:	Arofah Azhar
Peserta Rapat	:	Ketua, Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, ASN dan PPNPN

RINGKASAN ACARA

1.	Pembukaan Rapat langsung dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau selaku Pihak yang melaksanakan Monitoring dan Evaluasi						
2.	Hasil Monitoring dan Evaluasi						
	No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Realisasi	Keterangan
	1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Tahunan tahun 2023= 29</i> Perkara <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Tahunan tahun 2023= 89</i> Perkara <i>Jumlah Perkara Putus Tahunan tahun 2023= 118</i> Perkara <i>Jumlah Perkara Putus tepat Waktu Tahunan tahun 2023= 118</i> Perkara % Perkara Putus tepat Waktu Tahunan tahun 2023= 100.00 %	98 %	100 %	102.04 %	Diatas Target
	1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif <i>Jumlah Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Tahunan tahun 2023= 0</i> Perkara Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Tahunan tahun 2023= 0 %	0.1 %	0	0 %	Sesuai Target



1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p> <p><i>Jumlah Perkara Perdata Putus Tahunan tahun 2023=29</i> Perkara</p> <p><i>Jumlah Perkara Pidana Putus Tahunan tahun 2023= 89</i> Perkara</p> <p><i>Jumlah Perkara Putus Tahunan tahun 2023= 118</i> Perkara</p> <p><i>Jumlah Perkara yang Banding = 18</i> Perkara</p> <p><i>Jumlah Perkara yang Tidak melakukan Banding = 100</i> Perkara</p> <p>% Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahunan tahun 2023= 84,75 %</p>	84 %	84,75%	100,89 %	Diatas Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p> <p><i>Jumlah Perkara Perdata Putus Tahunan tahun 2023= 29</i> Perkara</p> <p><i>Jumlah Perkara Pidana Putus Tahunan tahun 2023= 89</i> Perkara</p> <p><i>Jumlah Perkara Putus Tahunan tahun 2023= 118</i> Perkara</p> <p><i>Jumlah Perkara yang Kasasi = 7</i>Perkara</p> <p><i>Jumlah Perkara yang Tidak melakukan Kasasi = 111</i> Perkara</p> <p>% Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahunan tahun 2023= 94,07 %</p>	90 %	94,07 %	104,52 %	Diatas Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p> <p><i>Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi yang didaftarkan Tahunan tahun 2023= 0</i> Perkara</p> <p><i>Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi yang diselesaikan 01 tahun 2023= 0</i> Perkara</p> <p>Persentase Perkara Pidana</p>	0.1 %	0	0 %	Sesuai Target



			Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahunan tahun 2023= 0 Perkara				
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan <i>Nilai Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahunan tahun 2023= 96,67 %</i> Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Tahunan tahun 2023= 96,67 %	3,7	3,87	101,76 %	Diatas Target	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Tahunan tahun 2023= 29 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Tahunan tahun 2023= 89 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Tahunan tahun 2023= 118 Perkara</i> <i>Jumlah Salinan yang dikirimkan Tepat Waktu = 118 Perkara</i> % Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu Tahunan tahun 2023= 100%	97 %	100 %	103,09%	Diatas Target	
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi <i>Jumlah Perkara Mediasi Tahunan tahun 2023= 5 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Mediasi Berhasil = 0 Perkara</i> % Persentase Perkara Mediasi Tahunan tahun 2023= 0	0,1 %	0 %	0 %	Sesuai target	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan <i>Jumlah Pendaftaran perkara prodeo Tahunan tahun 2023= 0 Perkara</i> <i>Jumlah Pendaftaran perkara prodeo yang diselesaikan Tahunan tahun 2023= 0 Perkara</i> Persentase perkara prodeo	0.1 %	0 %	0 %	Sesuai Target	



			yang diselesaikan Tahunan tahun 2023= 0 %				
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan <i>Jumlah Register Perkara Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Tahunan tahun 2023= 0 Perkara/b></i> Jumlah Penyelesaian Perkara diluar gedung pengadilan Tahunan tahun 2023= 0 Perkara Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan Tahunan tahun 2023= 0 %	0.1 %	0 %	0 %	Sesuai Target	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) <i>Jumlah Register Layanan POSBAKUM Tahunan tahun 2023= 2 Layanan</i> <i>Jumlah Pengguna Layanan POSBAKUM terlayani Tahunan tahun 2023= 2 Layanan</i> Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Tahunan tahun 2023= 100 %	100 %	100 %	100 %	Sesuai Target	
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) <i>Jumlah Perkara Perdata BHT Tahunan tahun 2023= 29 Perkara</i> <i>Jumlah Permohonan Eksekusi Tahunan tahun 2023= 0 Perkara</i> <i>Jumlah Permohonan Eksekusi 01 tahun 2023 yang ditindaklanjuti = 0 Perkara</i> Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahunan tahun 2023= 100 %	95 %	100 %	105,26%	Diatas Target	
5	Terwujudnya dukungan	Persentase realisasi anggaran	97 %	98,98 %	102,03 %	Diatas Target	



	<p>pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau</p>	<p>Realisasi DIPA BUA (401920) Tahunan tahun 2023= 98,13 % Realisasi DIPA BADILUM (402026) Tahunan tahun 20232022 = 99,82 % Rata-rata Realisasi Tahunan tahun 2023= 98,98 % % Persentase Realisasi Anggaran 01 tahun 2023= 98,98 %</p>	<p>Target Tahunan</p>			
--	---	--	-----------------------	--	--	--

3. **Dokumentasi**



4

Penutup

Demikian Monitoring dan Evaluasi ini di tutup pada jam 11.00 WIB.

PENGESAHAN
PIMPINAN RAPAT



KETUA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II,


DIAN NUR PRATIWI

NOTULIS


AROFAH AZHAR





BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

MONITORING & EVALUASI LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TA 2023



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Jalan Trans Kalimantan KM. 86 Pulang Pisau 748111,
Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Telp. (0513) 2027516

**# bangga
melayani
bangsa**

DAFTAR ISI

A.	DASAR HUKUM DAN PERATURAN	2
B.	WAKTU PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI	2
C.	HASIL MONITORING DAN EVALUASI	2
D.	KENDALA	6
E.	TINDAK LANJUT	6
F.	PENUTUP	6
	DOKUMENTASI.....	7



A. DASAR HUKUM DAN PERATURAN

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

B. WAKTU PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV TA 2023 dilaksanakan pada hari Kamis 28 Desember 2023

C. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Adapun Hasil Monev Diuraikan sebagai berikut:

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Realisasi	Keterangan
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan IV Tahun 2023= 7 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan IV Tahun 2023= 25 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Triwulan IV Tahun 2023= 32 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus tepat Waktu Triwulan IV Tahun 2023= 32 Perkara</i> % Perkara Putus tepat Waktu Triwulan IV Tahun 2023= 100.00 %	98 %	100 %	102.04 %	Diatas Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif <i>Jumlah Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Triwulan IV Tahun 2023= 0 Perkara</i> Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Triwulan IV Tahun 2023= 0 %	0.1 %	0	0 %	Sesuai Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti,	c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	84 %	78,13%	93 %	Dibawah Target



	transparan dan akuntabel	<p><i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan IV Tahun 2023=7</i> Perkara <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan IV Tahun 2023= 25</i> Perkara <i>Jumlah Perkara Putus Triwulan IV Tahun 2023= 32</i> Perkara <i>Jumlah Perkara yang Banding = 7</i> Perkara <i>Jumlah Perkara yang Tidak melakukan Banding = 25</i> Perkara % Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Triwulan IV Tahun 2023= 78,13 %</p>				
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p> <p><i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan IV Tahun 2023= 7</i> Perkara <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan IV Tahun 2023= 25</i> Perkara <i>Jumlah Perkara Putus Triwulan IV Tahun 2023= 32</i> Perkara <i>Jumlah Perkara yang Kasasi = 3</i> Perkara <i>Jumlah Perkara yang Tidak melakukan Kasasi = 29</i> Perkara % Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Triwulan IV Tahun 2023= 90,63 %</p>	90 %	90,63 %	100,69 %	Diatas Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p> <p><i>Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi yang didaftarkan Triwulan IV Tahun 2023= 0</i> Perkara <i>Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi yang diselesaikan 01 tahun 2023= 0</i> Perkara Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Triwulan IV Tahun 2023= 0 Perkara</p>	0.1 %	0	0 %	Sesuai Target



1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p> <p><i>Nilai Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2023= 96,67 %</i></p> <p>Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Triwulan IV Tahun 2023= 96,67 %</p>	95 %	96,67 %	101,76 %	Diatas Target
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu</p> <p><i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan IV Tahun 2023= 7 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan IV Tahun 2023= 25 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Perkara Putus Triwulan IV Tahun 2023= 32 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Salinan yang dikirimkan Tepat Waktu = 32 Perkara</i></p> <p>% Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu Triwulan IV Tahun 2023= 100%</p>	97 %	100 %	103,09%	Diatas Target
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi</p> <p><i>Jumlah Perkara Mediasi Triwulan IV Tahun 2023= 2 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Perkara Mediasi Berhasil = 0 Perkara</i></p> <p>% Persentase Perkara Mediasi Triwulan IV Tahun 2023= 0</p>	0.1 %	0 %	0 %	Dibawah target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p> <p><i>Jumlah Pendaftaran perkara prodeo Triwulan IV Tahun 2023= 0 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Pendaftaran perkara prodeo yang diselesaikan Triwulan IV Tahun 2023= 0 Perkara</i></p> <p>Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Triwulan IV Tahun 2023= 0 %</p>	0.1 %	0 %	0 %	Sesuai Target



3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</p> <p><i>Jumlah Register Perkara Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Triwulan IV Tahun 2023= 0 Perkara</i></p> <p><i>Jumlah Penyelesaian Perkara diluar gedung pengadilan Triwulan IV Tahun 2023= 0 Perkara</i></p> <p>Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan Triwulan IV Tahun 2023= 0 %</p>	0.1 %	0 %	0 %	Sesuai Target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)</p> <p>Jumlah Register Layanan POSBAKUM Triwulan IV Tahun 2023= 2 Layanan</p> <p>Jumlah Pengguna Layanan POSBAKUM terlayani Triwulan IV Tahun 2023= 2 Layanan</p> <p>Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Triwulan IV Tahun 2023= 100 %</p>	100 %	100 %	100 %	Sesuai Target
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	<p>Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)</p> <p>Jumlah Perkara Perdata BHT Triwulan IV Tahun 2023= 7 Perkara</p> <p>Jumlah Permohonan Eksekusi Triwulan IV Tahun 2023= 0 Perkara</p> <p>Jumlah Permohonan Eksekusi 01 tahun 2023 yang ditindaklanjuti = 0 Perkara</p> <p>Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) Triwulan IV Tahun 2023= 100 %</p>	95 %	100 %	105,26%	Diatas Target
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan	<p>Persentase realisasi anggaran</p> <p>Realisasi DIPA BUA (401920) Triwulan IV Tahun 2023= 98,13 %</p>	97 % Target Tahunan	98,98 %	102,03 %	Diatas Target



	Negeri Pulang Pisau	Realisasi DIPA BADILUM (402026) Triwulan IV Tahun 2023/2022 = 99,82 % Rata-rata Realisasi Triwulan IV Tahun 2023= 98,98 % % Persentase Realisasi Anggaran 01 tahun 2023= 98,98 %				
--	------------------------	--	--	--	--	--

D. KENDALA

1. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Dibawah Target 84 % yaitu 78,13 %

E. TINDAK LANJUT

1. Memberikan Pelatihan agar mendapatkan Putusan Hakim yang berkualitas sehingga menurunkan Persentase Upaya Hukum Banding

F. PENUTUP

Demikian laporan monitoring dan evaluasi ini dibuat untuk dijadikan sebagai motivasi dan ketepatan dalam melaksanakan kegiatan.



Pulang Pisau, 28 Desember 2023
Yang Melaksanakan Monev
Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau

[Handwritten Signature]
DIAN NUR PRATIWI



DOKUMENTASI



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
Jl. Trans Kalimantan km.86 Gohong
Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah
<https://pn-pulangpisau.go.id/>

**NOTULEN RAPAT
MONITORING DAN EVALUASI**

Hari / Tanggal	:	Kamis, 28 Desember 2023
P u k u l	:	08.00 WIB sd Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat PN Pulang Pisau
Agenda	:	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV TA 2023
Pimpinan Rapat	:	Dian Nur Pratiwi
Notulis	:	Arofah Azhar
Peserta Rapat	:	Ketua, Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, ASN dan PPNPN

RINGKASAN ACARA

1.	Pembukaan Rapat langsung dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau selaku Pihak yang melaksanakan Monitoring dan Evaluasi						
2.	Hasil Monitoring dan Evaluasi						
	No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Realisasi	Keterangan
	1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan IV TAhun 2023= 7 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan IV TAhun 2023= 25 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Triwulan IV TAhun 2023= 32 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus tepat Waktu Triwulan IV Tahun 2023= 32 Perkara</i> % Perkara Putus tepat Waktu Triwulan IV Tahun 2023= 100.00 %	98 %	100 %	102.04 %	Diatas Target
	1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif <i>Jumlah Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Triwulan IV TAhun 2023= 0 Perkara</i> Persentase putusan yang menggunakan pendekatan	0.1 %	0	0 %	Sesuai Target



			keadilan restoratif Triwulan IV TAhun 2023= 0 %				
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan IV TAhun 2023=7 Perkara Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan IV TAhun 2023= 25 Perkara Jumlah Perkara Putus Triwulan IV TAhun 2023= 32 Perkara Jumlah Perkara yang Banding = 7 Perkara Jumlah Perkara yang Tidak melakukan Banding = 25 Perkara % Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Triwulan IV TAhun 2023= 78,13 %</i>	84 %	78,13%	93 %	Dibawah Target	
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan IV TAhun 2023= 7 Perkara Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan IV TAhun 2023= 25 Perkara Jumlah Perkara Putus Triwulan IV TAhun 2023= 32 Perkara Jumlah Perkara yang Kasasi = 3 Perkara Jumlah Perkara yang Tidak melakukan Kasasi = 29 Perkara % Persentase putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Triwulan IV TAhun 2023= 90,63 %</i>	90 %	90,63 %	100,69 %	Diatas Target	
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi <i>Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi yang didaftarkan Triwulan IV TAhun 2023= 0 Perkara Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi yang diselesaikan 01 tahun 2023= 0 Perkara</i>	0.1 %	0	0 %	Sesuai Target	



		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Triwulan IV Tahun 2023= 0 Perkara				
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan <i>Nilai Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2023= 96,67 %</i> Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Triwulan IV Tahun 2023= 96,67 %	95 %	96,67 %	101,76 %	Diatas Target
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu <i>Jumlah Perkara Perdata Putus Triwulan IV Tahun 2023= 7 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Pidana Putus Triwulan IV Tahun 2023= 25 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Putus Triwulan IV Tahun 2023= 32 Perkara</i> <i>Jumlah Salinan yang dikirimkan Tepat Waktu = 32 Perkara</i> % Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu Triwulan IV Tahun 2023= 100%	97 %	100 %	103,09%	Diatas Target
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi <i>Jumlah Perkara Mediasi Triwulan IV Tahun 2023= 2 Perkara</i> <i>Jumlah Perkara Mediasi Berhasil = 0 Perkara</i> % Persentase Perkara Mediasi Triwulan IV Tahun 2023= 0	0.1 %	0 %	0 %	Dibawah target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan <i>Jumlah Pendaftaran perkara prodeo Triwulan IV Tahun 2023= 0 Perkara</i> <i>Jumlah Pendaftaran perkara prodeo yang diselesaikan Triwulan IV Tahun 2023= 0 Perkara</i> Persentase perkara prodeo	0.1 %	0 %	0 %	Sesuai Target



			yang diselesaikan Triwulan IV TAhun 2023= 0 %				
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan <i>Jumlah Register Perkara Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Triwulan IV TAHUN 2023= 0 Perkara</i> Jumlah Penyelesaian Perkara diluar gedung pengadilan Triwulan IV TAHUN 2023= 0 Perkara Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan Triwulan IV TAHUN 2023= 0 %	0.1 %	0 %	0 %	Sesuai Target	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) <i>Jumlah Register Layanan POSBAKUM Triwulan IV TAHUN 2023= 2 Layanan</i> <i>Jumlah Pengguna Layanan POSBAKUM terlayani Triwulan IV TAHUN 2023= 2 Layanan</i> Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Triwulan IV TAHUN 2023= 100 %	100 %	100 %	100 %	Sesuai Target	
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) <i>Jumlah Perkara Perdata BHT Triwulan IV TAHUN 2023= 7 Perkara</i> <i>Jumlah Permohonan Eksekusi Triwulan IV TAHUN 2023= 0 Perkara</i> <i>Jumlah Permohonan Eksekusi 01 tahun 2023 yang ditindaklanjuti = 0 Perkara</i> Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) Triwulan IV TAHUN 2023= 100 %	95 %	100 %	105,26%	Diatas Target	



5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran Realisasi DIPA BUA (401920) Triwulan IV Tahun 2023= 98,13 % Realisasi DIPA BADILUM (402026) Triwulan IV Tahun 20232022 = 99,82 % Rata-rata Realisasi Triwulan IV Tahun 2023= 98,98 % % Persentase Realisasi Anggaran 01 tahun 2023= 98,98 %	97 % Target Tahun n	98,98 %	102,03 %	Diatas Target
---	---	---	------------------------------	---------	----------	----------------------

3. **Dokumentasi**





4

Penutup

Demikian Monitoring dan Evaluasi ini di tutup pada jam 11.00 WIB.

PENGESAHAN
PIMPINAN RAPAT



KETUA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II,


DIAN NUR PRATIWI

NOTULIS


AROFAH AZHAR





LAMPIRAN III

RENCANA KINERJA TAHUN 2023





BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

REVISI KE-2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Jalan Trans Kalimantan KM. 86 Pulang Pisau 748111,
Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Telp. (0513) 2027516

 **bangga
melayani
bangsa**

REVISI KE-2
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2023
Pengadilan Negeri Pulang Pisau



Pengadilan Negeri Pulang Pisau
Jl. Trans Kalimantan km. 86 Gohong
Pulang Pisau, Kalimantan Tengah
Telp. 0513 - 2027516 , Fax 0513-2027516
E-mail: pnpulangpisau@gmail.com

**REVISI KE-2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98 %
		b. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	98 %
		c. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0.1 %
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	84 %
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90 %
		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0.1 %
		g. Index Kepuasan Pencari Keadilan	3.7
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97 %
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97 %
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	0.1 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0.1 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0.1 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	95 %
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran	97 %

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 22 Desember 2023



Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau,

[Signature]
DIAN NUR PRATIWI



Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Jl. Trans Kalimantan KM. 86, Gohong, Kabupaten Pulang Pisau



↳ LAMPIRAN IV MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 - 2024 PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU



MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Instansi : Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang Agung

Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

1. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

2. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan ~~Badan~~ Peradilan

3. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Pengadilan Negeri Pulang Pisau													
Sasaran Strategis	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel												Kepaniteraan
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu		95%	96%	97%	98%	98%						
	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu		95%	96%	97%	98%	98%						

	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif		0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%						
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding		70 %	71 %	72 %	84 %	85%						
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		80 %	80 %	82 %	90 %	90 %						
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi		2%	2%	0.1%	0.1%	0.1%						
	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan		75 %	80%	93%	3,7	3,7						
Sasaran Strategis	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara												Kepaniteraan
Indikator Kinerja	Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu		95%	96%	96%	97%	97%						

Sasaran Strategis	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi		2%	2%	9%	0.1%	3%						
Sasaran Strategis	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan												Kepaniteraan
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan		0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	90%						
	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	90%						
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)		100%	100%	100%	100%	100%						
Sasaran Strategis	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan												Kepaniteraan
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)		90%	90%	90%	95%							

PROGRAM PELAYANAN HAM	PENEGAKKAN HUKUM DAN							68.550	78.945	65,500	93.000	193,591	Kesekretarian
Sasaran Program	Terselenggaranya Peningkatan Manajemen Peradilan Umum												
<i>Indikator Kinerja Program</i>	<i>Percepatan Penyelesaian Perkara</i>		2	2	2	2	2						
Peningkatan Peradilan Umum	Manajemen							68.550	78.945	65,500	93.000	193,591	Kesekretarian
<i>Indikator Kinerja Program</i>	<i>Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah</i>		150	150	150	150	74						
Sasaran kegiatan	Meningkatnya Manajemen Peradilan Umum di Pengadilan Negeri Pulang Pisau												
<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>	<i>Jumlah Kegiatan Percepatan Penyelesaian Perkara</i>		2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg						
	<i>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau</i>		150 PKR	150 PKR	150 PKR	150 PKR	150 PKR						
PROGRAM MANAJEMEN	DUKUNGAN							9.895.023	27.910.592	7,617,002	8.306.920	6,568,700	Kesekretarian

Sasaran Program	Meningkatnya Kualitas Layanan untuk dukungan manajemen internal dalam pelaksanaan pelayanan Prima Pengadilan Negeri Pulang Pisau												
<i>Indikator Kinerja Program</i>	<i>Persentase Realisasi Anggaran Belanja</i>		90%	90%	95%	97%	98%						
PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN URUSAN ADMINISTRASI								3.439.469	4.023.137	4,232,602	3.806.920	5,166,200	Kesekretariatan
Sasaran kegiatan	Terpenuhinya Pelaksanaan Layanan Umum dan Layanan Perkantoran Pengadilan Negeri Pulang Pisau												
<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>	<i>Jumlah Pelaksanaan Layanan Umum</i>		1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay						
	<i>Jumlah Pelaksanaan Layanan Perkantoran</i>		1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay						
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG								6.455.554	23.887.455	3,384,400	4.500.000	1,402,500	Kesekretariatan
Sasaran kegiatan	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Pulang Pisau												
<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>	<i>Jumlah Layanan Sarana Internal</i>		1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay						
	<i>Jumlah Layanan Prasarana Internal</i>		1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay						



LAMPIRAN V

SK TIM PENYUSUN LKJiP,
SAKIP DAN EVALUATOR
SAKIP





PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
NOMOR: W16-U11/98/KPN/OT.01/SK/12/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi korupsi dan nepotisme (KKN), meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penguatan Kinerja baik dari Perencanaan, Evaluasi Maupun Pelaporan di lingkungan Pengadilan Negeri Pulang Pisau diperlukan Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang

- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005, tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005, tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Ketatalaksanaan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

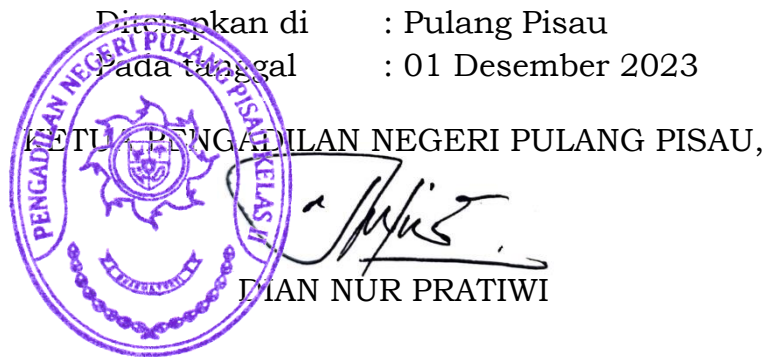
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TENTANG PEMBENTUKKAN TIM EVALUATOR AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PADA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN
2023

- KESATU : Membentuk Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau 2023 sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluator sebagaimana tersebut dalam diktum pertama bertugas melakukan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KEEMPAT : **Salinan** Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pulang Pisau

Pada tanggal : 01 Desember 2023



DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

NOMOR : W16-U11/ 98/KPN/OT.01/SK/12/2023

TANGGAL : 01 Desember 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2023

No.	JABATAN	NAMA dan NIP
1	Penanggung Jawab	DIAN NUR PRATIWI, S.H., M.H. Li NIP. 19810108 200312 2 001
2	Ketua Tim	RUSPELIATI, S.H. NIP. 19690401 199103 2 002
3	Sekretaris	I MADE LANDEP, SH NIP. 19721004 199303 1 006
4	Anggota Tim	AROFAH AZHAR, A.Md. NIP. 19890324 202012 1 002

Ditetapkan di : Pulang Pisau

pada tanggal : 01 Desember 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,



DIAN NUR PRATIWI



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
NOMOR: W16-U11/ 97/KPN/OT.01/SK/12/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Pulang Pisau ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
9. Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/05/2007 tentang

Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau

KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Pebruari Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

KEEMPAT : **Salinan** Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pulang Pisau

Pada tanggal : 01 Desember 2023



KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,

DIAN NUR PRATIWI

DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

NOMOR : W16-U11/ 97/KPN/OT.01/SK/12/2023
TANGGAL : 01 Desember 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

No.	JABATAN	NAMA dan NIP
1	Penanggung Jawab	DIAN NUR PRATIWI, S.H., M.H.Li. NIP. 19810108 200312 2 001
2	Koordinator Validasi Data	LELO HERAWAN, S.H. NIP. 19850114 200904 1 003
3	Ketua	RUSPELIATI, S.H. NIP. 19690401 199103 2 002
4	Sekretariat	I MADE LANDEP, SH NIP. 19721004 199303 1 006
		SAMSUL RIZAL, S.H. NIP. 19840404 200604 1 004
		LAILI RAHMAH, A.Md., S.H. NIP. 198012242009122005
		AROFAH AZHAR, A.Md NIP. 198903242020121002

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada tanggal : 01 Desember 2023



KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,


DIAN NUR PRATIWI



↳ LAMPIRAN VI NOTULEN RAPAT PENYUSUNAN LKjIP TAHUN 2023





PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

Jl. Trans Kalimantan km. 86, Gohong, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau

Telp. (0513) 2027516 , Fax (0513)2027516

Website : www.pn-pulangpisau.go.id. E-mail : pnpulangpisau@gmail.com

Pulang Pisau, 14 Desember 2023

Nomor : W16-U11/16/RPT.PTIP/12/2023
Perihal : Rapat Awal Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023
Lampiran : -

Kepada Yth : 1. Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau
2. Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau
3. Sekretaris Pengadilan Negeri Pulang Pisau
4. Panitera Muda Pengadilan Negeri Pulang Pisau
5. Kepala Sub Bagian Pengadilan Negeri Pulang Pisau
6. ASN Pengadilan Negeri Pulang Pisau
7. PPNPN Pengadilan Negeri Pulang Pisau
Di -
Tempat

Bersama ini dengan Hormat, kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk dapat mengikuti Rapat pada:

Hari : Senin
Tanggal : 18 Desember 2023
Waktu : 08.00 WIB – Selesai
Agenda : Rapat Awal Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023
Tempat : Ruang Rapat Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Demikian undangan ini dibuat, atas kehadiran dan perhatiannya diucapkan terima kasih.



KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,


DIAN NUR PRATIWI



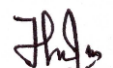
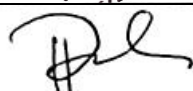

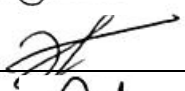


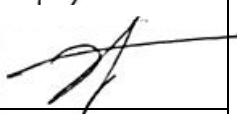
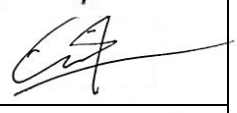


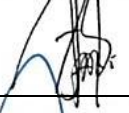



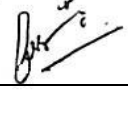
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

JL. Tingang Menteng No 39 Telp. (0513) 2027516 , Fax (0513)2027516
Website : www.pn-pulangpisau.go.id. E-mail : pnulangpisau@gmail.com

DAFTAR HADIR RAPAT PENYUSUNAN AWAL LAPORAN KINERJA (LKJIP) TAHUN 2023

Hari : SENIN
Tanggal : 18 Desember 2023

No	Nama Pegawai	Jabatan	Tanda Tangan
01	Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li	Ketua	
02	Ismaya Salindri, S.H., M.H.	Hakim	
03	Herjanriasto Bektu Nugroho, S.H., M.H.	Hakim	
04	Ishmatul Lu`Lu, S.H.	Hakim	
05	Silvia Kumalasari, S.H.	Hakim	
06	Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.	Hakim	
07	Dwi Fahriyah Suci Anggraini, S.H.	Hakim	
08	Ruspeliati, S.H.	Panitera	
09	I Made Landep, S.H.	Sekretaris	
10	Lelo Herawan, S.H.	Panitera Muda Hukum	
11	Noorhayati, S.Kom.,S.H.	Panitera Muda Pidana	
12	Dede Andreas, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	

13	Samsul Rizal, S.H.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	
14	Laili Rahmah, A.Md., M.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana	
15	Reinhard Simanjuntak, S.H.	Plt. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	
16	M. Zaldi Akbar, S.H.	Staf Kepaniteraan Perdata	
17	Romi Nevriyandra, A.Md.	Pengadministrasi Registrasi Perkara	
18	Riviera Jesica M, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	
19	Janward Sumuang Purba	Jurusita	
20	Arofah Azhar, A.Md.	Pengelola Sistem & Jaringan	
21	Ahmad Faisal Rosadi	PPNPN	
22	Vicky Krisli	PPNPN	
23	Alfi Fahmi	PPNPN	
24	M. Dian . GM	PPNPN	
25	Geryawan	PPNPN	
26	Rony	PPNPN	
27	Lessa Wara'a Ezzana	PPNPN	

Mengetahui
Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau,


DIAN NUR PRATIWI

NOTULEN RAPAT
Penyusunan LKJIP tahun 2023

Hari / Tanggal	:	Senin, 18 Desember 2023
P u k u l	:	08.00 WIB sd Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat PN Pulang Pisau
Agenda	:	Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pimpinan Rapat	:	Dian Nur Pratiwi
Notulis	:	Lessa Wara'a Ezzana
Peserta Rapat	:	1. Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau 2. Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau 3. Sekretaris Pengadilan Negeri Pulang Pisau 4. Panitera Muda Pengadilan Negeri Pulang Pisau 5. Kepala Sub Bagian Pengadilan Negeri Pulang Pisau 6. ASN Pengadilan Negeri Pulang Pisau 7. PPNPN Pengadilan Negeri Pulang Pisau

RINGKASAN ACARA

1.	Pembukaan Rapat langsung dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau
2.	Hasil Rapat <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Menyampaikan SK tentang Tim Evaluator SAKIP dan Tim Penyusunan LKJIP tahun 2023 Nomor W16-U11/97/KPN/OT.01/SK/12/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dan W16-U11/98/KPN/OT.01/SK/12/2023 tentang Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 2. Pembahasan tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pulang Pisau oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 1884/KPT.W16/RA.1/X/2023 tanggal 05 oktober 2023 Pengadilan Negeri Pulang Pisau memiliki kewajiban melaporkan Kinerjanya sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan 3. Ketua Tim Evaluator Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau membacakan hasil target capaian Kinerja yang telah dicapai selama tahun 2023 4. Laporan Kinerja harus sudah dilaporkan paling lambat tanggal 28 Pebruari 2024. 5. Pengumpulan Dokumen Sumber Keadaan Perkara dikoordinir oleh Kepaniteraan Hukum, sedangkan Dokumen Sumber Kesekretariatan dikoordinir oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan. 6. Dokumen Sumber tersebut di verifikasi oleh Tim Evaluator SAKIP. 7. Tim Penyusun LkjIP membagi tugas dalam Penyusunan LkjIP dimana Bab I akan di disusun oleh Panitera Muda Pidana yaitu Noorhayati, Bab II akan Disusun oleh Dede Andreas selaku Panitera Muda Perdata, Bab III tentang Capaian Terkait Keadaan Perkara akan dilaksanakan oleh Lelo Herawan selaku Panitera Muda Hukum, Bab III terkait Realisasi Anggaran akan

dilaksanakan oleh Reinhard Simanjuntak selaku Plh. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Bab IV akan disusun oleh Laili Rahmah selaku Kepala Sub Bagian kepegawaian, Organisasi dan tatalaksana, Lampiran dan Kompilasi LkjIP akan disusun oleh Samsul Rizal selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan

8. Seluruh Bab LkjIP paling lambat diserahkan 31 Januari 2024.
9. Kompilasi Laporan LkjIP akan dilaksanakan dari tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan 08 Pebruari 2024 yang kemudian akan diverifikasi oleh Tim Evaluator SAKIP
10. Selanjutnya Finalisasi LKJIP akan dilaksanakan pada tanggal 08 Pebruari 2024 dan akan dilakukan Penandatanganan LKjIP pada tanggal 12 Pebruari 2024.
11. Tahap pengiriman LKjIP diselesaikan sebelum batas akhir penyampaian laporan tanggal yaitu 28 Pebruari 2024.

3. **Dokumentasi**





**PENGESAHAN
PIMPINAN RAPAT**

Mengetahui,
Sekretaris
Pengadilan Negeri Pulang Pisau

I MADE LANDEP

Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI
dan Pelaporan

SAMSUL RIZAL



**KETUA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II,**

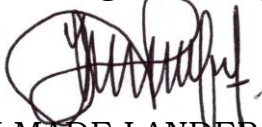
DIAN NUR PRATIWI

NOTULIS

LESSA WARA'A EZZANA

PENGESAHAN
PIMPINAN RAPAT

Mengetahui,
Sekretaris
Pengadilan Negeri Pulang Pisau



I MADE LANDEP

Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI
dan Pelaporan



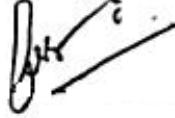
SAMSUL RIZAL

KETUA TIM



RUSPELIATI

NOTULIS



LESSA WARA'A EZZANA



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

Jl. Trans Kalimantan km. 86, Gohong, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau

Telp. (0513) 2027516 , Fax (0513)2027516

Website : www.pn-pulangpisau.go.id. E-mail : pnpulangpisau@gmail.com

Pulang Pisau, 05 Pebruari 2024

Nomor : W16-U11/01/TIM-LKJIP-2023/01/2024
Perihal : Rapat Finalisasi Penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP)
Lampiran : -

Kepada Yth : 1. Tim Penyusun Laporan LKJIP
2. Tim Evaluator AKIP
Di –
Tempat

Bersama ini dengan Hormat, kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk dapat mengikuti Rapat pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 08 Pebruari 2024
Waktu : 08.00 WIB – Selesai
Agenda : Rapat Finalisasi Penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP)
Tempat : Ruang Rapat Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Demikian undangan ini dibuat, atas kehadiran dan perhatiannya diucapkan terima kasih.



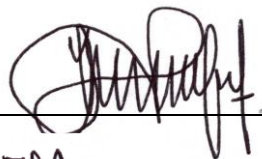



KETUA TIM



RUSPELIATI

**DAFTAR HADIR
NOTULEN RAPAT
Penyusunan LKJIP tahun 2023**

Hari / Tanggal	:	Kamis, 08 Pebruari 2024
P u k u l	:	08.00 WIB sd Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat PN Pulang Pisau
Agenda	:	Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Peserta Rapat	:	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Penyusun Laporan LKJIP Tahun 2023 • Tim Evaluator AKIP

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	LELO HERAWAN, S.H. NIP. 19850114 200904 1 003	Koordinator Validasi Data	
2	RUSPELIATI, S.H. NIP. 19690401 199103 2 002	Ketua	
3	I MADE LANDEP, SH NIP. 19721004 199303 1 006	Sekretariat	
4	SAMSUL RIZAL, S.H. NIP. 19840404 200604 1 004	Anggota	
5	LAILI RAHMAH, A.Md., S.H. NIP. 198012242009122005	Anggota	
6	AROFAH AZHAR, A.Md NIP. 198903242020121002	Anggota	

Ketua Tim,



RUSPELIATI, S.H.

NOTULEN RAPAT
Penyusunan LKJIP tahun 2023

Hari / Tanggal	:	Kamis, 08 Pebruari 2024
P u k u l	:	08.00 WIB sd Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat PN Pulang Pisau
Agenda	:	Rapat Finalisasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pimpinan Rapat	:	RUSPELIATI SELAKU KETUA Tim Penyusunan Laporan LKJIP Tahun 2023
Notulis	:	Lessa Wara'a Ezzana
Peserta Rapat	:	1. Tim Penyusun Laporan LKJIP Tahun 2023 2. Tim Evaluator AKIP

RINGKASAN ACARA

1.	Pembukaan Rapat langsung dibuka oleh Ketua Tim																												
2.	<p>Hasil Rapat</p> <p>1. Ketua Tim telah menyusun Capaian Per Indikator dengan hasil sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 40%;">Sasaran strategis</th> <th style="width: 35%;">Indikator Kinerja</th> <th style="width: 20%;">Capaian (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">1</td> <td rowspan="7">Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</td> <td>a. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu</td> <td>102,04 %</td> </tr> <tr> <td>b. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu</td> <td>102,04 %</td> </tr> <tr> <td>c. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</td> <td>100,89 %</td> </tr> <tr> <td>e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</td> <td>104,52 %</td> </tr> <tr> <td>f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</td> <td>104,59 %</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I</td> <td>102,82 %</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</td> <td>a. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat</td> <td>103,09 %</td> </tr> </tbody> </table>	No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	102,04 %	b. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	102,04 %	c. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100,89 %	e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	104,52 %	f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	-	g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	104,59 %	Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			102,82 %	2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat	103,09 %
No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)																										
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	102,04 %																										
		b. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	102,04 %																										
		c. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-																										
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100,89 %																										
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	104,52 %																										
		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	-																										
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	104,59 %																										
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			102,82 %																										
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat	103,09 %																										

		waktu	
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	103,09 %
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	-
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			103,09 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100,00 %
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III			100,00%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	105,26%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV			105,26%
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran	102,08%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis V			102,08 %
Rata – Rata Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023			102,65%

2. Tim Menerima hasil penjabaran dari tiap-tiap bidang untuk mengkompilasi Hasil Akhir Laporan LKJIP
3. Tim Merapatkan dan menyusun kembali dokumen Laporan LKJIP agar sesuai dengan hasil LHE dari Pengadilan Tinggi sebagai berikut:

Sub Komponen	Uraian	Tindak Lanjut
Perencanaan Kinerja	Tanggal penetapan RKT Tahun 2022 seharusnya dibuat setelah tanggal penetapan reuiu ke-2 Renstra Tahun 2020-2024	Melakukan Revisi ke-2 RKT Tahun 2023
	Pada cover dan judul dokumen revisi RKT Tahun 2022 tidak menunjukkan revisi keberapa.	Membuat Cover Revisi ke-2 RKT Tahun 2023

	Indikator Tujuan dan Matriks Sasaran Strategis Bab II reviu Renstra Tahun 2020-2024 belum selaras dengan Indikator Tujuan dan Matriks Sasaran Strategis Bab II Renstra Mahkamah Agung Tahun 2020-2024.	Memperbaiki dan Mereviu Bab II Reviu Renstra 2020 – 2024
	Target Indikator "Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan" pada dokumen reviu IKU, reviu Renstra, RKT Tahun 2022, dan PKT Tahun 2022 seharusnya tidak dalam bentuk persentase melainkan dalam bentuk angka (skala 1-4).	Mereviu IKU, Reviu Renstra, Revisi RKT Tahun 2023, dan Revisi PKT Tahun 2023
	Pada dokumen reviu IKU, reviu Renstra, revisi RKT 2022 dan PKT 2022 khususnya pada indikator "Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu" dan "Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu" belum dijabarkan per jenis perkara.	Mereviu IKU, Reviu Renstra, Revisi RKT Tahun 2023, dan Revisi PKT Tahun 2023
	Sasaran Strategis antara Pohon Kinerja dengan reviu Ke-2 Renstra belum selaras.	Memperbaiki Pohon Kinerja Tahun 2023 agar selaras dengan Renstra
	Tujuan, sasaran dan indikator pada Pohon Kinerja tahun 2022 belum menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja.	Menjadikan Pohon Kinerja Tahun 2023 menjadi Acuan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja
	Pohon Kinerja belum menggambarkan hubungan kinerja antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang saling berkaitan (crosscutting).	Memperbaiki Pohon Kinerja Tahun 2023 agar selaras dengan Renstra
Pengukuran Kinerja	Sudah terdapat analisis / rekomendasi pada monev PKT, namun belum terdapat upaya perbaikan/penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja sesuai rekomendasi tersebut.	Tindak Lanjut Monev akan dilaksanakan tahun 2024
Pelaporan Kinerja	Dokumen LKjIP belum sepenuhnya menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (periode renstra).	Dokumen LKJiP 2023 akan di analisis secara tajam dan akan menginformasikan Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Jangka Menengah
	Dokumen LkjIP belum sepenuhnya menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan.	Dokumen LKJiP 2023 akan di analisis secara tajam dengan menginformasikan Kualitas Capaian Kinerja dan Hambatan
	Dokumen LKjIP belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	Dokumen LKJiP 2023 akan di analisis efesiensi atas penggunaan sumber daya
	Dokumen LKjIP belum menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan	Dokumen LKJiP 2023 akan di analisis dengan penyempurnaan dan upaya

		kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).	<i>perbaikan kinerja tahun 2023</i>
		Terdapat rekomendasi penyesuaian target pada monev penyusunan laporan kinerja pertriwulan, namun belum ada perbaikan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi tersebut.	<i>Monev Kinerja triwulanan akan di sertai dengan perbaikan dan tindak lanjut</i>
		Terdapat rekomendasi penyesuaian anggaran pada monev penyusunan laporan kinerja pertriwulan, namun eviden tindak lanjut hasil penyesuaian anggaran sesuai rekomendasi belum ada.	<i>Monev Kinerja triwulanan akan di sertai dengan peviden tindak lanjut</i>
		Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.	<i>Pelaksanaan Sosialisasi Hasil Evaluasi SAKIP</i>
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi	Beberapa anggota Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum memiliki sertifikat pelatihan atau bimbingan teknis akuntabilitas kinerja.	<i>Pengusulan Tim Kinerja agar mengikuti Pelatihan SAKIP Tahun 2024</i>
		Belum sepenuhnya terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.	<i>Pelaksanaan Sosialisasi Hasil Evaluasi SAKIP</i>
		Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan/ peningkatan akuntabilitas kinerja dan mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	<i>Pelaksanaan Sosialisasi Hasil Evaluasi SAKIP</i>
3.	Dokumentasi		





↳ LAMPIRAN VII KEADAAN PERKARA TAHUN 2023



Export Excel

REKAPITULASI UPAYA HUKUM BANDING PERKARA GUGATAN
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
Januari Desember 2023

NO	URAIAN	BULAN												TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	Permohonan Banding	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
2	Pengiriman Berkas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
3	Putusan PT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
4	Belum Putus PT	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
5	Penerimaan PN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
6	Pemberitahuan Pembanding/Terbanding	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2

Export Excel

REKAPITULASI UPAYA HUKUM BANDING PERKARA PIDANA BIASA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
Januari Desember 2023

NO	URAIAN	BULAN												TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	Permohonan Banding	0	2	0	1	0	1	1	3	2	3	1	2	16
2	Pengiriman Berkas	2	0	2	1	0	0	1	2	2	3	2	0	15
3	Putusan PT	2	1	2	0	1	0	0	1	2	2	4	1	16
4	Belum Putus PT	1	2	0	1	0	1	2	4	4	5	2	3	3
5	Penerimaan PN	1	0	1	1	1	0	0	1	2	2	3	2	14
6	Pemberitahuan Pembanding/Terbanding	0	0	0	2	0	1	0	1	2	2	1	3	12

Export Excel

REKAPITULASI UPAYA HUKUM KASASI PERKARA PIDANA ANAK
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
Januari Desember 2023

NO	URAIAN	BULAN												TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	Permohonan Kasasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pengiriman Berkas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Putusan MA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Belum Putus MA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Penerimaan PN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Pemberitahuan Pemohon/Termohon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Export Excel

REKAPITULASI UPAYA HUKUM KASASI PERKARA GUGATAN
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
Januari Desember 2023

NO	URAIAN	BULAN												TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	Permohonan Kasasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pengiriman Berkas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Putusan MA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
4	Belum Putus MA	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Penerimaan PN	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
6	Pemberitahuan Pemohon/Termohon	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Export Excel

REKAPITULASI UPAYA HUKUM EKSEKUSI PERKARA GUGATAN
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
Januari Desember 2023

NO	URAIAN	BULAN												TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	Masuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Export Excel

JUMLAH PERKARA MEDIASI DAN HASIL MEDIASI
 PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
 Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Perkara			Jumlah Perkara Mediasi					Jumlah Hasil Mediasi dan % Hasil Mediasi Terhadap Jumlah Perkara Mediasi										Mediasi Berjalan		
		Sisa Bulan Lalu	Bulan Berjalan	Total	Sisa Bulan Lalu	Bulan Berjalan	Total	%	Berhasil						Total Berhasil		Tidak Berhasil		Tidak Dapat Dilaksanakan			
									Akta Perdamaian / Putusan		Berhasil Sebagian		Pencabutan									
									Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Januari	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	3	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	April	5	1	6	-	2	2	33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100%
5	Mei	4	1	5	2	1	3	60%	-	-	-	-	-	-	-	-	2	67%	-	-	1	33%
6	Juni	3	3	6	1	1	2	33%	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100%	-	-	-	-
7	Juli	6	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	6	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	September	5	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	1	2	3	-	1	1	33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100%
11	November	2	2	4	1	-	1	25%	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100%	-	-	-	-
12	Desember	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		1	20	21	-	5	5	24%	-	-	-	-	-	-	-	-	5	100%	-	-	-	-

Export Excel

REKAPITULASI PERKARA GUGATAN
 PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
 Januari - Desember 2023

NO	BULAN	SISA BULAN LALU			MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS BULAN INI	BELUM PEMBAGIAN MAJELIS	MEDIASI BERHASIL	MEDIASI GAGAL	GUGUR	CABUT	JUMLAH PUTUS	JUMLAH MEDIASI BERHASIL	MINUTASI BULAN INI	BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA
		BELUM PUTUS	SUDAH PUTUS BELUM MINUTASI	MEDIASI BERHASIL BELUM MINUTASI													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Januari	1	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
2	Februari	2	0	0	2	4	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3
3	Maret	3	0	0	4	7	2	1	0	0	0	0	2	0	2	0	5
4	April	5	0	0	1	6	2	1	0	0	0	0	2	0	2	0	4
5	Mei	4	0	0	2	6	2	1	0	2	0	0	2	0	2	0	4
6	Juni	4	0	0	5	9	3	2	0	2	0	0	3	0	3	0	6
7	Juli	6	0	0	2	8	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	7
8	Agustus	7	0	0	3	10	4	0	0	0	0	0	4	0	4	0	6
9	September	6	0	0	1	7	6	0	0	0	0	0	6	0	6	0	1
10	Oktober	1	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
11	November	2	0	0	3	5	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4
12	Desember	4	0	0	2	6	4	0	0	0	0	0	4	0	4	0	2
TOTAL					29		28		0	5	0	0			28		

Export Excel

REKAPITULASI PERKARA PIDANA BIASA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
Januari - Desember 2023

NO	BULAN	SISA BULAN LALU YANG BELUM DIMINUTASI	MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS	BELUM PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM	PUTUS SAMPAI BULAN INI	MINUTASI BULAN INI	PUTUS BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA	JUMLAH TERDAKWA	JUMLAH TERPIDANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	4	9	13	4	4	4	4	0	9	33	24
2	Februari	9	3	12	7	2	7	7	0	5	28	22
3	Maret	5	10	15	6	0	6	6	0	9	34	25
4	April	9	8	17	9	0	9	9	0	8	36	28
5	Mei	8	4	12	10	0	10	10	0	2	28	19
6	Juni	2	9	11	3	4	3	3	0	8	28	20
7	Juli	8	12	20	3	0	3	3	0	17	45	35
8	Agustus	17	38	55	37	0	37	37	0	18	138	77
9	September	18	7	25	9	0	9	9	0	16	55	41
10	Oktober	16	3	19	16	0	16	16	0	3	42	31
11	November	3	7	10	3	0	3	3	0	7	26	19
12	Desember	7	13	20	9	0	9	9	0	11	47	30
Total			123		116			116			540	371

Export Excel

REKAPITULASI UPAYA HUKUM KASASI PERKARA PIDANA BIASA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
Januari Desember 2023

NO	URAIAN	BULAN												TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	Permohonan Kasasi	0	2	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	7
2	Pengiriman Berkas	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	2	0	5
3	Putusan MA	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	4
4	Belum Putus MA	0	2	2	2	1	1	0	1	2	3	3	3	3
5	Penerimaan PN	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4
6	Pemberitahuan Pemohon/Termohon	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	4

Export Excel

REKAPITULASI PERKARA PIDANA ANAK
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
Januari - Desember 2023

NO	BULAN	SISA BULAN LALU YANG BELUM DIMINUTASI	MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS	BELUM PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM	PUTUS SAMPAI BULAN INI	MINUTASI BULAN INI	PUTUS BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA	JUMLAH TERDAKWA	JUMLAH TERPIDANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	0	1	1	1	0	1	1	0	0	2	1
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	1	1	0	1	0	0	0	1	2	1
7	Juli	1	1	2	1	0	1	1	0	1	3	2
8	Agustus	1	1	2	2	0	2	2	0	0	2	2
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total			4		4			4			9	6

Export Excel

REKAPITULASI UPAYA HUKUM BANDING PERKARA PIDANA ANAK
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
Januari Desember 2023

NO	URAIAN	BULAN												TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	Permohonan Banding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pengiriman Berkas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Putusan PT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Belum Putus PT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Penerimaan PN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Pemberitahuan Pembanding/Terbanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



LAMPIRAN VIII

TINDAK LANJUT ATAS LHE PT PALANGKA RAYA



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



MONITORING & EVALUASI

TERHADAP LHE KINERJA 2022



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Jalan Trans Kalimantan KM. 86 Pulang Pisau 748111,
Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Telp. (0513) 2027516

bangga
melayani
bangsa

DAFTAR ISI

A.	PENDAHULUAN	2
B.	WAKTU PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI	2
C.	HASIL LHE <i>PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA</i>	2
D.	HASIL MONEV TERHADAP LHE	6
A.	PENUTUP	8
	DOKUMENTASI.....	9

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pulang Pisau oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 1884/KPT.W16/RA.1/X/2023 tanggal 05 oktober 2023 dengan Nilai 64.4 dengan Nilai (B)

Dari Hasil Penilaian tersebut perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi tentang tindak Lanjut Pencapaian Nilai LKJIP Pengadilan Negeri Pulang Pisau tersebut, agar bisa memberikan gambaran langkah kedepan dalam hal perbaikan Kinerja di tahun 2022

B. WAKTU PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi LHE LKjIP dilaksanakan pada hari Kamis, Tanggal 11 Desember 2023 di Ruangan Rapat Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Adapun Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

C. HASIL LHE PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Adapun LKE LKjk IP Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Kriteria Penilaian	Bobot	Penilaian
1	Perencanaan Kinerja	<ul style="list-style-type: none">Dokumen Reviu Renstra PN Pulang Pisau belum memuat Matriks tujuan strategis 1- sehingga indikator Non Kinerja utama belum ada baik di dokumen Renstra maupun dokumen RKT dan PKT.Matrik kinerja dan pendanaan jangka menengah pada Bab IV Renstra belum selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024.Pohon Kinerja sudah ada, namun Sasaran Strategis yang	30,00 %	19,8 %

		ada pada KPN belum sepenuhnya diturunkan kepada Panitia dan jabatan dibawahnya. Pohon Kinerja belum menggambarkan hubungan kinerja antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang saling berkaitan (crosscutting).		
2	Pengukuran Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Data Kinerja yang dikumpulkan sebagai data input pada aplikasi Komdanas, e-monev Bappenas dan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) seharusnya menyajikan data yang sama dan relevan dalam mendukung capaian kinerja yang diharapkan. • Monitoring dan evaluasi (monev) pengukuran capaian kinerja secara triwulanan belum memuat rekomendasi atau perbaikan untuk capaian kedepannya. • Belum terdapat rapat revisi anggaran yang membahas mengenai keadaan anggaran maupun rencana pergeseran atau penyesuaian anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan pencapaian kinerja yang ditetapkan. • Rapat berjenjang mulai dari rapat kepaniteraan, rapat kesekretariatan sampai rapat bulanan belum terdapat memuat hasil pengukuran capaian kinerja yang dilakukan secara berkala. 	30,00 %	20,7 %
3	Pelaporan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Pada Bab III dokumen LkjIP belum memuat sepenuhnya analisa tentang upaya 1. dan hambatan pencapaian indikator, mengenai keberhasilan dan kegagalan dari masing-masing indikator. • Pada Bab III dokumen LKjIP Tahun 2022 belum dilengkapi analisa efisiensi atas 	15,00 %	9,9%

		penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja.		
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa anggota Tim evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum memiliki sertifikat pelatihan atau bimbingan teknis Akuntabilitas Kinerja. • Hasil rekomendasi terhadap pemantauan dan evaluasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan di tahun berikutnya. 	25,00 %	14,00 %
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA			100,00 %	64,4 %

Dari penilaian LKJIP tersebut maka beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LJKIP agar nilai yang didapat dapat dipertahankan dan ditingkatkan di dalam periode selanjutnya.

A. Perencanaan Kinerja

1. Tanggal penetapan RKT Tahun 2022 seharusnya dibuat setelah tanggal penetapan reviu ke-2 Renstra Tahun 2020-2024
2. Pada cover dan judul dokumen revisi RKT Tahun 2022 tidak menunjukkan revisi keberapa.
3. Indikator Tujuan dan Matriks Sasaran Strategis Bab II reviu Renstra Tahun 2020-2024 belum selaras dengan Indikator Tujuan dan Matriks Sasaran Strategis Bab II Renstra Mahkamah Agung Tahun 2020-2024.
4. Target Indikator "Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan" pada dokumen reviu IKU, reviu Renstra, RKT Tahun 2022, dan PKT Tahun 2022 seharusnya tidak dalam bentuk persentase melainkan dalam bentuk angka (skala 1-4).
5. Pada dokumen reviu IKU, reviu Renstra, revisi RKT 2022 dan PKT 2022 khususnya pada indikator "Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu" dan "Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu" belum dijabarkan per jenis perkara.

6. Sasaran Strategis antara Pohon Kinerja dengan rewiu Ke-2 Renstra belum selaras.
7. Tujuan, sasaran dan indikator pada Pohon Kinerja tahun 2022 belum menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja.
8. Pohon Kinerja belum menggambarkan hubungan kinerja antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang saling berkaitan (*crosscutting*).

B. Pengukuran Kinerja

1. Sudah terdapat analisis / rekomendasi pada monev PKT, namun belum terdapat upaya perbaikan/penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja sesuai rekomendasi tersebut.

C. Pelaporan Kinerja

1. Dokumen LKjIP belum sepenuhnya menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (periode renstra).
2. Dokumen LkjlP belum sepenuhnya menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
3. Dokumen LKjIP belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
4. Dokumen LKjIP belum menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).
5. Terdapat rekomendasi penyesuaian target pada monev penyusunan laporan kinerja pertriwulan, namun belum ada perbaikan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi tersebut.
6. Terdapat rekomendasi penyesuaian anggaran pada monev penyusunan laporan kinerja pertriwulan, namun eviden tindak lanjut hasil penyesuaian anggaran sesuai rekomendasi belum ada.

- Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Beberapa anggota Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum memiliki sertifikat pelatihan atau bimbingan teknis akuntabilitas kinerja.
- Belum sepenuhnya terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.
- Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan/ peningkatan akuntabilitas kinerja dan mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

D. HASIL MONEV TERHADAP LHE

Sub Komponen	Uraian	Tindak Lanjut
Perencanaan Kinerja	Tanggal penetapan RKT Tahun 2022 seharusnya dibuat setelah tanggal penetapan revidi ke-2 Renstra Tahun 2020-2024	Melakukan Revisi ke-2 RKT Tahun 2023
	Pada cover dan judul dokumen revisi RKT Tahun 2022 tidak menunjukkan revisi keberapa.	Membuat Cover Revisi ke-2 RKT Tahun 2023
	Indikator Tujuan dan Matriks Sasaran Strategis Bab II revidi Renstra Tahun 2020-2024 belum selaras dengan Indikator Tujuan dan Matriks Sasaran Strategis Bab II Renstra Mahkamah Agung Tahun 2020-2024.	Memperbaiki dan Merevidi Bab II Revidi Renstra 2020 – 2024
	Target Indikator "Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan" pada dokumen revidi IKU, revidi Renstra, RKT Tahun 2022, dan PKT Tahun 2022 seharusnya tidak dalam bentuk persentase melainkan dalam bentuk angka (skala 1-4).	Merevidi IKU, Revidi Renstra, Revisi RKT Tahun 2023, dan Revisi PKT Tahun 2023

	Pada dokumen reuiu IKU, reuiu Renstra, revisi RKT 2022 dan PKT 2022 khususnya pada indikator "Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu" dan "Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu" belum dijabarkan per jenis perkara.	<i>Mereviu IKU, Reuiu Renstra, Revisi RKT Tahun 2023, dan Revisi PKT Tahun 2023</i>
	Sasaran Strategis antara Pohon Kinerja dengan reuiu Ke-2 Renstra belum selaras.	<i>Memperbaiki Pohon Kinerja Tahun 2023 agar selaras dengan Renstra</i>
	Tujuan, sasaran dan indikator pada Pohon Kinerja tahun 2022 belum menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja.	<i>Menjadikan Pohon Kinerja Tahun 2023 menjadi Acuan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja</i>
	Pohon Kinerja belum menggambarkan hubungan kinerja antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang saling berkaitan (crosscutting).	<i>Memperbaiki Pohon Kinerja Tahun 2023 agar selaras dengan Renstra</i>
Pengukuran Kinerja	Sudah terdapat analisis / rekomendasi pada monev PKT, namun belum terdapat upaya perbaikan/penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja sesuai rekomendasi tersebut.	<i>Tindak Lanjut Monev akan dilaksanakan tahun 2024</i>
Pelaporan Kinerja	Dokumen LKjIP belum sepenuhnya menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (periode renstra).	<i>Dokumen LKJiP 2023 akan di analisis secara tajam dan akan menginformasikan Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Jangka Menengah</i>
	Dokumen LkjIP belum sepenuhnya menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.	<i>Dokumen LKJiP 2023 akan di analisis secara tajam dengan menginformasikan Kualitas Capaian Kinerja dan Hambatan</i>
	Dokumen LKjIP belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	<i>Dokumen LKJiP 2023 akan di analisis efesiensi atas penggunaan sumber daya</i>
	Dokumen LKjIP belum menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).	<i>Dokumen LKJiP 2023 akan di analisis dengan penyempurnaan dan upaya perbaikan kinerja tahun 2023</i>
	Terdapat rekomendasi penyesuaian target pada monev penyusunan laporan kinerja pertriwulan, namun belum ada perbaikan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi tersebut.	<i>Monev Kinerja triwulanan akan di sertai dengan perbaikan dan tindak lanjut</i>
	Terdapat rekomendasi penyesuaian anggaran pada monev penyusunan laporan kinerja pertriwulan, namun	<i>Monev Kinerja triwulanan akan di sertai dengan peviden tindak lanjut</i>

	eviden tindak lanjut hasil penyesuaian anggaran sesuai rekomendasi belum ada.	
	Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.	<i>Pelaksanaan Sosialisasi Hasil Evaluasi SAKIP</i>
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi	Beberapa anggota Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum memiliki sertifikat pelatihan atau bimbingan teknis akuntabilitas kinerja.	<i>Pengusulan Tim Kinerja agar mengikuti Pelatihan SAKIP Tahun 2024</i>
	Belum sepenuhnya terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.	<i>Pelaksanaan Sosialisasi Hasil Evaluasi SAKIP</i>
	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan/ peningkatan akuntabilitas kinerja dan mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	<i>Pelaksanaan Sosialisasi Hasil Evaluasi SAKIP</i>

A. PENUTUP

Demikian laporan monitoring dan evaluasi ini dibuat untuk dijadikan pedoman untuk membuat kebijakan baru atau mengevaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan.

Pulang Pisau, 11 Desember 2023
Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau

DIAN NUR PRATIWI

DOKUMENTASI





**NOTULEN RAPAT
MONITORING DAN EVALUASI LKJIP**

Hari / Tanggal	:	Senin / 11 Desember 2023
P u k u l	:	08.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Pengadilan Negeri Pulang Pisau
Agenda	:	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut LHE LkjIP Tahun 2022
Pimpinan Rapat	:	Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau
Notulis	:	Arofah Azhar
Peserta Rapat	:	Seluruh Pegawai PN Pulang Pisau

RINGKASAN ACARA

1.	Pembukaan	Rapat langsung dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau selaku Pihak yang melaksanakan Monitoring dan Evaluasi												
2.		Adapun LKE LKjk IP Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:												
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 20%;">Komponen Penilaian</th> <th style="width: 45%;">Kriteria Penilaian</th> <th style="width: 15%;">Bobot</th> <th style="width: 15%;">Penilaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Reviu Renstra PN Pulang Pisau belum memuat Matriks tujuan strategis 1- sehingga indikator Non Kinerja utama belum ada baik di dokumen Renstra maupun dokumen RKT dan PKT. • Matrik kinerja dan pendanaan jangka menengah pada Bab IV Renstra belum selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024. • Pohon Kinerja sudah ada, namun Sasaran Strategis yang ada pada KPN belum sepenuhnya diturunkan kepada Panitera dan jabatan dibawahnya. Pohon Kinerja belum menggambarkan hubungan kinerja antar bidang dengan tugas dan fungsi lain </td> <td style="text-align: center;">30,00 %</td> <td style="text-align: center;">19,8 %</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Komponen Penilaian	Kriteria Penilaian	Bobot	Penilaian	1	Perencanaan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Reviu Renstra PN Pulang Pisau belum memuat Matriks tujuan strategis 1- sehingga indikator Non Kinerja utama belum ada baik di dokumen Renstra maupun dokumen RKT dan PKT. • Matrik kinerja dan pendanaan jangka menengah pada Bab IV Renstra belum selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024. • Pohon Kinerja sudah ada, namun Sasaran Strategis yang ada pada KPN belum sepenuhnya diturunkan kepada Panitera dan jabatan dibawahnya. Pohon Kinerja belum menggambarkan hubungan kinerja antar bidang dengan tugas dan fungsi lain 	30,00 %	19,8 %		
No.	Komponen Penilaian	Kriteria Penilaian	Bobot	Penilaian										
1	Perencanaan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Reviu Renstra PN Pulang Pisau belum memuat Matriks tujuan strategis 1- sehingga indikator Non Kinerja utama belum ada baik di dokumen Renstra maupun dokumen RKT dan PKT. • Matrik kinerja dan pendanaan jangka menengah pada Bab IV Renstra belum selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024. • Pohon Kinerja sudah ada, namun Sasaran Strategis yang ada pada KPN belum sepenuhnya diturunkan kepada Panitera dan jabatan dibawahnya. Pohon Kinerja belum menggambarkan hubungan kinerja antar bidang dengan tugas dan fungsi lain 	30,00 %	19,8 %										

			yang saling berkaitan (crosscutting).			
		2	Pengukuran Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> Data Kinerja yang dikumpulkan sebagai data input pada aplikasi Komdanas, e-monev Bappenas dan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) seharusnya menyajikan data yang sama dan relevan dalam mendukung capaian kinerja yang diharapkan. Monitoring dan evaluasi (monev) pengukuran capaian kinerja secara triwulanan belum memuat rekomendasi atau perbaikan untuk capaian kedepannya. Belum terdapat rapat revisi anggaran yang membahas mengenai keadaan anggaran maupun rencana pergeseran atau penyesuaian anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan pencapaian kinerja yang ditetapkan. Rapat berjenjang mulai dari rapat kepaniteraan, rapat kesekretariatan sampai rapat bulanan belum terdapat memuat hasil pengukuran capaian kinerja yang dilakukan secara berkala. 	30,00 %	20,7 %
		3	Pelaporan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> Pada Bab III dokumen LkjIP belum memuat sepenuhnya analisa tentang upaya 1. dan hambatan pencapaian indikator, mengenai keberhasilan dan kegagalan dari masing-masing indikator. Pada Bab III dokumen LKjIP Tahun 2022 belum dilengkapi analisa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja. 	15,00 %	9,9%
		4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa anggota Tim evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum memiliki sertifikat pelatihan atau bimbingan teknis Akuntabilitas Kinerja. 	25,00 %	14,00 %

		<ul style="list-style-type: none"> Hasil rekomendasi terhadap pemantauan dan evaluasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan di tahun berikutnya. 		
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA			100,00 %	64,4 %

Dari penilaian LKJiP tersebut maka beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LJKIP agar nilai yang didapat dapat dipertahankan dan ditingkatkan di dalam periode selanjutnya.

A. Perencanaan Kinerja

1. Tanggal penetapan RKT Tahun 2022 seharusnya dibuat setelah tanggal penetapan reuiu ke-2 Renstra Tahun 2020-2024
2. Pada cover dan judul dokumen revisi RKT Tahun 2022 tidak menunjukkan revisi keberapa.
3. Indikator Tujuan dan Matriks Sasaran Strategis Bab II reuiu Renstra Tahun 2020-2024 belum selaras dengan Indikator Tujuan dan Matriks Sasaran Strategis Bab II Renstra Mahkamah Agung Tahun 2020-2024.
4. Target Indikator "Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan" pada dokumen reuiu IKU, reuiu Renstra, RKT Tahun 2022, dan PKT Tahun 2022 seharusnya tidak dalam bentuk persentase melainkan dalam bentuk angka (skala 1-4).
5. Pada dokumen reuiu IKU, reuiu Renstra, revisi RKT 2022 dan PKT 2022 khususnya pada indikator "Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu" dan "Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu" belum dijabarkan per jenis perkara.
6. Sasaran Strategis antara Pohon Kinerja dengan reuiu Ke-2 Renstra belum selaras.
7. Tujuan, sasaran dan indikator pada Pohon Kinerja tahun 2022 belum menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja.

8. Pohon Kinerja belum menggambarkan hubungan kinerja antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang saling berkaitan (*crosscutting*).

B. Pengukuran Kinerja

1. Sudah terdapat analisis / rekomendasi pada monev PKT, namun belum terdapat upaya perbaikan/penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja sesuai rekomendasi tersebut.

C. Pelaporan Kinerja

1. Dokumen LKjIP belum sepenuhnya menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (periode renstra).
2. Dokumen LkjlP belum sepenuhnya menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
3. Dokumen LKjIP belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
4. Dokumen LKjIP belum menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).
5. Terdapat rekomendasi penyesuaian target pada monev penyusunan laporan kinerja pertriwulan, namun belum ada perbaikan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi tersebut.
6. Terdapat rekomendasi penyesuaian anggaran pada monev penyusunan laporan kinerja pertriwulan, namun eviden tindak lanjut hasil penyesuaian anggaran sesuai rekomendasi belum ada.
7. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Beberapa anggota Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum memiliki sertifikat pelatihan atau bimbingan teknis akuntabilitas kinerja.

2. Belum sepenuhnya terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.
3. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan/ peningkatan akuntabilitas kinerja dan mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Sub Komponen	Uraian	Tindak Lanjut
Perencanaan Kinerja	Tanggal penetapan RKT Tahun 2022 seharusnya dibuat setelah tanggal penetapan revidi ke-2 Renstra Tahun 2020-2024	Melakukan Revisi ke-2 RKT Tahun 2023
	Pada cover dan judul dokumen revisi RKT Tahun 2022 tidak menunjukkan revisi keberapa.	Membuat Cover Revisi ke-2 RKT Tahun 2023
	Indikator Tujuan dan Matriks Sasaran Strategis Bab II revidi Renstra Tahun 2020-2024 belum selaras dengan Indikator Tujuan dan Matriks Sasaran Strategis Bab II Renstra Mahkamah Agung Tahun 2020-2024.	Memperbaiki dan Merevidi Bab II Revidi Renstra 2020 – 2024
	Target Indikator "Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan" pada dokumen revidi IKU, revidi Renstra, RKT Tahun 2022, dan PKT Tahun 2022 seharusnya tidak dalam bentuk persentase melainkan dalam bentuk angka (skala 1-4).	Revidi Renstra, Revisi RKT Tahun 2023, dan Revisi PKT Tahun 2023
	Pada dokumen revidi IKU, revidi Renstra, revisi RKT 2022 dan PKT 2022 khususnya pada indikator "Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu" dan "Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu" belum dijabarkan per jenis perkara.	Revidi Renstra, Revisi RKT Tahun 2023, dan Revisi PKT Tahun 2023
	Sasaran Strategis antara Pohon Kinerja dengan revidi Ke-2 Renstra belum selaras.	Memperbaiki Pohon Kinerja Tahun 2023 agar selaras dengan Renstra
	Tujuan, sasaran dan indikator pada Pohon Kinerja tahun 2022 belum menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja.	Menjadikan Pohon Kinerja Tahun 2023 menjadi Acuan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja

		Pohon Kinerja belum menggambarkan hubungan kinerja antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang saling berkaitan (crosscutting).	Memperbaiki Pohon Kinerja Tahun 2023 agar selaras dengan Renstra
	Pengukuran Kinerja	Sudah terdapat analisis / rekomendasi pada monev PKT, namun belum terdapat upaya perbaikan/penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja sesuai rekomendasi tersebut.	Tindak Lanjut Monev akan dilaksanakan tahun 2024
	Pelaporan Kinerja	Dokumen LKjIP belum sepenuhnya menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (periode renstra).	Dokumen LKJiP 2023 akan di analisis secara tajam dan akan menginformasikan Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Jangka Menengah
		Dokumen LkjiP belum sepenuhnya menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.	Dokumen LKJiP 2023 akan di analisis secara tajam dengan menginformasikan Kualitas Capaian Kinerja dan Hambatan
		Dokumen LKjIP belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	Dokumen LKJiP 2023 akan di analisis efesiensi atas penggunaan sumber daya
		Dokumen LKjIP belum menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).	Dokumen LKJiP 2023 akan di analisis dengan penyempurnaan dan upaya perbaikan kinerja tahun 2023
		Terdapat rekomendasi penyesuaian target pada monev penyusunan laporan kinerja pertriwulan, namun belum ada perbaikan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi tersebut.	Monev Kinerja triwulanan akan di sertai dengan perbaikan dan tindak lanjut
		Terdapat rekomendasi penyesuaian anggaran pada monev penyusunan laporan kinerja pertriwulan, namun eviden tindak lanjut hasil penyesuaian anggaran sesuai rekomendasi belum ada.	Monev Kinerja triwulanan akan di sertai dengan eviden tindak lanjut
		Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.	Pelaksanaan Sosialisasi Hasil Evaluasi SAKIP
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi	Beberapa anggota Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum memiliki sertifikat pelatihan atau bimbingan teknis akuntabilitas kinerja.	Pengusulan Tim Kinerja agar mengikuti Pelatihan SAKIP Tahun 2024
		Belum sepenuhnya terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas	Pelaksanaan Sosialisasi Hasil Evaluasi SAKIP

		rekomenadasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.	
		Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan/ peningkatan akuntabilitas kinerja dan mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	<i>Pelaksanaan Sosialisasi Hasil Evaluasi SAKIP</i>

3. **Dokumentasi**

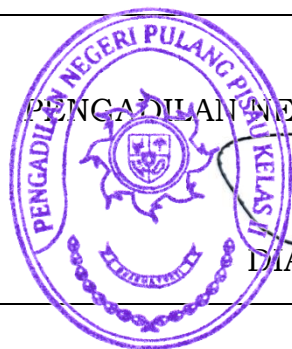






4 Penutup
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut LHE LkjIP Tahun 2022 ditutup pada Pukul 11.00 WIB oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

PENGESAHAN
PIMPINAN RAPAT



KETUA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II,


DIAN NUR PRATIWI

NOTULIS


AROFAH AZHAR



LAMPIRAN IX REALISASI ANGGARAN



LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1400) KALIMANTAN TENGAH
SATUAN KERJA : (401920) PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Tgl Data : 27/02/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 27/02/24 9:54 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,670,548,728	2,803,713,189	(133,164,461)	(4.75)
Beban Persediaan	42,410,645	49,399,073	(6,988,428)	(14.147)
Beban Barang dan Jasa	840,644,463	1,151,217,910	(310,573,447)	(26.978)
Beban Pemeliharaan	372,470,636	164,896,361	207,574,275	125.882
Beban Perjalanan Dinas	53,694,093	38,268,927	15,425,166	40.307
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1400) KALIMANTAN TENGAH
SATUAN KERJA : (401920) PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Tgl Data : 27/02/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 27/02/24 9:54 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,399,545,210	1,226,076,300	173,468,910	14.148
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	5,379,313,775	5,433,571,760	(54,257,985)	(0.999)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(5,379,313,775)	(5,433,571,760)	54,257,985	(0.999)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(5,379,313,775)	(5,433,571,760)	54,257,985	(0.999)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(5,379,313,775)	(5,433,571,760)	54,257,985	(0.999)

Keterangan :

FINAL

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1400) KALIMANTAN TENGAH
SATUAN KERJA : (402026) PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Tgl Data : 27/02/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 27/02/24 9:57 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	8,484,000	4,245,000	4,239,000	99.859
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	8,484,000	4,245,000	4,239,000	99.859
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	8,484,000	4,245,000	4,239,000	99.859
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	36,655,388	33,105,104	3,550,284	10.724
Beban Barang dan Jasa	48,086,000	28,544,900	19,541,100	68.457
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	14,490,000	7,200,000	7,290,000	101.25
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1400) KALIMANTAN TENGAH
SATUAN KERJA : (402026) PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Tgl Data : 27/02/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 27/02/24 9:57 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	99,231,388	68,850,004	30,381,384	44.127
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(90,747,388)	(64,605,004)	(26,142,384)	40.465
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(90,747,388)	(64,605,004)	(26,142,384)	40.465
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(90,747,388)	(64,605,004)	(26,142,384)	40.465

Keterangan :

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1400) KALIMANTAN TENGAH

SATUAN KERJA : (401920) PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Tgl Data : 27/02/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 27/02/24 9:54 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	33,057,563,764	30,544,239,103	2,513,324,661	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5,379,313,775)	(5,433,571,760)	54,257,985	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(101,773,038)	(10,590,489)	(91,182,549)	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(101,773,038)	(10,590,489)	(91,182,549)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	12,973,118,305	7,957,486,910	5,015,631,395	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	7,492,031,492	2,513,324,661	4,978,706,831	-
EKUITAS AKHIR	40,549,595,256	33,057,563,764	7,492,031,492	-

Keterangan :

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1400) KALIMANTAN TENGAH
SATUAN KERJA : (402026) PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Tgl Data : 27/02/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 27/02/24 9:57 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(90,747,388)	(64,605,004)	(26,142,384)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	90,747,388	64,605,004	26,142,384	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0	0	0	-
EKUITAS AKHIR	0	0	0	-

Keterangan :

FINAL

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU 401920

Tgl Data : 27/02/24 6:25 AM
Tgl Cetak : 27/02/24 9:53 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	13,225,492,000	12,989,143,409	(236,348,591)	98	7,617,002,000	7,599,600,910	(17,401,090)	100
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU 401920

Tgl Data : 27/02/24 6:25 AM
Tgl Cetak : 27/02/24 9:54 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	13,225,492,000	12,989,143,409	(236,348,591)	98	7,617,002,000	7,599,600,910	(17,401,090)	100
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU 402026

Tgl Data : 27/02/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 27/02/24 9:56 AM

Halaman : 2

lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	93,000,000	92,833,000	(167,000)	100	65,500,000	64,892,900	(607,100)	99
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU 402026

Tgl Data : 27/02/24 6:25 AM
Tgl Cetak : 27/02/24 9:57 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	93,000,000	92,833,000	(167,000)	100	65,500,000	64,892,900	(607,100)	99
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 1400 **KALIMANTAN TENGAH**
SATUAN KERJA : 401920 **PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 27/02/24 9:55 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 27/2/24 7:43 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	967,642,000	997,185,000	968,558,160	0	968,558,160	97.13	28,626,840
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	17,000	24,000	15,915	0	15,915	66.31	8,085
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	43,600,000	64,564,000	42,056,950	0	42,056,950	65.14	22,507,050
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	15,506,000	18,248,000	15,935,954	0	15,935,954	87.33	2,312,046
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	21,280,000	28,040,000	22,260,000	154	22,259,846	79.39	5,780,154
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	977,620,000	1,248,767,000	1,146,880,000	0	1,146,880,000	91.84	101,887,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	123,160,000	142,652,000	122,798,733	0	122,798,733	86.08	19,853,267
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	48,100,000	55,000,000	50,042,220	0	50,042,220	90.99	4,957,780
511129	Belanja Uang Makan PNS	158,400,000	190,000,000	164,301,000	0	164,301,000	86.47	25,699,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	15,715,000	22,560,000	17,735,000	185,050	17,549,950	78.61	5,010,050
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	129,600,000	129,600,000	120,150,000	0	120,150,000	92.71	9,450,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	2,500,640,000	2,896,640,000	2,670,733,932	185,204	2,670,548,728	92.2	226,091,272
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	2,500,640,000	2,896,640,000	2,670,733,932	185,204	2,670,548,728	92.2	226,091,272
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	592,029,000	644,370,000	644,358,905	0	644,358,905	100	11,095
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,200,000	1,532,000	1,532,000	0	1,532,000	100	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	101,640,000	83,520,000	83,477,000	0	83,477,000	99.95	43,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	697,869,000	729,422,000	729,367,905	0	729,367,905	99.99	54,095
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	3,948,000	3,948,000	3,948,000	0	3,948,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	3,948,000	3,948,000	3,948,000	0	3,948,000	100	0
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	35,259,000	42,411,000	42,410,645	0	42,410,645	100	355
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	35,259,000	42,411,000	42,410,645	0	42,410,645	100	355
5221	Belanja Jasa							
522113	Belanja Langganan Air	12,000	5,000	0	0	0	0	5,000
522141	Belanja Sewa	111,180,000	104,052,000	104,051,308	0	104,051,308	100	692
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	111,192,000	104,057,000	104,051,308	0	104,051,308	99.99	5,692
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	278,472,000	273,282,000	273,271,000	0	273,271,000	100	11,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	125,600,000	99,220,000	99,199,636	0	99,199,636	99.98	20,364

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 1400 **KALIMANTAN TENGAH**
SATUAN KERJA : 401920 **PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 27/02/24 9:55 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 27/2/24 7:43 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	404,072,000	372,502,000	372,470,636	0	372,470,636	99.99	31,364
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53,940,000	53,940,000	53,694,093	0	53,694,093	99.54	245,907
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	53,940,000	53,940,000	53,694,093	0	53,694,093	99.54	245,907
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,306,280,000	1,306,280,000	1,305,942,587	0	1,305,942,587	99.97	337,413
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	706,626,000	706,526,000	0	706,526,000	99.99	100,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	706,626,000	706,526,000	0	706,526,000	99.99	100,000
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,500,000,000	8,315,946,000	8,315,926,094	9,800,000	8,306,126,094	100	9,819,906
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	4,500,000,000	8,315,946,000	8,315,926,094	9,800,000	8,306,126,094	100	9,819,906
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	4,500,000,000	9,022,572,000	9,022,452,094	9,800,000	9,012,652,094	100	9,919,906
	JUMLAH BELANJA	8,306,920,000	13,225,492,000	12,999,128,613	9,985,204	12,989,143,409	98.29	236,348,591

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 03 **DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**
WILAYAH/PROVINSI : 1400 **KALIMANTAN TENGAH**
SATUAN KERJA : 402026 **PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 27/02/24 9:56 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 27/2/24 7:43 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,400,000	4,400,000	4,336,000	0	4,336,000	98.55	64,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	7,400,000	4,400,000	4,336,000	0	4,336,000	98.55	64,000
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	13,850,000	19,790,000	19,750,000	0	19,750,000	99.8	40,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	13,850,000	19,790,000	19,750,000	0	19,750,000	99.8	40,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	36,000,000	30,260,000	30,257,000	0	30,257,000	99.99	3,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	36,000,000	30,260,000	30,257,000	0	30,257,000	99.99	3,000
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultan	24,000,000	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	24,000,000	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000	100	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,500,000	1,500,000	1,440,000	0	1,440,000	96	60,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,250,000	13,050,000	13,050,000	0	13,050,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	11,750,000	14,550,000	14,490,000	0	14,490,000	99.59	60,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	93,000,000	93,000,000	92,833,000	0	92,833,000	99.82	167,000
	JUMLAH BELANJA	93,000,000	93,000,000	92,833,000	0	92,833,000	99.82	167,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 03 **DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**
WILAYAH/PROVINSI : 1400 **KALIMANTAN TENGAH**
SATUAN KERJA : 402026 **PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 27/02/24 9:56 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 27/2/24 7:43 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,400,000	4,400,000	4,336,000	0	4,336,000	98.55	64,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	7,400,000	4,400,000	4,336,000	0	4,336,000	98.55	64,000
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	13,850,000	19,790,000	19,750,000	0	19,750,000	99.8	40,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	13,850,000	19,790,000	19,750,000	0	19,750,000	99.8	40,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	36,000,000	30,260,000	30,257,000	0	30,257,000	99.99	3,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	36,000,000	30,260,000	30,257,000	0	30,257,000	99.99	3,000
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultan	24,000,000	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	24,000,000	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000	100	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,500,000	1,500,000	1,440,000	0	1,440,000	96	60,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,250,000	13,050,000	13,050,000	0	13,050,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	11,750,000	14,550,000	14,490,000	0	14,490,000	99.59	60,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	93,000,000	93,000,000	92,833,000	0	92,833,000	99.82	167,000
	JUMLAH BELANJA	93,000,000	93,000,000	92,833,000	0	92,833,000	99.82	167,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : 1400 KALIMANTAN TENGAH
SATUAN KERJA : 401920 PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Kode Lap : LRA.P.E1.1
 Tanggal : 27/02/24 9:55 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	51,769,354	0	51,769,354	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	51,769,354	0	51,769,354	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	51,769,354	0	51,769,354	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	51,769,354	0	51,769,354	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 03 **DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**
WILAYAH/PROVINSI : 1400 **KALIMANTAN TENGAH**
SATUAN KERJA : 402026 **PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 27/02/24 9:56 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	10,000	0	10,000	0
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	650,000	0	650,000	0
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	1,510,000	1,240,000	0	1,240,000	82.12
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	5,533,000	6,584,000	0	6,584,000	119
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	7,043,000	8,484,000	0	8,484,000	120.46
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	7,043,000	8,484,000	0	8,484,000	120.46
	JUMLAH PENDAPATAN	7,043,000	8,484,000	0	8,484,000	120.46

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1400) KALIMANTAN TENGAH
SATUAN KERJA : (401920) PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Tgl Data : 27/02/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 27/02/24 9:54 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	3,277,250	(3,277,250)	(100.00)
JUMLAH ASET LANCAR	0	3,277,250	(3,277,250)	(100.00)
ASET TETAP				
Tanah	50,060,000	50,060,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	4,183,982,200	3,295,434,000	888,548,200	26.96
Gedung dan Bangunan	40,210,225,488	30,780,146,582	9,430,078,906	30.64
Aset Tetap Lainnya	190,000	190,000	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	1,370,248,366	(1,370,248,366)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,894,862,432)	(2,441,792,434)	(1,453,069,998)	59.51
JUMLAH ASET TETAP	40,549,595,256	33,054,286,514	7,495,308,742	22.68
JUMLAH ASET	40,549,595,256	33,057,563,764	7,492,031,492	22.66

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	40,549,595,256	33,057,563,764	7,492,031,492	22.66
JUMLAH EKUITAS	40,549,595,256	33,057,563,764	7,492,031,492	22.66
JUMLAH EKUITAS	40,549,595,256	33,057,563,764	7,492,031,492	22.66
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	40,549,595,256	33,057,563,764	7,492,031,492	22.66

Keterangan :

FINAL

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1400) KALIMANTAN TENGAH
SATUAN KERJA : (402026) PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Tgl Data : 27/02/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 27/02/24 9:56 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	8,072,000	0	8,072,000	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	8,072,000	0	8,072,000	
JUMLAH ASET	8,072,000	0	8,072,000	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	8,072,000	0	8,072,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	8,072,000	0	8,072,000	
JUMLAH KEWAJIBAN	8,072,000	0	8,072,000	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	8,072,000	0	8,072,000	

Keterangan :

FINAL

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1400) KALIMANTAN TENGAH
SATUAN KERJA : (402026) PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Tgl Data : 27/02/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 27/02/24 9:57 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0	0	0	
-------------------------------------	----------	----------	----------	--

Keterangan :

FINAL